



# Kata Pengantar

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO  
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
Jl. 7 Jalan Jend. Sudirman No. 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521

JASA KONSULTANSI

## PENELITIAN - PENGUKURAN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA (IPP)

Puji serta syukur kami ucapkan kepada Allah SWT, atas izin-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Laporan Akhir untuk pekerjaan **Jasa Konsultansi Penelitian – Study dan Pengukuran Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Tahun 2022**.

Dokumen Laporan Akhir ini kami sampaikan untuk memenuhi kewajiban, sesuai ketentuan yang tertuang dalam Kontrak. Isi dari Laporan Akhir meliputi pendahuluan, profil Kabupaten Sukoharjo, tahapan dan metode pelaksanaan, analisa penilaian indikator pembangunan pemuda, kesimpulan dan rekomendasi.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada Direksi Teknis yang telah berkenan memberikan masukan dan dukungan selama kegiatan berlangsung.

Semoga Dokumen Laporan Akhir ini dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukoharjo, Tahun Anggaran 2022.

Sukoharjo, Oktober 2022

Tim Penyusun



# Daftar Isi

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>1</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>2</b>
<b>Daftar Tabel .....</b>	<b>4</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>6</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>8</b>
1.1 Latar Belakang.....	9
1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran Pekerjaan.....	12
1.2.1 Maksud .....	12
1.2.2 Tujuan .....	12
1.2.3 Sasaran .....	12
1.3 Referensi Hukum.....	13
1.4 Ruang Lingkup.....	13
1.4.1 Ruang Lingkup Kegiatan.....	13
1.4.2 Ruang Lingkup Substansi .....	13
1.5 Sistematika Pelaporan.....	14
<b>BAB 2 PROFIL WILAYAH DAN PROFIL KEPEMUDAAN DI KABUPATEN SUKOHARJO .....</b>	<b>15</b>
2.1 Letak Geografis Dan Administratif .....	16
2.1.1 Penggunaan Lahan .....	17
2.2 Kondisi Kependudukan.....	18
2.2.1 Jumlah dan Persebaran .....	18
2.2.2 Struktur Penduduk.....	19
2.2.3 Kepadatan Penduduk .....	21
2.2.4 Kependudukan Menurut Mata Pencaharian .....	22
2.3 Kondisi Perekonomian Daerah .....	23
2.3.1 Keuangan Daerah.....	23
2.4 Profil IPP Provinsi Jawa Tengah .....	27
<b>BAB 3 TAHAPAN DAN METODE PELAKSANAAN .....</b>	<b>30</b>
3.1 Pemahaman Terkait Kepemudaan.....	31
3.1.1 Potret Pembangunan Kepemudaan di Indonesia .....	31
3.1.2 Kerangka Situasi dan Tantangan Pembangunan Pemuda di Daerah .....	32
3.1.3 Undang – Undang No. 40 Tahun 2009 .....	33
3.1.4 Indeks Pembangunan Pemuda .....	35
3.2 Tahapan dan Metodologi Pelaksanaan .....	36
3.2.1 Tahap Pengumpulan Data .....	37
3.2.2 Metode Penghitungan IPP .....	43

3.2.3 Mekanisme Penghitungan Nilai Indeks .....	46
3.2.4 Tahap Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi.....	48
<b>BAB 4 ANALISIS INDIKATOR PEMBANGUNAN PEMUDA .....</b>	<b>50</b>
4.1 Analisis Kepemudaan.....	51
4.2 Domain Pendidikan.....	53
4.2.1 Nilai Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Partisipasi Kasar.....	53
4.3 Domain Kesehatan dan Kesejahteraan.....	59
4.3.1 Angka kesakitan pemuda.....	59
4.3.2 Persentase pemuda korban kejahatan .....	62
4.3.3 Persentase pemuda yang merokok .....	64
4.3.4 Persentase remaja perempuan yang sedang hamil.....	66
4.4 Domain Ketenagakerjaan dan Kesempatan kerja .....	68
4.4.1 Persentase pemuda bekerja dan berwirausaha .....	68
4.4.2 Skor sub indeks dan Nilai Indeks Domain Ketenagakerjaan dan Kesempatan Kerja.....	72
4.5 Domain Partisipasi dan kepemimpinan.....	72
4.5.1 Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan .....	72
4.5.2 Persentase Pemuda yang Aktif Dalam Kegiatan Organisasi.....	77
4.5.3 Persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat .....	83
4.6 Domain Gender dan Diskriminasi .....	86
4.6.1 Angka perkawinan usia anak.....	86
4.6.2 Persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan menengah dan tinggi .....	88
4.6.3 Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal .....	89
4.6.4 Skor dan Nilai Sub Indeks Domain Gender dan Diskriminasi .....	90
<b>BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....</b>	<b>92</b>
5.1 Kesimpulan.....	93
5.2 Rekomendasi .....	96

## Daftar Tabel

Tabel 2-1	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Sukoharjo .....	16
Tabel 2-2	Luas Penggunaan Lahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 .....	17
Tabel 2-3	Luas Lahan Sawah menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan di Kabupaten Sukoharjo (Ha) Tahun 2020 .....	17
Tabel 2-4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 .....	18
Tabel 2-5	Struktur Penduduk Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 .....	20
Tabel 2-6	Kepadatan Penduduk Kabupaten Sukoharjo Menurut Kecamatan Tahun 2020 .....	21
Tabel 2-7	Banyaknya Pekerja Menurut Jenis Sektor di Kabupaten Sukoharjo .....	22
Tabel 2-8	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah), Tahun 2015–2020 .....	24
Tabel 2-9	Realisasi Belanja Daerah Menurut Jenis Belanja Kabupaten Sukoharjo (ribu rupiah) Tahun 2015 – 2020 .....	26
Tabel 2-10	Realisasi Belanja Menurut Fungsi di Kabupaten Sukoharjo (ribu rupiah) Tahun 2015 – 2020.....	27
Tabel 3-1	Kebutuhan Data .....	38
Tabel 3-2	Penentuan Jumlah Sample Berdasarkan Standar Error Kepercayaan (Issac dan Michael dalam Sugyono, 1998).....	43
Tabel 3-3	Daftar Indikator IPP .....	44
Tabel 3-4	Batas Maksimum dan Minimum Indikator IPP.....	47
Tabel 4-1	Batasan usia pemuda menurut beberapa organisasi .....	51
Tabel 4-2	Gambaran menyeluruh tingkat pendidikan pemuda di Kabupaten Sukoharjo. ....	54
Tabel 4-3	Rata-rata lama sekolah dalam tabel IPM Kabupaten Sukoharjo .....	56
Tabel 4-4	Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Sukoharjo.....	57
Tabel 4-5	Tren Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi 2011 s/d 2014 dan Angka Prediktif Tahun 2021 Kabupaten Sukoharjo .....	57

Tabel 4-6	Nilai Indeks Domain Pendidikan Tahun 2022.....	58
Tabel 4-7	Angka Kesakitan Penduduk Kab. Sukoharjo, 2019 (Penyakit menular) .....	59
Tabel 4-8	Angka Kesakitan penduduk Kab. Sukoharjo, 2019 (Penyakit tidak menular) ..	61
Tabel 4-9	Angka Kesakitan Ditinjau Dari Penyakit Lainnya .....	62
Tabel 4-10	Data persentase pemuda korban kejahatan .....	63
Tabel 4-11	Persentase pemuda merokok menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, Tahun 2020 .....	65
Tabel 4-12	Prosentase Perempuan yang Sedang Hamil .....	66
Tabel 4-13	Data Perkawinan di Kabupaten Sukoharjo Berdasarkan Umur Tahun 2021 ....	67
Tabel 4-14	Nilai Indeks Domain Kesehatan Tahun 2022 .....	68
Tabel 4-15	Penggolongan Pemuda Berdasarkan Pekerjaan di Kabupaten Sukoharjo .....	69
Tabel 4-16	Data Organisasi Kepemudaan Di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 .....	77
Tabel 4-17	Jumlah Organisasi, Klasifikasi dan Jumlah Anggota Karang Taruna di Kabupaten Tahun 2021 .....	80
Tabel 4-18	Data Perkawinan di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan umur tahun 2021 .....	87
Tabel 4-19	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021.....	88
Tabel 4-20	Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 .....	89
Tabel 4-23	Jumlah Tenaga Kerja Perempuan di Lembaga Pemerintah Maupun Swasta Tahun 2020 .....	90
Tabel 5-1	Penilaian Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 ..	94

## Daftar Gambar

Gambar 1-1	Kerangka IPP di Indonesia .....	11
Gambar 2-1	Piramida Penduduk Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020.....	20
Gambar 2-2	Perkembangan Nilai IPP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2018.....	28
Gambar 2-3	Grafik Perbandingan Nilai IPP Provinsi Jawa Tengah Terhadap IPP Nasional..	28
Gambar 3-1	Alur Kerangka Metodologi Pekerjaan.....	37
Gambar 3-2	Teknik Sampling (Sugyono, 1998) .....	40
Gambar 3-3	Proses Tahapan Identifikasi Populasi, Sample dan Proses Sampling .....	41
Gambar 3-4	Tahap Identifikasi Sirkumstansi di Lapangan dan Rasionalisasi Jumlah Sample Serta Proses Sampling.....	41
Gambar 3-5	Proses Penetapan Sampling Secara Cluster (Area Sampling).....	42
Gambar 3-6	Penentuan Jumlah Sample Berdasarkan Standar Error Kepercayaan (Issac dan Michael dalam Sugyono, 1998).....	42
Gambar 3-7	Alur Penghitungan Nilai IPP .....	46
Gambar 4-1	Grafik perbandingan tingkat pendidikan pemuda dan pemudi di setiap jenjang pendidikan .....	56
Gambar 4-2	Prosentase Remaja Merokok di Kabupaten Sukoharjo Berdasarkan Hasil Kuesioner Tahun 2022 .....	64
Gambar 4-3	Grafik Pemuda berdasarkan status pekerjaan tahun 2020 .....	71
Gambar 4-4	Profil Anggota OKP Berdasarkan Jenis Kelamin.....	73
Gambar 4-5	Tingkat Pendidikan Anggota OKP.....	73
Gambar 4-6	Profil Jenis Pekerjaan Anggota OKP .....	74
Gambar 4-7	Rata-rata Lama Berorganisasi Anggota OKP.....	74
Gambar 4-8	Tingkatan Organisasi Pemuda .....	75
Gambar 4-9	Antusiasme dan Kemudahan Berorganisasi .....	76
Gambar 4-10	Keterlibatan Aktif Pemuda Dalam Kegiatan Sosial Kemasyarakatan .....	77
Gambar 4-11	Prosedur keterlibatan pemuda dalam Musyawarah/dengar pendapat .....	84
Gambar 4-12	Dinamika Kedudukan Pemuda dalam Musyawarah Pembangunan .....	84

Gambar 4-13	Jumlah Pemuda yang Memberikan Saran/Pendapat .....	85
Gambar 4-14	Faktor Pernikahan Dini Menurut Hasil Survei .....	87
Gambar 5-1	Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022.....	96



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO  
**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
Jl. Gedung Menara Wijaya Lt. 7 Jalan Jend. Sudirman No. 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521

1

JASA KONSULTANSI

# BAB PENELITIAN - PENGUKURAN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA (IPP)

## Pendahuluan

KABUPATEN SUKOHARJO

LAPORAN AKHIR

*Bagian ini berisi tentang pendahuluan dari buku laporan ini yang memuat latar belakang pelaksanaan pekerjaan, maksud, tujuan dan sasaran penyusunan pekerjaan, lingkup kegiatan, serta sistematika pelaporan.*



## 1.1 LATAR BELAKANG

Dalam sejarah peradaban bangsa, pemuda adalah aset bangsa yang sangat mahal dan tidak ternilai harganya. Pemuda adalah tonggak bagi kemajuan dan pembangunan bangsa. Generasi muda menjadi komponen penting yang perlu dilibatkan dalam pembangunan sebuah bangsa. Hal ini dikarenakan generasi muda memiliki fisik yang kuat, pengetahuan yang baru, inovatif dan juga memiliki tingkat kreatifitas yang tinggi. Tanpa adanya peran pemuda sebuah bangsa akan sulit mengalami perubahan.

Peran pemuda yang pertama dapat dilihat dari peran pemuda sebagai agen perubahan. Hal ini dapat diwujudkan dengan pemuda ikut mendukung perubahan-perubahan dalam lingkungan masyarakat, baik secara nasional maupun daerah, menuju kepada arah yang lebih baik lagi pada masa yang akan datang. Kemajuan bangsa dapat dilihat dari keberhasilan generasi mudanya untuk melakukan perubahan-perubahan positif yang dapat dilakukan dan menaklukkan segala tantangan yang akan dihadapi.

Selain menjadi agen perubahan, peran pemuda juga sebagai agen pembangunan yang mana pemuda Indonesia memiliki peran dan tanggung jawab dalam upaya melancarkan atau melaksanakan berbagai macam pembangunan di berbagai macam bidang, baik pembangunan secara nasional maupun pembangunan daerah.

Agen pembangunan disini bukan hanya sebatas pembangunan secara fisik maupun non fisik, tetapi juga menyangkut juga kemampuan pengembangan potensi generasi muda lainnya. Potensi dan produktifitas yang ada di diri para generasi muda perlu dikembangkan demi mencapai tujuan pembangunan bangsa Indonesia.

Peran yang selanjutnya adalah menjadi agen pembaharuan bangsa Indonesia. Artinya pemuda Indonesia harus memiliki kemampuan dalam menganalisis perubahan zaman sehingga mereka dapat memilih mana yang memang perlu untuk dirubah dan juga mana yang seharusnya dipertahankan.

Begitu besarnya peranan pemuda dalam melakukan perubahan dan pembaharuan sejalan dengan jargon Presiden Soekarno untuk membangkitkan semangat para pemuda yaitu "*Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya, beri aku 10 pemuda niscaya akan kuguncang dunia*".

Diproyeksikan bahwa pada tahun 2030 s/d 2040, Indonesia akan menikmati bonus demografi, dimana kondisi jumlah penduduk usia produktif (berusia 15-64 tahun) lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif (berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Pada periode 2030-2040, penduduk usia produktif diprediksi mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk yang diproyeksikan sebesar 297 juta jiwa.

Kabupaten Sukoharjo adalah sebuah kabupaten yang terletak di antara Kota Surakarta di sebelah utara, Kabupaten Wonogiri di sebelah selatan, Kabupaten Karanganyar di sebelah timur serta Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali di sebelah barat. Sebagai kota satelit dari Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo terdiri dari 12 Kecamatan, yang

terbagi dalam 150 Desa dan 17 Kalurahan, dengan jumlah penduduk pada Tahun 2020 sebanyak 911.966 jiwa.

Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan relatif imbang pada masing-masing kecamatan. Dengan total jumlah 911.603 jiwa penduduk di Kabupaten Sukoharjo, yang berjenis kelamin laki-laki adalah sebesar 456.063 jiwa atau 50,03 % dan perempuan 455.540 jiwa atau 49,97 %.

Sebagian dari jumlah penduduk di Kabupaten Sukoharjo adalah generasi muda usia 16 tahun – 30 tahun, dimana persentase usia pemuda kira-kira mencapai 23 % dari jumlah penduduk di Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, dalam hal ini batasan usia pemuda adalah penduduk usia 16 tahun sampai dengan 30 tahun.

Dalam penyelenggaraan layanan kepemudaan yang menjadi bagian dari pembangunan, peran pemuda menjadi sangat penting. Pemuda tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat dari suatu pembangunan, tetapi juga sebagai pengendali dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang akan berpengaruh bagi Indonesia yang damai, negara yang menjadi tempat mereka tinggal, akan mereka warisi dan akan mereka pimpin. Untuk itu, upaya-upaya telah dan akan dilakukan untuk memastikan keterwakilan pemuda dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi pembangunan.

Pembangunan pemuda merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun SDM yang berkualitas dan berdaya saing serta berperan penting untuk memetik bonus demografi. Keberhasilan pembangunan pemuda dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dan telah menjadi indikator didalam RPJMN 2020-2024.

Pada tahun 2018, Pemerintah Pusat telah meluncurkan Laporan IPP 2017 yang kemudian diperbaharui dengan Laporan IPP 2019. Laporan ini disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan dukungan United Nations Population Fund (UNFPA).

Sejak tahun 2015, IPP Nasional menunjukkan adanya peningkatan angka IPP dari 48,67 pada tahun 2015 menjadi 51,50 pada tahun 2018, pada 2019 sebesar 52,61 dan mengalami penurunan menjadi 51,00 di tahun 2020. Hal ini ditengarai bahwa pada tahun 2020, kondisi IPP mengalami penurunan saat terjadinya pandemi Covid-19.

Perumusan dokumen IPP harus memperhatikan adanya beberapa penyesuaian rumusan penghitungan indikator terkait SDGs dengan menggunakan metadata global, yaitu pada indikator Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi dan Perkawinan Usia Anak. IPP disusun berdasarkan tiga lapisan domain pembangunan pemuda yang menjadi ruang lingkup IPP, yaitu pembangunan individu, pembangunan kehidupan dan kesejahteraan, serta partisipasi dan diskriminasi terhadap pemuda di berbagai bidang

(Gambar 1). Melalui tiga lapisan ini, IPP menangkap aspek lintas bidang dari pembangunan pemuda dan mengakomodasi peran pemuda sebagai objek dan subjek pembangunan.



**Gambar 1-1 Kerangka IPP di Indonesia**

*Sumber : Dokumen IPP Kementerian Bappenas, 2019*

Dengan adanya pemahaman bahwa kuantifikasi melalui mekanisme indeks, diperlukan sebagai landasan terukur bagi perencanaan pembangunan pemuda, maka Pemerintah Daerah memerlukan upaya ratifikasi untuk menyusun Indeks IPP di daerahnya masing-masing. Oleh karenanya, sebagai bagian dari komitmen dalam mendukung pembangunan Pemuda, pangarusutamaan pembangunan Pemuda dalam kerangka SDG's, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berinisiatif untuk menyusun dokumen Indeks Pembangunan Pemuda di Kabupaten Sukoharjo.

Lebih lanjut, sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Sukoharjo yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukoharjo melalui salah satu bidangnya mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang kepemudaan melalui tugas utama layanan bidang kepemudaan, dimana IPP menjadi salah satu poin penting.

Indeks Pembangunan Pemuda memuat capaian 15 indikator pembangunan kepemudaan yang dituangkan dalam lima domain, yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, kesempatan dan lapangan kerja, kepemimpinan dan partisipasi, serta gender dan diskriminasi. Masing-masing dari 5 domain tersebut selanjutnya akan diukur

berdasarkan perhitungan ambang batas minimum hingga persentase ambang batas yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Bappenas sebagai acuan bagi daerah.

## 1.2 MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN PEKERJAAN

### 1.2.1 Maksud

Ditinjau dari penjabaran di atas, maksud dari penyusunan dokumen IPP ini adalah untuk melakukan pendataan terhadap 5 domain dan 15 indikator penyusun IPP yang selanjutnya dituangkan dalam penghitungan indeks IPP Kabupaten Sukoharjo tahun 2022 dengan berbasis pada baseline atau data tahun 2021.

### 1.2.2 Tujuan

Tujuan dari Pekerjaan penyusunan dokumen IPP Kabupaten Sukoharjo adalah **menentukan** nilai indeks IPP Kabupaten Sukoharjo ditinjau dari capaian 15 indikator pembangunan kepemudaan yang tercakup dalam lima domain, diantaranya:

1. Domain pendidikan
2. Domain kesehatan dan kesejahteraan
3. Domain kesempatan dan lapangan kerja
4. Domain kepemimpinan dan partisipasi, dan
5. Domain gender dan diskriminasi.

### 1.2.3 Sasaran

Adapun sasaran-sasaran penyusunan kegiatan ini mengacu pada 5 domain dan 15 indikator penyusun IPP :

1. **Diketuainya indikator pembangunan pemuda dari segi pendidikan:**
  - a. Rata-rata lama sekolah pemuda;
  - b. APK sekolah menengah;
  - c. APK perguruan tinggi.
2. **Diketuainya indikator pembangunan pemuda dari Domain Kesehatan dan Kesejahteraan:**
  - a. Angka kesakitan pemuda;
  - b. Persentase pemuda korban kejahatan;
  - c. Persentase pemuda yang merokok;
  - d. Persentase remaja perempuan yang sedang hamil.
3. **Diketuainya indikator pembangunan pemuda dari Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja:**
  - a. Persentase pemuda wirausaha kerah putih;
  - b. TPT pemuda.
4. **Diketuainya indikator pembangunan pemuda dari Domain Partisipasi dan Kepemimpinan:**
  - a. Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan;

- b. Persentase pemuda yang aktif dalam kegiatan organisasi;
- c. Persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat.

**5. Diketuainya indikator pembangunan pemuda dari Domain Gender dan Diskriminasi:**

- a. Angka perkawinan usia anak;
- b. Persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas;
- c. Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal.

### 1.3 REFERENSI HUKUM

Dasar hukum dalam Penyusunan Indeks Pembangunan Pemuda di Kabupaten Sukoharjo ini meliputi:

1. Undang-undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. PP No. 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

### 1.4 RUANG LINGKUP

#### 1.4.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Secara spasial, ruang lingkup wilayah Penyusunan Dokumen IPP Kabupaten Sukoharjo adalah wilayah administrasi Kabupaten Sukoharjo.

#### 1.4.2 Ruang Lingkup Substansi

Ruang lingkup substansi dari Pekerjaan penyusunan IPP Kabupaten Sukoharjo adalah, sebagai berikut:

1. Menginventarisasi data sekunder pendukung kajian penyusunan IPP Kabupaten Sukoharjo;
2. Menginventarisasi data primer, meliputi data kondisi empiris wilayah, kondisi sosial ekonomi, kondisi geografis dan keorganisasian kepemudaan;
3. Melakukan analisis terhadap 5 domain dan 15 indikator indeks pembangunan pemuda
4. Melakukan penghitungan skor nilai indeks masing-masing domain ;
5. Merumuskan nilai IPP Kabupaten Sukoharjo tahun 2022.

## 1.5 SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika pelaporan pada tahap Laporan Akhir ini adalah sebagai berikut:

- BAB 1 : Pendahuluan  
Bagian ini berisi tentang pendahuluan dari buku laporan ini yang memuat latar belakang pelaksanaan pekerjaan, maksud, tujuan dan sasaran penyusunan pekerjaan, lingkup kegiatan, serta sistematika pelaporan.
- BAB 2 : Profil Wilayah dan profil Kepemudaaan di Kabupaten Sukoharjo  
Bagian ini berisi mengenai profil secara umum wilayah Kabupaten Sukoharjo.
- BAB 3 : Tahapan dan Metode Pelaksanaan  
Bagian ini berisi pemahaman terkait kepemudaan, tahapan dan metode pelaksanaan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Tahapan tersebut meliputi: tahap persiapan, tahap pengumpulan data, analisis data dan sistem diskusi.
- BAB 4 : Analisis Indikator Pembangunan Pemuda  
Bagian ini berisi penilaian indikator Pembangunan Pemuda.
- BAB 5 : Kesimpulan dan Rekomendasi  
Bagian ini berisi Kesimpulan dan Rekomendasi terkait dengan Skor subindeks, Nilai Domain dan Nilai IPP Keseliuruhan Kabupaten Sukoharjo tahun 2022.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO  
**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
Jl. Gedung Menara Wijaya Lt. 7 Jalan Jend. Sudirman No. 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521

JASA KONSULTANSI

**2**

## **BAB** PENELITIAN - PENGUKURAN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA (IPP)

### Profil

KABUPATEN SUKOHARJO

LAPORAN AKHIR

# Kabupaten Sukoharjo

*Bagian ini berisi mengenai profil secara umum wilayah Kabupaten Sukoharjo.*



## 2.1 LETAK GEOGRAFIS DAN ADMINISTRATIF

Secara geografis, Kabupaten Sukoharjo terletak pada 110° 57' 33,70" - 110° 42' 6,79" BT dan 7° 32' 17.00" - 7° 49' 32.00" LS. Sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah, Kabupaten Sukoharjo terletak diantara 6 (enam) Kabupaten/Kota, yang berbatasan langsung secara administratif sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar
2. Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Gunung Kidul (DIY) dan Kabupaten Wonogiri
4. Sebelah Barat : Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten

Secara administrasi, Kabupaten Sukoharjo memiliki luas wilayah 46.666 Ha (menurut BPS) dan atau seluas 49.323 Ha (menurut Perda No. 1 Tahun 2018). Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Polokarto yaitu 6.218 Ha (13% dari luas Kabupaten) dan Kecamatan yang paling kecil adalah Kecamatan Kartasura dengan luas 1.923 Ha (4% dari luas Kabupaten).

Kecamatan Weru	: 4.198 Ha	Kecamatan Bulu	: 4.386 Ha
Kecamatan Tawang Sari	: 3.998 Ha	Kecamatan Sukoharjo	: 4.458 Ha
Kecamatan Nguter	: 5.88 Ha	Kecamatan Bendo	: 5.299 Ha
		Sari	
Kecamatan Polokarto	: 6.218 Ha	Kecamatan Mojolaban	: 6.554 Ha
Kecamatan Grogol	: 3.000 Ha	Kecamatan Baki	: 2.197 Ha
Kecamatan Gatak	: 1.947 Ha	Kecamatan Kartasura	: 1.923 Ha

Kabupaten Sukoharjo terbagi dalam 12 Kecamatan, 150 Desa dan 17 Kelurahan, 463 Dukuh, 1.473 Rukun Warga (RW) dan 4.684 Rukun Tetangga (RT).

**Tabel 2-1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Sukoharjo**

Kecamatan	Banyaknya				
	Desa	Kelurahan	Dukuh	RT	RW
Weru	13	0	48	397	137
Bulu	12	0	43	245	104
Tawang Sari	12	0	38	320	115
Sukoharjo	0	14	0	467	145
Nguter	16	0	55	352	122
Bendosari	13	1	51	324	110
Polokarto	17	0	53	378	124
Mojolaban	15	0	53	541	160
Grogol	14	0	39	658	146
Baki	14	0	35	369	111
Gatak	14	0	32	262	92
Kartasura	10	2	31	441	116

Sumber: Sukoharjo Dalam Angka, 2022

### 2.1.1 Penggunaan Lahan

Menurut penggunaan lahan, wilayah Kabupaten Sukoharjo terdiri dari lahan sawah sebesar 44,18% (20.460 Ha) dan lahan bukan sawah sebesar 55,82 % (26.206 Ha). Dari lahan sawah yang mempunyai pengairan teknis seluas 14.469 ha (71,08%), irigasi setengah teknis 2.241 ha (10,47%), irigasi sederhana 1.875 ha (9,54%) dan tadah hujan seluas 1.876 ha (8,89%). Lahan bukan sawah terdiri dari tanah kering 25.108 Ha (95,87 %), hutan negara 390 Ha (1,49 %) serta perkebunan negara 708 Ha (2,64 %).

Adapun wilayah kecamatan dengan perbandingan luas lahan sawah lebih besar dibandingkan dengan luas lahan kering terdapat di Kecamatan Sukoharjo, Mojolaban, Baki dan Gatak. Untuk kecamatan lainnya, penggunaan lahan kering lebih dominan dibandingkan dengan penggunaan lahan sawah.

**Tabel 2-2 Luas Penggunaan Lahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020**

Kecamatan	Lahan Sawah (Ha)	Lahan Bukan Sawah			Jumlah
		Tanah Kering	Hutan Negara	Perkebunan	
Weru	1.980	2.218	0	0	4.198
Bulu	1.131	2.877	378	0	4.386
Tawang Sari	1.672	2.314	12	0	3.998
Sukoharjo	2.363	2.095	0	0	4.458
Nguter	2.418	3.070	0	0	5.488
Bendosari	2.528	2.771	0	0	5.299
Polokarto	2.446	3.062	0	708	6.218
Mojolaban	2.161	1.393	0	0	3.554
Grogol	934	2.066	0	0	3.000
Baki	1.199	998	0	0	2.197
Gatak	1.189	758	0	0	1.947
Kartasura	439	1.484	0	0	1.923
Jumlah	20.460	25.108	390	708	46.666
2020	20.460	25.108	390	708	46.666
2019	20.465	25.818	390	708	46.666

Sumber: Sukoharjo Dalam Angka, 2021

Wilayah kecamatan dengan luas lahan sawah terbesar berada di Kecamatan Bendosari dengan luas 2.528 Ha, sedangkan luas lahan sawah terkecil terletak di Kecamatan Kartasura dengan luas 471 Ha.

**Tabel 2-3 Luas Lahan Sawah menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan di Kabupaten Sukoharjo (Ha) Tahun 2020**

Kecamatan	Lahan Sawah (Ha)	Lahan Sawah Menurut Pengairannya			
		Irigasi Teknis	Irigasi Setengah Teknis	Irigasi Sederhana	Tadah Hujan
Weru	1.980	1.082	20	511	376

Kecamatan	Lahan Sawah (Ha)	Lahan Sawah Menurut Pengairannya			
		Irigasi Teknis	Irigasi Setengah Teknis	Irigasi Sederhana	Tadah Hujan
Bulu	1.131	587	125	8	411
Tawang Sari	1.672	1.482	0	165	25
Sukoharjo	2.363	2.273	0	0	0
Nguter	2.418	1.329	26	665	398
Bendosari	2.528	1.198	931	0	399
Polokarto	2.446	1.172	754	340	180
Mojolaban	2.161	2.161	0	0	0
Grogol	934	395	266	273	0
Baki	1.199	1.199	0	0	0
Gatak	1.189	1.189	0	0	0
Kartasura	439	439	0	0	0
Jumlah	20.460	14.506	2122	1962	1789
2020	20.460	14.506	2122	1962	1789
2019	20.465	14.469	2241	1875	1876

Sumber: Sukoharjo Dalam Angka, 2021

## 2.2 KONDISI KEPENDUDUKAN

### 2.2.1 Jumlah dan Persebaran

Jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo tahun 2020 tercatat sebanyak 891,912 jiwa yang terdiri dari 441,782 laki-laki dan 450,130 perempuan. Apabila dilihat dari penyebaran penduduk, Kecamatan Grogol paling tinggi yaitu 141,407 jiwa atau sekitar 15.85% dari total jumlah penduduk keseluruhan, kemudian Kecamatan Kartasura 132,387 Jiwa atau 14.84%, Kecamatan Sukoharjo 91,251 jiwa sedangkan yang terkecil Kecamatan Bulu 27,575 Jiwa. Rasio Jenis Kelamin pada tahun 2020 sebesar 98.92 yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 98 penduduk laki-laki atau dapat dibulatkan menjadi 99 laki-laki, hampir di semua kecamatan angka rasio jenis kelamin di bawah 100, yaitu berkisar 96 dan 98, kecuali Kecamatan Bulu dengan sex ratio 105,39 dan Kecamatan Tawang Sari sebesar 100,02.

**Tabel 2-4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020**

Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase	Sex Rasio
	Laki-laki	Perempuan			
Weru	24,274	25,209	49,483	5.55%	96.29
Bulu	14,144	13,431	27,575	3.09%	105.39
Tawang Sari	23,951	23,946	47,897	5.37%	100.02
Sukoharjo	44,820	46,431	91,251	10.23%	96.53
Nguter	20,708	21,103	41,811	4.69%	98.13

Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase	Sex Rasio
	Laki-laki	Perempuan			
Bendosari	25,799	26,543	52,342	5.87%	97.2
Polokarto	37,572	38,152	75,724	8.49%	98.48
Mojolaban	48,474	48,989	97,463	11.28%	98.95
Grogol	70,089	71,318	141,407	15.85%	98.28
Baki	42,248	43,029	85,277	9.56%	98.18
Gatak	24,385	24,910	49,295	5.53%	97.89
Kartasura	65,318	67,069	132,387	14.84%	97.4
Jumlah	441,782	450,130	891,912	100%	98.92
2020	441,782	450,130	891,912	100	98.92
2019	438,527	446,678	885,205	100	98.18

Sumber: Sukoharjo Dalam Angka, 2021

Berdasarkan Tabel 2-4 dapat dijabarkan bahwa untuk jumlah penduduk di Kabupaten Sukoharjo untuk jenis kelamin perempuan paling banyak tersebar di Kecamatan Grogol yaitu 71,318 jiwa dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Bulu yaitu 13.431 jiwa. Untuk jenis kelamin laki-laki paling banyak terdapat di Kecamatan Grogol yaitu 70,089 jiwa dan yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Bulu yaitu 14,144 jiwa.

### 2.2.2 Struktur Penduduk

Karakteristik penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat melalui Piramida Penduduk menurut Kelompok Umur tersebut yang terbagi menjadi rentang usia belum produktif (<14 Tahun), usia produktif (15-64 Tahun), dan usia tidak produktif (>64 tahun). Sehingga dapat dihitung besaran angka tingkat ketergantungan penduduk (*burdance dependency ratio*). Tingkat ketergantungan (BDR) ini merupakan indikator besarnya tanggungan penduduk usia produktif (15–64 tahun) terhadap usia belum produktif (0–14 tahun) dan usia tidak produktif (>64 tahun).

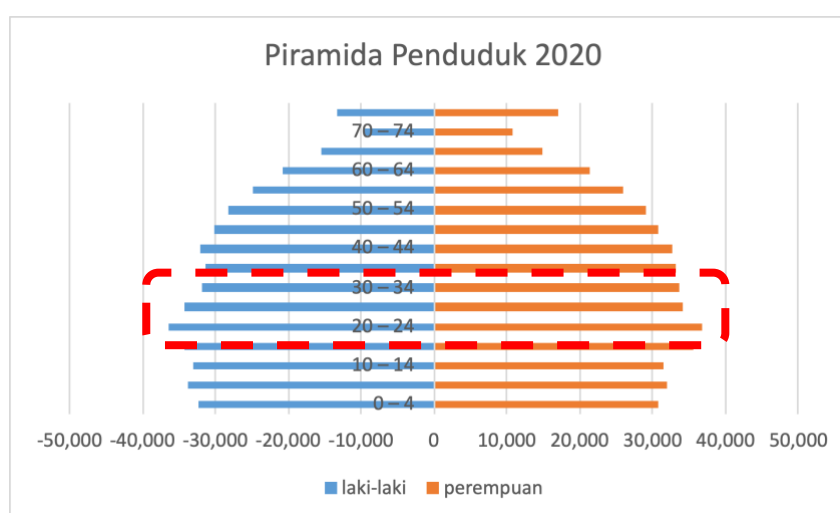
Penduduk kelompok usia produktif (usia 15 – 59 tahun) di Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 2020 berjumlah **575,604** jiwa (64.5 % dari total jumlah penduduk). Usia produktif di wilayah Kabupaten Sukoharjo didominasi oleh kaum perempuan, yaitu sejumlah **292,059** jiwa (50,84 % dari jumlah penduduk usia produktif). Untuk penduduk kelompok usia belum produktif (usia di bawah 15 tahun) pada Tahun 2020 terdapat sejumlah **193,094** jiwa (atau 21.6 % dari jumlah penduduk), sementara usia di atas 59 tahun yang merupakan usia yang sudah tidak produktif berjumlah **123,253** jiwa (hanya 13,8 % dari jumlah penduduk).

Jumlah penduduk terbanyak berada pada kelompok umur 20 – 24 tahun sejumlah 73,181 jiwa (8,2 % dari jumlah penduduk). Untuk jumlah penduduk paling sedikit adalah kelompok usia 70 – 74 tahun, yaitu sejumlah 20,344 tahun (2,3 % dari jumlah penduduk).

**Tabel 2-5 Struktur Penduduk Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020**

Kelompok Umur	Jenis kelamin		Jumlah	Persentase
	Laki-laki	Perempuan		
0 – 4	32.253	30.739	62.992	7,1%
5 – 9	33.660	31.980	65.640	7,4%
10 – 14	33.071	31.391	64.462	7,2%
Σ Usia Blm Produktif	98.984	94.110	193.094	21,6%
15 – 19	34.322	35.508	69.830	7,8%
20 – 24	36.523	36.658	73.181	8,2%
25 – 29	34.315	34.212	68.527	7,7%
30 – 34	31.762	33.684	65.446	7,3%
35 – 39	31.262	33.280	64.542	7,2%
40 – 44	32.122	32.646	64.768	7,3%
45 – 49	30.047	30.870	60.917	6,8%
50 – 54	28.291	29.153	57.444	6,4%
55 – 59	24.901	26.048	50.949	5,7%
Σ Usia Produktif	283.545	292.059	575.604	64,5%
60 – 64	20.787	21.368	42.155	4,7%
65 – 69	15.549	14.829	30.378	3,4%
70 – 74	9.622	10.722	20.344	2,3%
75 +	13.295	17.081	30.376	3,4%
Σ Usia tdk Produktif	59.253	64.000	123.253	13,8%
Jumlah	441.782	450.169	891.951	100%

Sumber: Sukoharjo Dalam Angka, 2021



**Gambar 2-1 Piramida Penduduk Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020**

Sumber: Tim Penyusun, 2021

Berdasarkan ilustrasi di atas, diketahui bahwa piramida penduduk Kabupaten Sukoharjo merupakan ekspansif dengan kecenderungan usia produktif dominan antara 20 hingga 24 tahun. Dengan kondisi tersebut maka kemungkinan penambahan usia produktif di Sukoharjo dalam beberapa tahun mendatang masih tetap ada memiliki tren yang serupa.

### 2.2.3 Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk dalam kurun waktu delapan tahun (2016-2020) cenderung mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Pada tahun 2020 tercatat sebesar 1,911 dimana sebelumnya pada tahun 2018 terdapat 1.897 jiwa setiap km<sup>2</sup>. Di sisi lain penyebaran penduduk masih belum merata. Kartasura merupakan kecamatan dengan penduduk paling padat yaitu 6,884 jiwa per km<sup>2</sup>. Sedangkan Kecamatan Bulu paling jarang kepadatan penduduknya yaitu 629 jiwa per km<sup>2</sup>.

Pada peta berikut akan ditampilkan sebaran kepadatan penduduk menurut geografis Kabupaten Sukoharjo. Adapun penggambaran kepadatan penduduk dalam sebuah peta mengacu pada SNI 03-1733-2004 Tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan untuk mengklasifikasikan notasi kepadatan penduduk dalam sebuah Peta, yaitu kawasan Rendah, Sedang dan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kepadatan Rendah = <1000 Jiwa/Km
2. Kepadatan Sedang = 1000-2000 Jiwa/Km,
3. Kepadatan Tinggi = >2000 Jiwa/Km

Selanjutnya mengenai kepadatan penduduknya, pada Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2020 tingkat kepadatan penduduk dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2-6 Kepadatan Penduduk Kabupaten Sukoharjo Menurut Kecamatan Tahun 2020**

Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Banyaknya Penduduk	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
Weru	41,98	49.483	1.179
Bulu	43,86	27.575	629
Tawang Sari	39,98	47.897	1.198
Sukoharjo	44,58	91.251	2.047
Nguter	54,88	41.811	762
Bendosari	52,99	52.342	988
Polokarto	62,18	75.724	1.218
Mojolaban	35,54	97.463	2.742
Grogol	30	141.407	4.714
Baki	21,97	85.277	3.882
Gatak	19,47	49.295	2.532
Kartasura	19,23	132.387	6.884
2020	466,66	891.912	1.911

Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Banyaknya Penduduk	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
2019	466,66	885.205	1.897
2018	466,66	885.205	1.897
2017	466,66	878.374	1.883
2016	466,66	871.397	1.867
2015	466,66	875.917	1.877
2014	466,66	869.481	1.863
2013	466,66	863.693	1.851
2012	466,66	857.421	1.837
2011	466,66	851.157	1.824
2010	466,66	846.978	1.815
2009	466,66	843.127	1.807

Sumber: Sukoharjo Dalam Angka, 2021

#### 2.2.4 Kependudukan Menurut Mata Pencapaian

Sektor ekonomi yang paling diminati oleh penduduk Kabupaten Sukoharjo adalah “industri pengolahan”. Jenis sektor ini menduduki 45,80 % dari 47920 jumlah pekerja. Di tahun 2019, terjadi lonjakan yang cukup signifikan terhadap jumlah pekerja, dibandingkan pada 5 tahun terakhir. Di wilayah Kabupaten Sukoharjo, sektor “Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan” sangat tidak diminati sebagai mata pencaharian penduduk setempat. Terlihat dari data yang ada, hanya 1,25 % dari jumlah pekerja yang berkecimpung di sektor ini.

**Tabel 2-7 Banyaknya Pekerja Menurut Jenis Sektor di Kabupaten Sukoharjo**

Jenis Sektor	Jumlah Tahun (jiwa)							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	299	299	299	299	299	573	1,307	1,307
Pertumbuhan dan Penggalian	-	-	-	-	-	-	-	0
Industri Pengolahan	59,804	61,566	63,081	62,734	62,540	68,313	47,920	47920
Listrik, Gas dan Air	187	184	192	191	605	1,118	1,537	1537
Konstruksi	587	587	663	784	792	2,169	1,806	1806
Perdagangan Besar, Eceran dan Rumah Tangga	4,291	4,700	5,496	5,858	5,997	14,685	19,995	19995
Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	1,062	1,062	1,061	1,061	1,049	2,687	1,650	1650
Lembaga Keuangan, Real Estate Usaha	2,953	3,042	3,267	3,321	1,285	5,324	6,833	6833

Jenis Sektor	Jumlah Tahun (jiwa)							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Persewaan dan Jasa								
Jasa Kemasyarakatan Sosial	3,162	3,325	4,933	5,295	5,568	13,907	23,585	23585
Kegiatan yang belum jelas batasnya	-	-	-	-	-	-		0
Jumlah	72,345	74,765	78,992	79,543	78,135	108,776	104,633	104,633
*) Data terbaru tahun 2020								

Sumber: Sukoharjo Dalam Angka, 2021

## 2.3 KONDISI PEREKONOMIAN DAERAH

### 2.3.1 Keuangan Daerah

Realisasi pendapatan pemerintah daerah kabupaten Sukoharjo pada tahun anggaran 2019 terhimpun sebesar 2,06 trilyun rupiah atau sama dengan tahun sebelumnya di 2018. Begitupun dengan realisasi dana perimbangan tahun anggaran 2019 adalah sebesar 1,219 triyun rupiah, atau sama dengan tahun sebelumnya. Sementara itu realisasi belanja daerah untuk tahun anggaran 2019 adalah sebesar 2,05 trilyun rupiah atau naik sebesar 8,61 persen dibanding realisasi belanja daerah tahun anggaran 2017.

**Tabel 2-8 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah), Tahun 2015–2020**

No.	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pendapatan Asli Daerah	192.971.720	264.814.413	313.947.492	363.163.428	464.567.410	433.458.481	433.458.481
1.1	Pajak Daerah	102.524.770	116.089.421	137.043.704	182.010.506	221.901.158	235.894.523	235.894.523
1.2	Retribusi Daerah	21.834.054	30.503.593	27.714.084	23.447.335	22.340.481	23.045.709	23.045.709
1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.357.189	5.594.654	9.361.022	11.388.912	15.495.304	20.894.445	20.894.445
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	60.255.707	112.626.744	139.828.682	146.316.676	204.830.467	153.650.824	153.650.824
2	Dana Perimbangan	844.525.645	907.271.953	944.640.593	1.246.954.770	1.217.877.694	1.219.811.099	1.219.811.099
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak	27.938.065	23.475.992	21.411.267	0	33.128.117	26.507.198	26.507.198
2.2	Dana Alokasi Umum	763.462.900	826.891.481	854.457.636	959.910.211	906.416.629	906.416.629	906.416.629
2.3	Dana Alokasi Khusus	53.124.680	56.904.480	68.771.690	287.044.558	278.332.947	286.887.272	286.887.272
3	Lain Pendapatan yang Sah	328.143.812	398.658.659	525.518.280	321.778.378	373.125.930	402.221.384	402.221.384
3.1	Pendapatan Hibah	2.018.827	1.912.815	4.804.656	9.989.000	10.028.345	75.882.027	75.882.027
3.2	Dana Darurat	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	86.359.097	109.882.656	129.241.052	109.901.181	152.241.845	152.732.311	152.732.311
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	180.694.171	206.958.151	332.176.067	96.619.355	123.576.433	126.076.256	126.076.256

3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	59.071.717	79.905.036	59.296.504	67.292.434	31.934.458	11.780.790	11.780.790
3.6	Lainnya	0	0	0	37.976.407	55.344.850	35.750.000	35.750.000
Jumlah		1.365.641.177	1.570.745.025	1.784.106.364	1.931.896.576	2.055.571.034	2.055.517.964	2.055.517.964

*Sumber: Sukoharjo Dalam Angka, 2020*

Realisasi belanja daerah untuk tahun anggaran 2019 sebesar 1,17 triliun rupiah atau naik sebesar 14,95 persen dibanding realisasi belanja daerah dibandingkan dengan tahun anggaran 2015.

**Tabel 2-9 Realisasi Belanja Daerah Menurut Jenis Belanja Kabupaten Sukoharjo (ribu rupiah) Tahun 2015 – 2020**

Jenis Belanja	Tahun Anggaran				
	2015	2016	2017	2018	2019
Belanja tdk Langsung	1,039,776,352	1,183,757,403	1,149,793,283	1,175,739,592	1,175,739,592
Belanja Pegawai	871,502,981	902,690,059	801,795,143	816,026,582	816,026,582
Belanja Bunga	13,805	2,779	0		-
Belanja Subsidi	0	0	0		-
Belanja Hibah	33,123,854	30,310,745	25,907,256	33,963,567	33,963,567
Belanja Bantuan Sosial	19,474,373	21,080,500	15,577,000	16,245,000	16,245,000
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0	12,653,337	12,221,647	32,211,620	32,211,620
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pem. Desa	115,525,790	216,803,108	293,758,628	277,109,988	277,109,988
Belanja tidak Terduga	135,550	216,875	533,609	182,835	182,835
Belanja Langsung	595,525,915	696,103,482	737,710,002	874,423,313	874,422,313
Belanja Pegawai	99,631,966	108,520,098	38,710,002	40,916,479	40,916,479
Belanja Barang dan Jasa	229,945,433	259,971,925	448,191,857	445,037,516	445,037,516
Belanja Modal	265,948,515	327,611,459	250,940,426	445,037,516	388,468,318
Jumlah	1,635,302,267	1,879,860,885	1,887,503,285	20,505,161,905	4,100,323,810

Sumber: Sukoharjo Dalam Angka, 2020

Realisasi belanja pada tahun 2019 mengalami perubahan komposisi dibandingkan situasi pada tahun 2016. Sebelumnya, jenis belanja "Pendidikan" selalu menduduki peringkat teratas di dalam belanja daerah, yaitu rata-rata 35,97% dari seluruh realisasi belanja. Untuk Tahun 2017, belanja "Pendidikan" mencapai 679 milyar rupiah, kondisi ini berkurang 35,35 milyar rupiah dibanding tahun sebelumnya (-6,67%). Realisasi belanja lainnya yang cukup tinggi adalah belanja untuk "Pelayanan Umum" sebesar 556,96 milyar rupiah serta "Kesehatan" 274,59 milyar rupiah. Hal ini mengalami perubahan pada tahun anggaran 2019, dimana Realisasi belanja pelayanan umum memiliki proporsi yang paling besar yaitu sebesar Rp. 695,042,746 dan belanja

pendidikan mengikuti di urutan kedua sebesar Rp. 672,398,323. Sedangkan jenis belanja yang paling kecil adalah Pariwisata dan kebudayaan sebesar 4,992,831. Total realisasi belanja pada 2019 mententuh angka Rp. 2,050,161,905 triliun.

**Tabel 2-10 Realisasi Belanja Menurut Fungsi di Kabupaten Sukoharjo (ribu rupiah) Tahun 2015 – 2020**

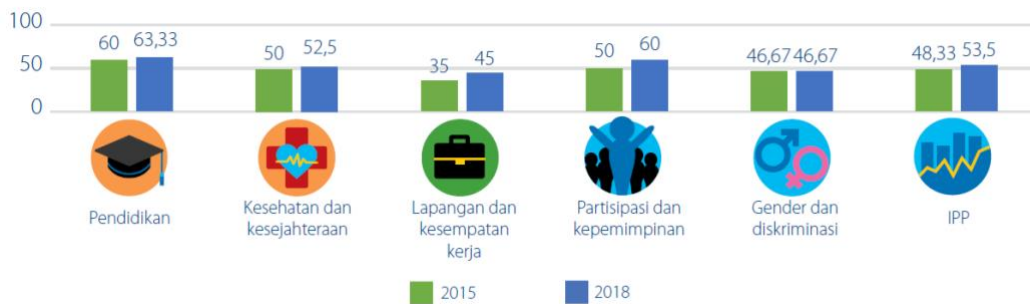
Jenis Belanja	Tahun Anggaran				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pelayanan Umum	339,447,344	469,754,583	556,959,529	695,042,746	695,042,746
Ketertiban dan Keamanan	20,970,099	19,761,842	21,591,277	29,758,515	29,758,515
Ekonomi	77,963,537	78,264,472	87,891,746	82,763,187	82,763,187
Lingkungan Hidup	16,527,371	15,098,049	20,908,133	37,291,158	37,291,158
Perumahan dan Fasilitas Umum	210,786,634	283,008,335	183,367,199	204,454,969	204,454,969
Kesehatan	212,535,445	265,326,783	274,596,174	297,148,894	297,148,894
Pariwisata dan Kebudayaan	1,268,593	1,360,664	2,495,032	4,992,831	4,992,831
Pendidikan	733,186,696	724,358,758	679,008,227	672,398,323	672,398,323
Perlindungan Sosial	22,616,548	22,927,399	60,685,968	26,311,282	26,311,282
Jumlah	1,635,302,267	1,879,860,885	1,887,503,285	2,050,161,905	2,050,161,905

Sumber: Sukoharjo Dalam Angka, 2020

## 2.4 PROFIL IPP PROVINSI JAWA TENGAH

Nilai IPP Provinsi Jawa Tengah naik dari 48,33 pada 2015 menjadi 53,50 pada 2018. Kenaikan ini terjadi seiring dengan adanya peningkatan capaian pada hampir semua domain. Peningkatan signifikan terjadi pada domain lapangan dan kesempatan kerja, serta partisipasi dan kepemimpinan. Peningkatan nilai indeks domain lapangan dan kesempatan kerja dalam periode 2015–2018 disebabkan bertambahnya proporsi pemuda wirausaha kerah putih, yaitu dari 0,29% menjadi 0,48%, serta turunnya tingkat pengangguran pemuda, yaitu dari 14% menjadi 12%. Sementara itu, peningkatan nilai indeks domain partisipasi dan kepemimpinan didorong oleh perbaikan pada semua indikator, yakni (i) naiknya angka partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan (90,22%); (ii) bertambahnya proporsi pemuda yang aktif dalam organisasi sebesar 3,40 titik persentase menjadi 9,79%; dan (iii) bertambahnya proporsi pemuda yang memberi saran dalam rapat, dari 7,73% pada 2015 menjadi 10,48% pada 2018. Secara umum, pola capaian Provinsi Jawa Tengah hampir sama dengan pola

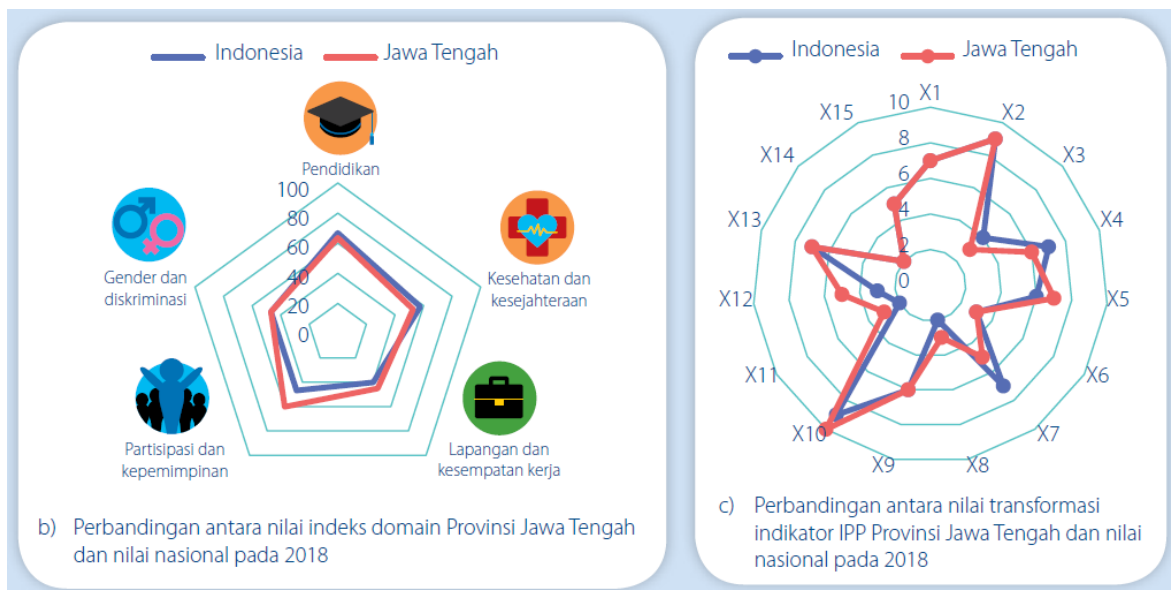
capaian nasional, kecuali pada domain partisipasi dan kepemimpinan yang memiliki nilai indeks lebih tinggi.



**Gambar 2-2 Perkembangan Nilai IPP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2018**

Sumber : Buku pedoman Indeks Pembangunan Pemuda, Bappenas, 2019

Sementara itu, nilai indeks domain pendidikan mengalami peningkatan yang kurang signifikan. Rata-rata lama sekolah pemuda meningkat dari 9,82 tahun pada 2015 menjadi 10 tahun pada 2018. APK perguruan tinggi pun meningkat sebesar 2,68 titik persentase, dari 19,28% pada 2015 menjadi 21,96% pada 2018. Perbaikan pada domain kesehatan dan kesejahteraan lebih banyak didorong oleh turunnya angka kesakitan pemuda dari 11% pada 2015 menjadi 8% pada 2018. Nilai indeks domain gender dan diskriminasi juga tidak mengalami peningkatan signifikan.



**Gambar 2-3 Grafik Perbandingan Nilai IPP Provinsi Jawa Tengah Terhadap IPP Nasional**

Sumber : Buku pedoman Indeks Pembangunan Pemuda, Bappenas, 2019

Provinsi Jawa Tengah memiliki beberapa tantangan dalam pembangunan pemuda yang memerlukan perhatian khusus. Pertama, pada domain pendidikan, provinsi ini perlu

meningkatkan APK perguruan tingginya. Meskipun trennya meningkat sejak 2015, APK perguruan tinggi provinsi ini baru mencapai 22% dan menempati peringkat kelima terendah secara nasional pada 2018. Capaian ini juga berada di bawah capaian nasional (30%) dan jauh tertinggal dari Provinsi DI Yogyakarta yang menempati posisi tertinggi (70,60%). Tantangan kedua terdapat pada domain kesehatan dan kesejahteraan, yakni angka kesakitan pemuda (8%) yang masih berada di atas angka nasional. Proporsi remaja perempuan hamil pada 2018 yang mencapai 24% menempati posisi kelima tertinggi se-Indonesia dan melebihi angka nasional yang hanya sebesar 16,67%. Tantangan ketiga terdapat pada domain gender dan diskriminasi, yaitu rendahnya proporsi pemuda perempuan berusia 16–24 tahun yang sedang menempuh pendidikan menengah dan tinggi (35,73%); angka ini lebih kecil daripada angka nasional.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO  
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
Jl. Gedung Menara Wijaya Lt. 7 Jalan Jend. Sudirman No. 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521

JASA KONSULTANSI

3

## BAB PENELITIAN - PENGUKURAN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA (IPP)

# Pemahaman

# dan

# Metodologi

KABUPATEN SUKOHARJO

LAPORAN AKHIR

*Bagian ini berisi pemahaman terkait kepemudaan, tahapan dan metode pelaksanaan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Tahapan tersebut meliputi: tahap persiapan, tahap pengumpulan data, analisis data dan sistem diskusi.*



## 3.1 PEMAHAMAN TERKAIT KEPEMUDAAN

### 3.1.1 Potret Pembangunan Kepemudaan di Indonesia

Kinerja pembangunan pemuda Indonesia telah menunjukkan perkembangan positif meski belum dapat dikatakan memuaskan. Pada 2018, nilai IPP Indonesia baru mencapai angka 51,50 dari nilai maksimum 100. Domain-domain pembentuk IPP juga memiliki kinerja yang beragam, padahal keseluruhan domain ini perlu dibangun secara merata agar dihasilkan pemuda yang berkualitas dan berdaya saing.

Di antara lima domain pembentuk IPP, domain pendidikan memiliki kinerja terbaik dengan nilai indeks di atas 60, diikuti oleh domain kesehatan dan kesejahteraan dengan nilai indeks sebesar 57. Sementara itu, kinerja tiga domain yang lain cukup tertinggal dengan nilai indeks di bawah 50. Domain dengan capaian terendah adalah lapangan dan kesempatan kerja. Dalam periode 2015–2018, tren kenaikan nilai indeks yang masih fluktuatif menunjukkan perlunya upaya lebih besar agar capaian pembangunan pemuda dapat terus meningkat secara konsisten.

Kinerja pembangunan pemuda di berbagai daerah di Indonesia tidaklah seragam, dengan rentang nilai IPP sebesar 24,16 poin–nilai terendah 46,17 dan nilai tertinggi 70,33. Beberapa provinsi berhasil menunjukkan kinerja pembangunan pemuda yang positif. Salah satunya adalah Provinsi DI Yogyakarta. Provinsi ini mampu bertahan sebagai provinsi dengan nilai IPP tertinggi se-Indonesia sejak 2015 dan tetap mengalami perkembangan positif hingga 2018 dengan kenaikan sebesar 4,83 poin. Sementara itu, terdapat pula provinsi dengan perkembangan yang lambat dan tetap bertahan di peringkat bawah. Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Kalimantan Selatan merupakan dua dari lima provinsi dengan dengan nilai IPP terendah sejak 2015. Provinsi Jawa Barat mengalami perubahan nilai IPP yang lambat, sementara Provinsi Kalimantan Selatan mengalami dinamika yang berbeda. Nilai IPP Provinsi Kalimantan Selatan mengalami peningkatan yang cukup progresif, yaitu sebesar 4,20 poin dari angka 43,83 pada 2015. Namun, pada 2018, provinsi ini masih merupakan salah satu dari lima provinsi dengan nilai IPP terendah (peringkat ke-32); nilai IPP provinsi ini berada jauh di bawah angka nasional, yaitu sebesar 48. Berbeda halnya dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Papua, keduanya mengalami penurunan kinerja pembangunan pemuda yang ditandai dengan lebih rendahnya nilai IPP pada 2018 dibandingkan dengan 2015. Penurunan nilai ini menjadi peringatan bagi kedua provinsi tersebut agar melakukan upaya serius untuk mencegah penurunan IPP lebih lanjut pada masa mendatang.

Berita baik dari perkembangan pembangunan pemuda sejauh ini adalah adanya indikasi konvergensi pada hampir semua indikator penyusun IPP. Hal ini berarti bahwa secara rata-rata provinsi dengan pembangunan pemuda yang tertinggal dapat mengejar provinsi dengan capaian lebih baik meskipun dengan kecepatan yang berbeda-beda. Provinsi NTB berhasil memacu peningkatan.

### 3.1.2 Kerangka Situasi dan Tantangan Pembangunan Pemuda di Daerah

Analisis situasi dan tantangan pembangunan pemuda di tingkat daerah merupakan hal yang perlu dilakukan. Tujuannya adalah memperoleh pemahaman yang lengkap terkait persoalan yang dihadapi daerah sehingga dapat dirumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk memperbaiki pembangunan pemudanya pada masa mendatang. Bahkan, dengan analisis yang tepat, pemerintah daerah dapat menjadi lebih rasional dalam menetapkan angka target pembangunan pemudanya.

Provinsi Jawa Barat dijadikan daerah uji coba untuk membangun kerangka analisis situasi dan tantangan pembangunan pemuda. Analisis dilakukan mulai dari penghitungan nilai indikator IPP di tingkat kabupaten/kota hingga rangkaian diskusi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang mencakup kelompok pemuda, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, organisasi nonpemerintah, serta akademisi. Tujuannya adalah menganalisis tantangan yang dihadapi dan hal baik yang sudah dilakukan daerah terkait dengan pembangunan pemuda pada tiap domain. Dengan hasil analisis ini, intervensi kunci dapat dipetakan.

Tantangan pembangunan pemuda yang dihadapi Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1. Dalam bidang pendidikan, rendahnya partisipasi sekolah pemuda disebabkan oleh kurangnya kepedulian orang tua terhadap pendidikan anaknya serta rendahnya tingkat sosial-ekonomi keluarga. Hal ini juga didorong oleh banyaknya anak di lingkungan sekitar yang tidak bersekolah, serta budaya patriarki yang kental dalam masyarakat— anak laki-laki didorong untuk bekerja dan anak perempuan untuk menikah pada usia dini. Kurangnya ketersediaan infrastruktur pendidikan dan penerapan sistem zonasi sekolah juga teridentifikasi sebagai faktor yang menyebabkan banyak pemuda tidak dapat mengakses sekolah;
2. Rendahnya capaian pendidikan pemuda dan tingginya angka perkawinan usia anak merupakan faktor yang menghambat pemuda untuk mengakses lapangan kerja di sektor formal. Selain itu, sistem pendidikan yang ada saat ini belum mampu menghasilkan pemuda dengan kualifikasi yang dibutuhkan dunia kerja. Program pelatihan kewirausahaan masih belum efektif karena tidak berkelanjutan dan efektivitasnya tidak dievaluasi. Ketatnya persaingan kerja akibat urbanisasi serta lebih tingginya tingkat upah di Provinsi Jawa Barat menjadi tantangan bagi pemuda dalam mendapatkan pekerjaan di sektor formal;
3. Dalam bidang kesehatan, angka kesakitan pemuda Provinsi Jawa Barat termasuk tinggi. Hal ini diduga disebabkan oleh pola makan yang belum memenuhi gizi seimbang. Kurangnya wawasan dan pemahaman mengenai pola hidup sehat menjadi penyebabnya, di samping belum membudayanya pemeriksaan kesehatan rutin. Kebiasaan merokok juga ditemukan berkorelasi dengan angka kesakitan pemuda; dan
4. Partisipasi dan kepemimpinan pemuda di Provinsi Jawa Barat masih kurang. Faktor internal, seperti kurangnya minat dan kepercayaan diri pemuda, serta faktor

eksternal, seperti kurangnya kesempatan bagi pemuda untuk berpendapat, merupakan hambatan yang dihadapi pemuda untuk terlibat dalam pembangunan.

Persoalan pada tiap domain pembangunan pemuda tidak benar-benar terpisah satu sama lain. Beberapa faktor kunci teridentifikasi memengaruhi capaian lebih dari satu domain. Pembinaan faktor-faktor kunci merupakan hal strategis yang perlu dilakukan karena memiliki daya ungkit yang besar untuk mendorong kinerja lebih dari satu domain pembangunan pemuda. Bersamaan dengan hal tersebut, pembinaan faktor lain yang sifatnya spesifik–hanya memengaruhi domain tertentu–juga perlu dilakukan agar tercipta lingkungan yang mendukung pemuda untuk membangun dirinya, serta meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraannya. Dengan demikian, mereka akan dapat berpartisipasi dalam pembangunan.

Setiap daerah di Indonesia, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, memiliki dinamika persoalan kepemudaan yang beragam. Oleh karena itu, setiap daerah perlu mereplikasi analisis situasi dan tantangan pembangunan pemuda seperti yang dilakukan terhadap Provinsi Jawa Barat dalam laporan ini. Langkah ini penting untuk diambil dalam rangka merumuskan kebijakan yang tepat untuk mendorong perbaikan pembangunan pemuda di tingkat daerah.

### **3.1.3 Undang – Undang No. 40 Tahun 2009**

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peranan pemuda. Dalam perintisan pergerakan kebangsaan Indonesia, pemuda berperan aktif sebagai ujung tombak dalam mengantarkan bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Undang-undang No. 40 tahun 2009 hadir sebagai kerangka normatif dan payung hukum untuk mendefinisikan aspek-aspek yang terkait dengan Kepemudaan.

Unndang-undang tersebut sekaligus menjelaskan bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional, diperlukan pemuda yang berakhlak mulia, sehat, tangguh, cerdas, mandiri, dan professional. Dalam pembangunan pemuda, diperlukan pelayanan kepemudaan dalam dimensi pembangunan di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemuda adalah didefinisikan sebagai warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia **16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun**. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan. Sedangkan pelayanan kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda. Penyadaran pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.

Selain itu, UU No. 40 th 2009 juga mencakup beberapa definisi operasional lainnya yang dapat menjadi rujukan terkait dengan istilah-istilah kepemudaan, antara lain sebagai berikut:

1. Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
2. Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
3. Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
4. Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.
5. Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
6. Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
7. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau nonmateriel.

Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan, dimana Pelayanan kepemudaan berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk: menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Beberapa strategi secara normatif yang menjadi kerangka di dalam Pelayanan kepemudaan dilakukan berdasarkan pada aspek-aspek bela negara; kompetisi dan apresiasi pemuda; peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki; dan pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu Pelayanan kepemudaan dilakukan melalui strategi:

1. peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda;
2. pendampingan pemuda;
3. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan
4. penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat berkewajiban untuk bersinergi dalam melaksanakan pelayanan kepemudaan. Pemerintah mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dalam rangka penajaman, koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah.

Pemerintah daerah selaku stakeholder inti pada wilayahnya masing-masing mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengoordinasikan pelayanan kepemudaan. Pemerintah daerah diharapkan mampu membentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing.

### **3.1.4 Indeks Pembangunan Pemuda**

Pembangunan pemuda, sejalan dengan amanat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, harus benar-benar bermanfaat bagi pemuda Indonesia yang menurut data BPS (2019) berjumlah sekitar 64,19 juta jiwa. Setiap rupiah anggaran pemerintah, baik yang dipergunakan oleh jajaran pemerintah pusat maupun daerah harus jelas output-outcome dan manfaat atau dampak positifnya untuk sebesar-besarnya kualitas dan daya saing pemuda.

Berkaitan dengan indikator outcome (hasil) pembangunan, Indonesia memasuki babak baru dunia pembangunan pemuda. Pada tanggal 13 Juli 2018 telah diluncurkan buku Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) 2017 bertempat di Bappenas. Rumusan IPP Indonesia versi pertama ini mempunyai 5 dimensi/domain: Pendidikan, Kesehatan/Kesejahteraan, Peluang Ekonomi, Partisipasi dan Kepemimpinan, Gender dan Diskriminasi. Kelima dimensi ini masing-masing dijabarkan lagi sehingga memiliki 15 indikator. Formulasi ini diidentifikasi oleh tim riset pada kurun waktu tahun 2016 hingga 2018. Institusi yang terlibat selain Bappenas dan Kemenpora adalah BPS, UNFPA, Kemenko PMK, organisasi kepemudaan, Universitas Indonesia dan Univeritas Andalas. Adapun kajian sebelumnya diinisiasi oleh Kemenpora bersama IPB.

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, IPP telah memiliki base line 55,33 (2020). Adapun target IPP nasional pada tahun 2024 adalah sebesar 57,67. Perangkaan ini adalah komitmen nasional dengan dukungan daerah karena secara matematis IPP nasional merupakan kompilasi dari IPP yang dicapai oleh 34 provinsi. Komitmen ini sekaligus mendukung agenda global Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditargetkan tuntas pada tahun 2030. Terkonfirmasi bahwa Bappenas bersama UNFPA dan BPS, telah menelaah bahwa dari 241 indikator SDGs, terdapat 70 indikator yang kiranya relevan dengan pembangunan remaja dan pemuda Indonesia. Untuk itu, secara konsepsional, tahun ini Kemenpora bertekad kuat guna merampungkan grand design atau peta jalan pembangunan kepemudaan Tahun 2020-2030.

### 3.2 TAHAPAN DAN METODOLOGI PELAKSANAAN

Kegiatan persiapan adalah kegiatan untuk menyiapkan pelaksanaan kegiatan baik teknis maupun non-teknis yang akan melandasi rangkaian pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. Lingkup kegiatan persiapan ini akan diselesaikan pada 1 (satu) bulan pertama pelaksanaan kegiatan penyusunan, terhitung sejak diterbitkannya SPMK.

Dalam metode penyusunan pekerjaan ini, terdapat 4 (empat) aspek utama yang akan diuraikan: (1) metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan ini; (2) metode pengumpulan data yang menjelaskan proses memperoleh informasi data dan informasi yang diperlukan guna mendukung analisis; (3) proses analisis yang menjelaskan proses dan teknik analisis data; dan (4) rencana kerja guna mendukung tersusunnya dokumen Indeks Pembangunan Pemuda.

Dalam lingkup kegiatan persiapan ini berupa:

#### **A. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan ini dari awal sampai akhir antara tim penyusun dan tim teknis;**

Tujuan	: Koordinasi dengan tim teknis
	: Menyepakati rencana dan metodologi penyusunan
	: Mengumpulkan data dan informasi awal terkait IPP Kabupaten Sukoharjo
Metode	: Diskusi dan koordinasi
Langkah	: Diskusi kesiapan tim dalam menjalankan lingkup pekerjaan dan kebutuhan penyiapan pekerjaan
	: Penyamaan pemahaman lingkup tugas tim penyusun dalam kegiatan penyusunan
Output	: Rencana kerja dan metodologi yang telah disepakati
	: Data dan informasi terkait IPP Kabupaten Sukoharjo

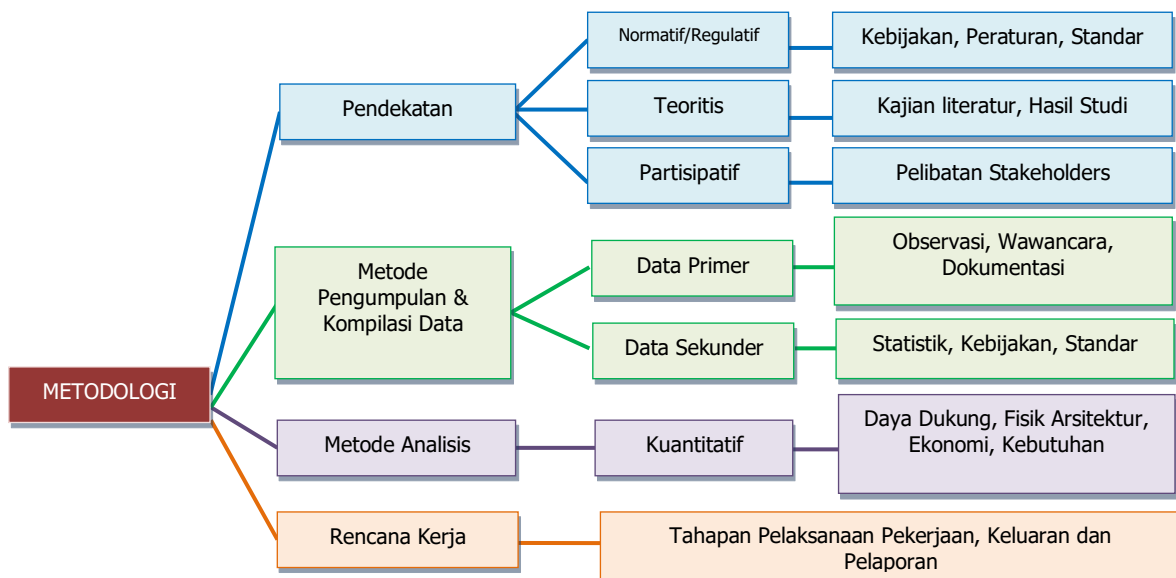
#### **B. Penyusunan Desain Survey dan Format Kegiatan;**

Tujuan	: Menyiapkan desain survey yang diperlukan untuk keperluan penyusunan
	: Menyusun format – format untuk kebutuhan baik di lapangan maupun pengolahan data dan informasi terkait dengan kondisi kawasan
Metode	: Diskusi dan koordinasi
Langkah	: Penyamaan persepsi dan kesepakatan terkait data dasar yang sudah ada
	: Penyamaan pemahaman lingkup tugas tim penyusun dalam kegiatan penyusunan

Output : Penyiapan desain survei  
 Output : Data sekunder  
 Output : Format desain survei

**C. Penyiapan Referensi IPP Kabupaten Sukoharjo**

Tujuan : Menyiapkan data atau kompilasi referensi IPP Kabupaten Sukoharjo  
 Metode : Diskusi dan koordinasi  
 Langkah : Koordinasi dengan pihak terkait  
 : Penyamaan persepsi dan kesempatan terkait atau kompilasi referensi penyusunan dokumen IPP Kabupaten Sukoharjo  
 Output : Gambaran IPP Kabupaten Sukoharjo



**Gambar 3-1 Alur Kerangka Metodologi Pekerjaan**

Sumber : Tim Penyusun, 2022

**3.2.1 Tahap Pengumpulan Data**

Pengumpulan data ini dengan melakukan kunjungan kepada instansi terkait, baik Bappeda, Disdukcapil maupun BPS Kabupaten Sukoharjo serta OPD-OPD lainnya yang terkait dengan kebutuhan data IPP.

Tujuan : Mengumpulkan data sekunder  
 Metode : Kunjungan instansional  
 : Kompilasi data

Langkah : Permohonan secara formal pengambilan Data instansional

Output : Data primer dan sekunder

Berikut ini ditampilkan tabel kebutuhan data yang disesuaikan dengan kebutuhan data dalam perhitungan IPP sesuai dengan dokumen IPP Kementerian Bappenas, 2019.

**Tabel 3-1 Kebutuhan Data**

Variabel		Parameter Data	Sumber Data
<b>Domain Pendidikan</b>			
X1	Rata-rata lama sekolah pemuda	Rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk berusia 16–30 tahun untuk menempuh semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPS Kabupaten Sukoharjo;</li> <li>• Dindukcapil Kabupaten Sukoharjo</li> </ul>
X2	APK sekolah menengah	Persentase siswa di SMP dan SMA dalam kelompok usia 13–18 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPS Kabupaten Sukoharjo;</li> <li>• Dindukcapil Kabupaten Sukoharjo</li> </ul>
X3	APK perguruan tinggi	Proporsi mahasiswa pada jenjang perguruan tinggi (D-1 sampai S-3) dalam kelompok usia 19–23 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPS Kabupaten Sukoharjo;</li> <li>• Dindukcapil Kabupaten Sukoharjo</li> </ul>
<b>Domain Kesehatan dan Kesejahteraan</b>			
X4	Angka kesakitan pemuda	Proporsi pemuda berusia 16–30 tahun yang mengalami masalah kesehatan sehingga mengganggu kegiatan/aktivitas sehari-hari selama satu bulan terakhir dalam kelompok usia 16–30 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPS Kabupaten Sukoharjo;</li> <li>• Dindukcapil Kabupaten Sukoharjo</li> </ul>
X5	Persentase pemuda korban kejahatan	Proporsi pemuda berusia 16-30 tahun yang menjadi korban tindak kejahatan dalam setahun terakhir dalam kelompok usia 16–30 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPS Kabupaten Sukoharjo;</li> <li>• Dindukcapil Kabupaten Sukoharjo</li> </ul>
X6	Persentase pemuda yang merokok****	Persentase pemuda berusia 16–30 tahun yang pernah merokok dalam sebulan terakhir dalam kelompok usia 16–30 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPS Kabupaten Sukoharjo;</li> <li>• Dindukcapil Kabupaten Sukoharjo</li> </ul>
X7	Persentase remaja perempuan yang sedang hamil*	Persentase remaja perempuan berusia 15–18 tahun yang sedang hamil dalam kelompok perempuan pernah kawin berusia 15–18 tahun**	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPS Kabupaten Sukoharjo;</li> <li>• Dindukcapil Kabupaten Sukoharjo</li> </ul>
<b>Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja</b>			
X8	Persentase pemuda wirausaha kerah putih	Persentase penduduk berusia 16–30 tahun yang bekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap, atau berusaha dengan dibantu buruh tetap dan jenis pekerjaan kerah putih (tenaga profesional atau teknisi, kepemimpinan atau ketatalaksanaan, pejabat pelaksana, atau tenaga tata usaha) yang dibagi dengan jumlah pemuda berusia 16–30 tahun.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPS Kabupaten Sukoharjo;</li> <li>• Dindukcapil Kabupaten Sukoharjo</li> </ul>
<b>Domain Partisipasi dan Kepemimpinan ***</b>			
X10	Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan	Persentase pemuda berusia 16–30 tahun yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPS Kabupaten Sukoharjo;</li> <li>• Dindukcapil Kabupaten Sukoharjo</li> </ul>
X11	Persentase pemuda yang aktif dalam kegiatan organisasi	Persentase pemuda berusia 16–30 tahun yang mengikuti kegiatan organisasi yang memiliki keanggotaan, kepengurusan, dan aturan tertentu selain di tempat kerja dan sekolah dalam tiga bulan terakhir	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPS Kabupaten Sukoharjo;</li> <li>• Dindukcapil Kabupaten Sukoharjo</li> </ul>
X12	Persentase pemuda yang memberikan	Persentase pemuda berusia 16–30 tahun yang pernah mengikuti kegiatan pertemuan (rapat) di	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPS Kabupaten Sukoharjo;</li> </ul>

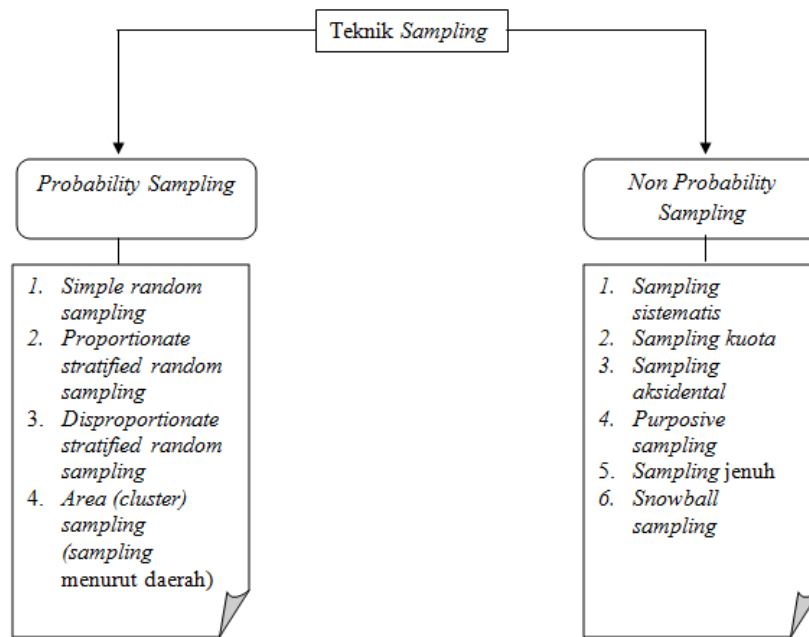
Variabel		Parameter Data	Sumber Data
	saran/pendapat dalam rapat	lingkungan sekitar dalam setahun terakhir dan memberikan saran/ pendapat dalam rapat tersebut	• Dindikcapil Kabupaten Sukoharjo
<b>Domain Gender dan Diskriminasi</b>			
X13	Angka perkawinan usia anak	Persentase pemuda perempuan berusia 20–24 tahun yang saat perkawinan pertamanya berusia di bawah 18 tahun di antara seluruh perempuan berusia 20–24 tahun	• BPS Kabupaten Sukoharjo; • Dindikcapil Kabupaten Sukoharjo
X14	Persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas	Persentase pemuda perempuan berusia 16–24 tahun yang sedang bersekolah di jenjang SMA/ sederajat atau lebih tinggi	• BPS Kabupaten Sukoharjo; • Dindikcapil Kabupaten Sukoharjo
X15	Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal	Persentase pemuda perempuan berusia 16–30 tahun yang bekerja di sektor formal	• BPS Kabupaten Sukoharjo; • Dindikcapil Kabupaten Sukoharjo

Sumber : Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia & Olah Data Tim Penyusun, 2022

Dalam implementasinya, pengumpulan data dilakukan dengan teknik sampling. Secara definisi Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari. Populasi tidak saja manusia/orang tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek yang dimaksud (Sugyono, 1998).

Keterbatasan sumber daya, baik waktu, SDM maupun kerangka finansial, dimungkinkan adanya prosedur sampling dalam suatu penelitian. Sampling sendiri merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar (keterbatasan waktu, tenaga dan sumber daya) maka dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.

Secara umum dikenal dua metode dalam tahapan sampling yaitu Probability Sampling dan Non Probability Sampling:



**Gambar 3-2 Teknik Sampling (Sugyono, 1998)**

Sumber : Tim Penyusun, 2022

Probability Sampling terdiri atas :

1. *Simple Random Sampling* : pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata. Populasi dianggap homogen
2. *Proportionate Stratified Random Sampling* : dipakai apabila populasi homogen dan berstrata secara proporsional : misal proporsi jenis pekerjaan, proposi pendidikan, dst.
3. *Disproportionate Sampling* ; Bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Misal : Unit kerja terdiri atas 3 orang S2 90 SMA, 400 SMP
4. *Cluster Sampling (area sampling)* : Bila obyek penelitian terlampau luas, maka digunakan representasi wilayah sebagai dasar penentuan sampling

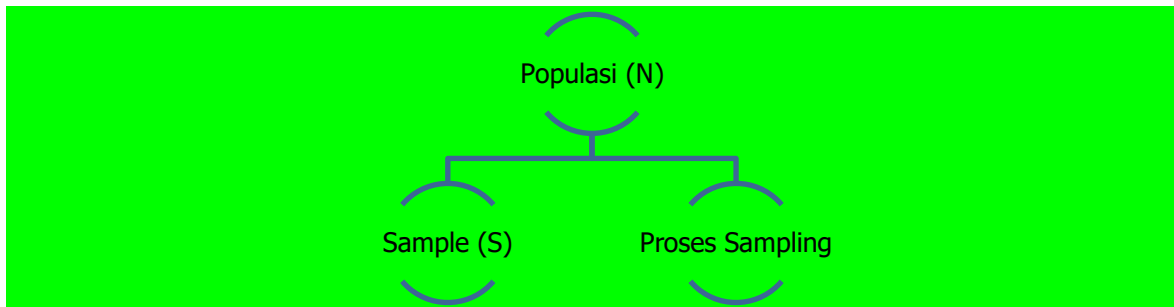
Sedangkan Non Probability sampling terdiri atas :

1. Sampling Sistematis (berdasarkan nomor urut uji coba yang dilakukan peneliti)
2. Sampling Kuota (menentukan sample berdasarkan ciri tertentu dengan menetapkan jumlah kuota)
3. Sampling Insidental (Penentuan sample secara kebetulan)
4. Sampling Purposive (berdasarkan pertimbangan tertentu, misalnya seorang ahli)
5. Sampling Jenuh (semua anggota populasi menjadi sample)
6. Snowball Sampling (dari jumlah sample awal yang kecil hingga membesar bergantung pada kelengkapan informasi)

Populasi penduduk usia pemuda (16-30 tahun) di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan data BPS Kabupaten Sukoharjo tahun 2022 adalah 203.714 Jiwa. Oleh sebab itu, secara otomatis, jumlah penduduk usia pemuda tersebut menjadi populasi dalam kajian ini.

Agar dapat dioptimalkan pemanfaatan populasi tersebut sebagai dasar perhitungan indeks IPP Kabupaten Sukoharjo maka populasi tersebut perlu dielaborasi lebih lanjut untuk dikerucutkan menjadi sample melalui tahapan metode proses sampling.

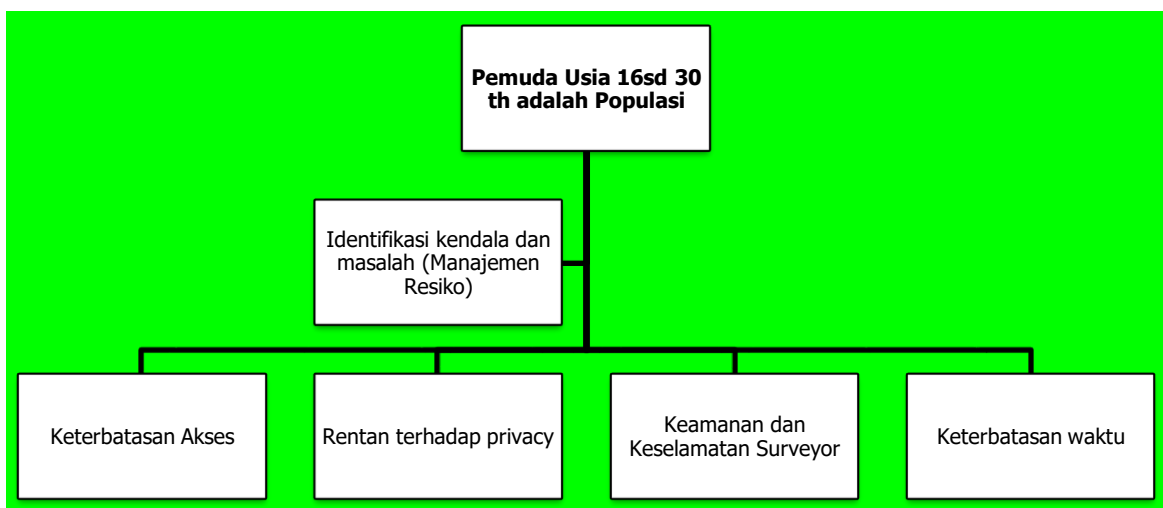
Adapun proses penurunan dari populasi menjadi sample hingga melalui proses sampling adalah sebagai berikut:



**Gambar 3-3 Proses Tahapan Identifikasi Populasi, Sample dan Proses Sampling**

*Sumber : Tim Penyusun, 2022*

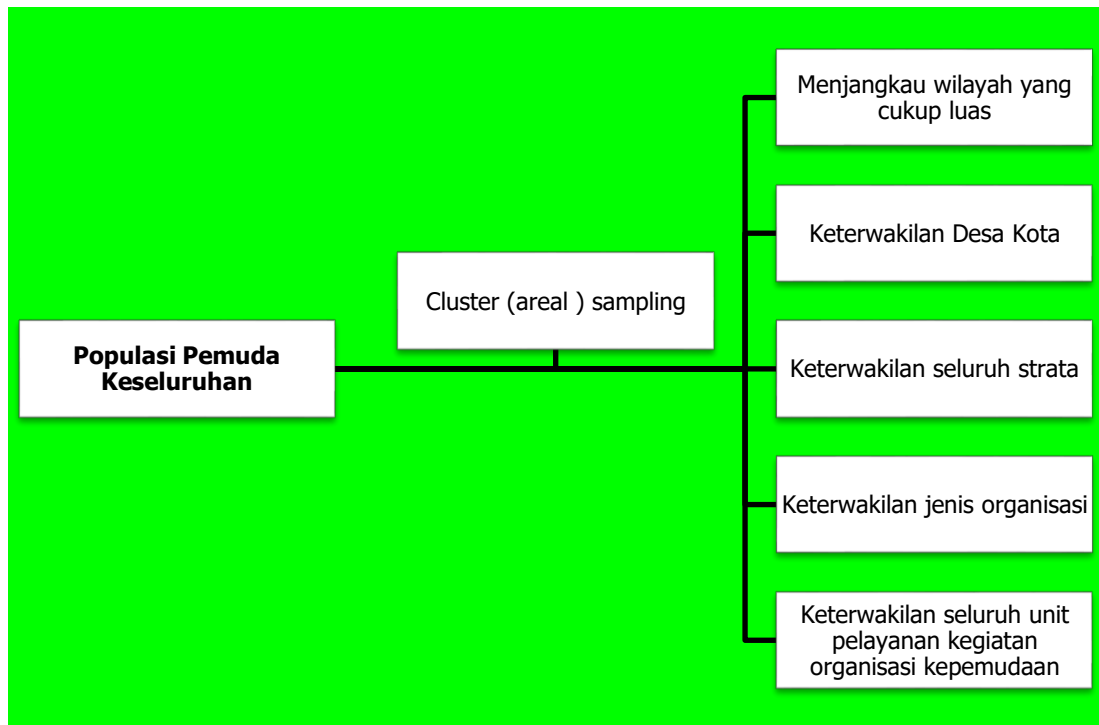
Penajaman terhadap mekanisme sampling diperlukan sebagai satu langkah rasional dan terukur, agar pelaksanaan kajian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sirkumstansi wilayah studi menjadi faktor penting. Pada diagram di bawah ini dijelaskan beberapa aspek yang kemungkinan besar menjadi batasan dalam pelaksanaan kajian. Beberapa diantaranya adalah manajemen risiko yang terdiri atas keterbatasan akses, privasi orang lain (objek penelitian), keamanan serta keterbatasan waktu. Dari rasionalitas tersebut, maka dalam kajian ini diperlukan adanya pembatasan cakupan kajian dengan melakukan upaya *sampling*.



**Gambar 3-4 Tahap Identifikasi Sirkumstansi di Lapangan dan Rasionalisasi Jumlah Sample Serta Proses Sampling**

*Sumber : Tim Penyusun, 2022*

Setelah adanya proses pendalaman terhadap sirkumstansi yang kemungkinan terjadi, langkah selanjutnya adalah memilih atau menentukan metode yang akan digunakan dalam upaya sampling.



**Gambar 3-5 Proses Penetapan Sampling Secara Cluster (Area Sampling)**

*Sumber : Tim Penyusun, 2022*

Selanjutnya setelah dapat dipahami secara rasional dan akademis terkait dengan sirkumstansi yang ada di wilayah kajian, maka proses selanjutnya adalah menetapkan jumlah sampling yang akan diambil berdasarkan jumlah populasi yang ada. Sesuai dengan jumlah populasi berdasarkan data BPS, jumlah pemuda usia 16 sd 30 tahun di Kabupaten Sukoharjo adalah:

**Gambar 3-6 Penentuan Jumlah Sample Berdasarkan Standar Error Kepercayaan (Issac dan Michael dalam Sugyono, 1998)**

*Sumber : Tim Penyusun, 2022*

**Tabel 3-2 Penentuan Jumlah Sample Berdasarkan Standar Error Kepercayaan (Issac dan Michael dalam Sugyono, 1998)**

N	S			N	S			N	S		
	1%	5%	10%		1%	5%	10%		1%	5%	10%
10	10	10	10	280	197	115	138	2800	537	310	247
15	15	14	14	290	202	158	140	3000	543	312	248
20	19	19	19	300	207	161	143	3500	558	317	251
25	24	23	23	320	216	167	147	4000	569	320	254
30	29	28	27	340	225	172	151	4500	578	323	255
35	33	32	31	360	234	177	155	5000	586	326	257
40	38	36	35	380	242	182	158	6000	598	329	259
45	42	40	39	400	250	186	162	7000	606	332	261
50	47	44	42	420	257	191	165	8000	613	334	263
55	51	48	46	440	265	195	168	9000	618	335	263
60	55	51	49	460	272	198	171	10000	622	336	263
65	59	55	53	480	279	202	173	15000	635	340	266
70	63	58	56	500	285	205	176	20000	642	342	267
80	71	65	62	600	315	221	187	40000	653	345	269
85	75	68	65	650	329	227	191	50000	655	346	269
90	79	72	68	700	341	233	195	75000	658	346	270
95	83	75	71	750	352	238	199	100000	659	347	270
100	87	78	73	800	363	243	202	150000	661	347	270
110	94	84	78	850	373	247	205	200000	661	347	270
120	102	89	83	900	382	251	208	250000	662	348	270
130	109	95	88	950	391	255	211	300000	662	348	270
140	116	100	92	1000	399	258	213	350000	662	348	270
150	122	105	97	1050	414	265	217	400000	662	348	270
160	129	110	101	1100	427	270	221	450000	663	348	270
170	135	114	105	1200	440	275	224	500000	663	348	270
180	142	119	108	1300	450	279	227	550000	663	348	270
190	148	123	112	1400	460	283	229	600000	663	348	270
200	154	127	115	1500	469	286	232	650000	663	348	270
210	160	131	118	1600	477	289	234	700000	663	348	270
220	165	135	122	1700	485	292	235	750000	663	348	271
230	171	139	125	1800	492	294	237	800000	663	348	271
240	176	142	127	1900	498	297	238	850000	663	348	271
250	182	146	130	2000	510	301	241	900000	663	348	271
260	187	149	133	2200	520	304	243	950000	663	348	271
270	192	152	135	2600	529	307	245	1000000	664	349	272

Sumber : Sugyono, 1998

### 3.2.2 Metode Penghitungan IPP

Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data secara sekunder selanjutnya diinventarisasi dan dikelompokkan sesuai dengan jenis data. Kegiatan berikutnya setelah inventarisasi data adalah pengolahan data, yaitu pekerjaan menyusun dan merangkai berbagai jenis data yang satuan dan fungsinya belum teratur menjadi suatu susunan data yang sistematis dan terinci sesuai dengan fungsi, klasifikasi dan kegunaannya, yang dapat digunakan sebagai dasar dalam kegiatan analisis lebih lanjut.

IPP disusun atas 5 domain pembangunan yang didalamnya memuat 15 indikator pembangunan pemuda. Penghitungan IPP dalam dokumen ini dilakukan dengan menggunakan metode penghitungan nilai indeks. Dalam indikator APK perguruan tinggi dan angka perkawinan usia anak. Metadata indikator TPB yang digunakan dalam analisa ini mengikuti definisi baru metadata TPB.

**Tabel 3-3 Daftar Indikator IPP**

Variabel		Definisi Lama (2017)	Definisi Baru (2019)	Sumber Data
<b>Domain pendidikan</b>				
X1	Rata-rata lama sekolah pemuda	Rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk berusia 16–30 tahun untuk menempuh semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani	Tidak ada perubahan	Susenas Kor
X2	APK sekolah menengah	Persentase siswa di SMP dan SMA dalam kelompok usia 13–18 tahun	Tidak ada perubahan	Susenas Kor
X3	APK perguruan tinggi	Persentase mahasiswa pada jenjang perguruan tinggi (D-1 sampai S-3) dalam kelompok usia 19–24 tahun	Proporsi mahasiswa pada jenjang perguruan tinggi (D-1 sampai S-3) dalam kelompok usia 19–23 tahun	Susenas Kor
<b>Domain Kesehatan dan Kesejahteraan</b>				
X4	Angka kesakitan pemuda	Proporsi pemuda berusia 16–30 tahun yang mengalami masalah kesehatan sehingga mengganggu kegiatan/aktivitas sehari-hari selama satu bulan terakhir dalam kelompok usia 16–30 tahun	Tidak ada perubahan	Susenas Kor
X5	Persentase pemuda korban kejahatan	Proporsi pemuda berusia 16-30 tahun yang menjadi korban tindak kejahatan dalam setahun terakhir dalam kelompok usia 16–30 tahun	Tidak ada perubahan	Susenas Kor
X6	Persentase pemuda yang merokok****	Persentase pemuda berusia 16–30 tahun yang pernah merokok dalam sebulan terakhir dalam kelompok usia 16–30 tahun	Tidak ada perubahan	Susenas Kor
X7	Persentase remaja perempuan yang sedang hamil*	Persentase remaja perempuan berusia 15–18 tahun yang sedang hamil dalam kelompok perempuan pernah kawin berusia 15–18 tahun**	Tidak ada perubahan	Susenas Kor
<b>Domain Lapangan dan Kesempatan kerja</b>				
X8	Persentase pemuda wirausaha kerah putih	Persentase penduduk berusia 16–30 tahun yang bekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap, atau berusaha dengan dibantu buruh tetap dan jenis pekerjaan kerah putih (tenaga profesional atau teknisi, kepemimpinan atau ketatalaksanaan, pejabat pelaksana, atau tenaga tata usaha) yang dibagi dengan jumlah pemuda berusia 16–30 tahun.	Tidak ada perubahan	Sakernas
<b>Domain Partisipasi dan kepemimpinan***</b>				

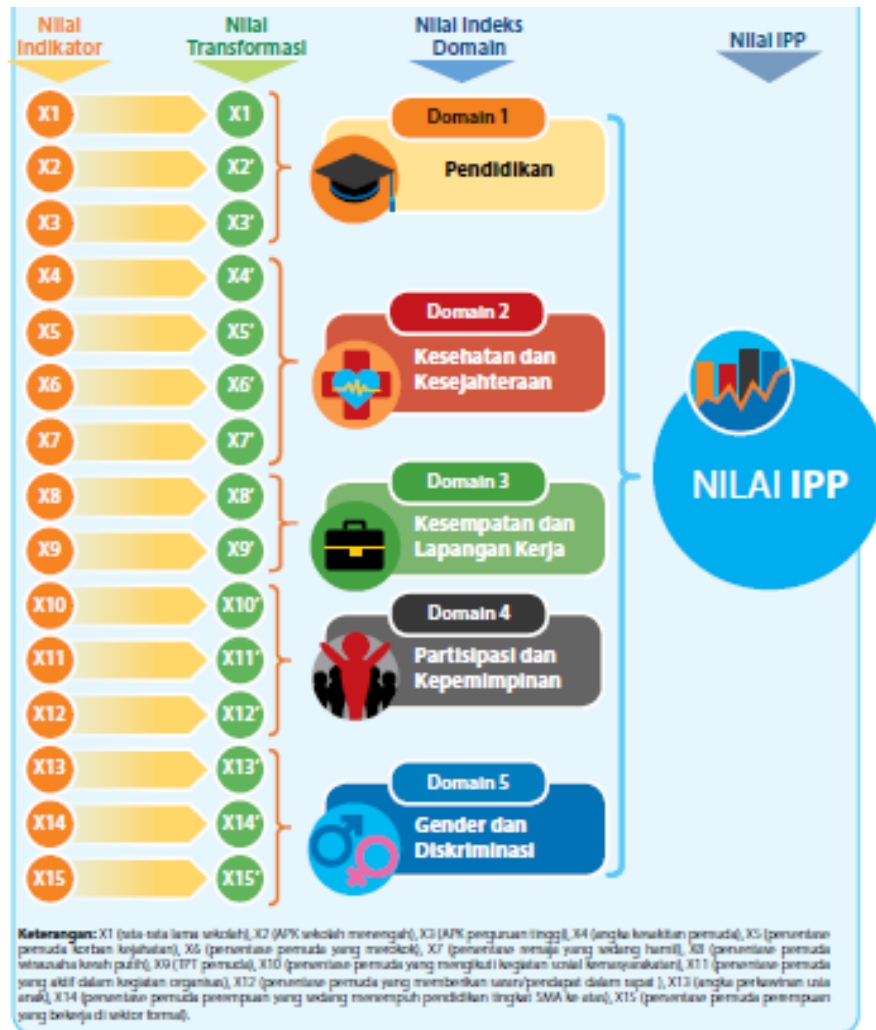
Variabel		Definisi Lama (2017)	Definisi Baru (2019)	Sumber Data
X10	Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan	Persentase pemuda berusia 16–30 tahun yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir	Tidak ada perubahan	Susenas MSBP
X11	Persentase pemuda yang aktif dalam kegiatan organisasi	Persentase pemuda berusia 16–30 tahun yang mengikuti kegiatan organisasi yang memiliki keanggotaan, kepengurusan, dan aturan tertentu selain di tempat kerja dan sekolah dalam tiga bulan terakhir	Tidak ada perubahan	Susenas MSBP
X12	Persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat	Persentase pemuda berusia 16–30 tahun yang pernah mengikuti kegiatan pertemuan (rapat) di lingkungan sekitar dalam setahun terakhir dan memberikan saran/ pendapat dalam rapat tersebut	Tidak ada perubahan	Susenas MSBP
<b>Domain Gender dan Diskriminasi</b>				
X13	Angka perkawinan usia anak	Persentase pemuda perempuan berusia 20–24 tahun yang saat perkawinan pertamanya berusia di bawah 18 tahun di antara perempuan berusia 20–24 tahun yang pernah kawin	Persentase pemuda perempuan berusia 20–24 tahun yang saat perkawinan pertamanya berusia di bawah 18 tahun di antara seluruh perempuan berusia 20–24 tahun	Susenas Kor
X14	Persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas	Persentase pemuda perempuan berusia 16–24 tahun yang sedang bersekolah di jenjang SMA/ sederajat atau lebih tinggi	Tidak ada perubahan	Susenas Kor
X15	Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal	Persentase pemuda perempuan berusia 16–30 tahun yang bekerja di sektor formal	Tidak ada perubahan	Sakernas

Sumber : Dokumen IPP Kementerian Bappenas, 2019

Keterangan:

*a = ini adalah indikator proksi untuk angka fertilitas remaja;*

*b = Peraturan Menteri Kesehatan No. 25 Tahun 2014 tentang Kesehatan Anak mendefinisikan remaja sebagai kelompok usia 10 – 18 tahun. Karena data yang tersedia dimulai dari usia 15 tahun, maka kelompok usia untuk indikator ini adalah 15 sampai 18 tahun;*



**Gambar 3-7 Alur Penghitungan Nilai IPP**

Sumber : Dokumen IPP Kementerian Bappenas, 2019

### 3.2.3 Mekanisme Penghitungan Nilai Indeks

Penghitungan nilai indeks pada umumnya dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan nilai setiap indikator berdasarkan nilai batas maksimal dan minimal yang ditetapkan. Dalam menentukan nilai batas maksimal/minimal ini, digunakan standar resmi batas maksimal dan minimal pada beberapa indikator, seperti indikator rata – rata lama sekolah yang ditargetkan oleh PBB yang mencapai angka 15 tahun (bersekolah hingga lulus SMA/Sederajat). Sementara itu, untuk indikator yang tidak memiliki standar, penentuan nilai batas maksimal/minimal dilakukan dengan menggunakan nilai maksimal/minimal data empiris (sebaran data setiap provinsi) yang ditambahkan dengan dua kali nilai standar deviasi. Tabel berikut ini menampilkan nilai batas maksimal dan minimal untuk setiap indikator penyusun IPP.

**Tabel 3-4 Batas Maksimum dan Minimum Indikator IPP**

Variabel		Batas Minimum	Batas Maksimum	Sumber Data
<b>Domain pendidikan</b>				
X1	Rata-rata lama sekolah pemuda	0	15 (target)	Standar PBB, digunakan pada IPM
X2	APK sekolah menengah	0	100 (target)	Standar
X3	APK perguruan tinggi	0	100 (target)	Standar
<b>Domain Kesehatan dan Kesejahteraan</b>				
X4	Angka kesakitan pemuda	0 (target)	20	Nilai maksimum + 2 standar deviasi
X5	Persentase pemuda korban kejahatan	0 (target)	3	Nilai maksimum + 2 standar deviasi
X6	Persentase pemuda yang merokok****	0 (target)	36	Nilai maksimum + 2 standar deviasi
X7	Persentase remaja perempuan yang sedang hamil*	0 (target)	45	Nilai maksimum + 2 standar deviasi
<b>Domain Lapangan dan Kesempatan kerja</b>				
X8	Persentase pemuda wirausaha kerah putih	0	2 (target)	Nilai maksimum + 2 standar deviasi
X9	TPT pemuda	0 (target)	28	TPT pemuda arab Saudi
<b>Domain Partisipasi dan kepemimpinan***</b>				
X10	Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan	0	100 (target)	Standar
X11	Persentase pemuda yang aktif dalam kegiatan organisasi	0	45 (target)	Nilai maksimum + 2 standar deviasi
X12	Persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat	0	25 (target)	Nilai maksimum + 2 standar deviasi
<b>Domain Gender dan Diskriminasi</b>				
X13	Angka perkawinan usia anak	0 (target)	45	Nilai maksimum + 2 standar deviasi
X14	Persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas	25	100 (target)	Standar
X15	Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal	0	60 (target)	Nilai maksimum + 2 standar deviasi

Sumber : Dokumen IPP Kementerian Bappenas, 2019

Nilai maksimal (atau minimal) ini adalah sasaran yang harus dicapai agar nilai IPP mendekati angka ideal, yaitu 100. Untuk indikator yang capaiannya dianggap makin baik ketika nilainya makin tinggi, nilai maksimal adalah nilai sasaran yang harus dicapai agar dihasilkan angka IPP yang tinggi. Sebaliknya, untuk indikator yang capaiannya

dianggap makin baik ketika nilainya makin rendah, nilai minimum adalah nilai sasaran yang harus dicapai.

Dengan menggunakan nilai maksimum dan minimum, nilai indikator penyusun IPP dinormalkan dan distandarkan untuk menghasilkan nilai skor indikator, nilai indeks domain, dan nilai IPP. Tahapan yang dilakukan untuk menghitung nilai IPP adalah sebagai berikut:

### 3.2.3.1 Menetapkan Nilai Skor / Nilai Subindeks Setiap Indikator (Nilai Transformasi Indikator)

Untuk menghitung nilai IPP, nilai setiap indikator perlu dinormalkan dan distandarkan dengan mengubah nilai indikator menjadi nilai skor indikator. Konversi nilai dilakukan dengan menggunakan nilai maksimum dan minimum yang telah ditetapkan dengan menggunakan persamaan berikut.

$$\begin{aligned} \text{Skor Indikator}_{ji} &= \frac{\text{Nilai Indikator } y_{ji} - \text{Batas Minimum}_{ji}}{\text{Batas Maksimum}_{ji} - \text{Batas Minimum}_{ji}} \dots .1 \\ \text{Skor Indikator}_{ji} &= 1 - \frac{\text{Nilai Indikator } y_{ji} - \text{Batas Minimum}_{ji}}{\text{Batas Maksimum}_{ji} - \text{Batas Minimum}_{ji}} \dots .2 \end{aligned}$$

Persamaan pertama digunakan untuk menghitung skor indikator yang dianggap makin baik ketika nilainya makin tinggi. Persamaan kedua digunakan untuk menghitung skor indikator yang dianggap makin baik ketika nilainya makin rendah.

### 3.2.3.2 Menghitung Nilai Indeks Domain

Nilai indeks domain dihitung dengan menggunakan persamaan berikut:

$$\text{Indeks Domain}_j = \frac{\text{Skor } X_1 + \text{Skor } X_2 \dots + \text{Skor } X_n}{n} \times 10$$

n merupakan jumlah indikator setiap domain.

### 3.2.3.3 Menghitung Nilai IPP

Berdasarkan nilai indeks domain diatas, nilai IPP dihitung dengan persamaan berikut:

$$\text{IPP} = \frac{\text{Indeks Domain 1} + \text{Indeks Domain 2} + \dots + \text{Indeks Domain 5}}{5}$$

## 3.2.4 Tahap Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi

Tahap ini merupakan kesimpulan dari kesimpulan penilaian dari ke 5 domain dan 15 indikator yang merangkai IPP Kabupaten Sukoharjo. Pada tahap kesimpulan dan rekomendasi, setiap domain maupun indikator akan diuraikan lebih lanjut secara objektif terkait dengan aspek-aspek yang masih belum memenuhi atau bahkan aspek-aspek yang sudah terpenuhi dengan baik. Dari kesimpulan dan rekomendasi tersebut,

diharapkan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui DInas Pemuda dan Olahraga dapat memproyeksikan program-program yang mampu mendukung skor dari masing-masing domain yang dinilai.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO  
**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
Jl. Gedung Menara Wijaya Lt. 7 Jalan Jend. Sudirman No. 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521

JASA KONSULTANSI

4

# Analisis

# Indikator

# Pembangunan

# Pemuda

PENELITIAN - PENGUKURAN INDEKS  
PENGEMBANGAN PEMUDA (IPP)

KABUPATEN SUKOHARJO

LAPORAN AKHIR

*Bagian ini berisi penilaian indikator  
Pembangunan Pemuda.*



## 4.1 ANALISIS KEPEMUDAAN

Pemuda dalam pengertian awal merujuk pada kelompok usia demografi. Namun demikian, kelompok usia demografi ini oleh lembaga dan organisasi yang berbeda didefinisikan secara berbeda. Terdapat beragam definisi pemuda di tingkat global yang perlu menjadi bahan pertimbangan dalam usaha untuk memperjelas definisi pemuda.

**Tabel 4-1 Batasan usia pemuda menurut beberapa organisasi**

Organisasi	Batasan Usia Pemuda
United Nations (Adolescent: 10-19; Youth: 15-24; Young People: 10-24)*]	10–24
The Commonwealth	15–29
European Union (EU)	15–29
UN Habitat (Youth Fund)	15–32
World Bank (WB)	15–34
African Union (AU)	15–35
Indonesia	16-30

Sumber: Buku Laporan potensi kepemudaan, *Dispora Kab. Sukoharjo, 2021*

Indonesia sendiri, secara formal menetapkan batasan pemuda seperti yang dinyatakan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan, yakni 16-30 tahun. Sementara itu dalam pencatatan dan analisis statistik yang lazim, sebagaimana pula dikerjakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), lebih sering disajikan kelompok usia 15-29 tahun—yang terbagi menjadi 15-19, 20-24, dan 25-29 tahun—sebagai garis batas demografi konvensi umum. Namun demikian, dalam rangka mengulas kondisi pemuda Indonesia, BPS juga menerbitkan secara berkala publikasi Statistik Pemuda yang secara khusus merujuk pada ketetapan UU 40/2009 itu.

Tentu saja “muda” tidak hanya dapat dilihat dalam makna batas usia demografis. Di luar itu, “muda” mencakup ruang yang luas. “Muda” juga dapat dipahami dari perspektif maturitas organ tubuh dan emosi, identitas adolescence, new entries pada pasar kerja, entrepreneurial startups, young voters, hingga ke ruang-ruang perspektif lain. Dalam konteks inilah pembangunan pemuda diletakkan sebagai perluasan kapabilitas pemuda—makna yang setara dengan “pembangunan manusia” oleh Amartya Sen. Perluasan kapabilitas ini tak lain adalah usaha untuk meningkatkan keleluasaan dalam melakukan pilihan-pilihan, yakni meningkatkan akses dan kesempatan bagi pemuda untuk memilih apa yang dipandang bernilai.

Sejalan dengan perluasan kapabilitas berdasarkan UU 40/2009 tentang Kepemudaan Bab I Pasal 1 mengkategorikan pembangunan pemuda sebagai pelayanan kepemudaan dalam tiga bentuk besar, yaitu penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan. Selain itu, terdapat enam istilah turunan yang mengikutinya, yakni pengembangan kepemimpinan pemuda, pengembangan kewirausahaan pemuda, pengembangan kepeloporan pemuda, kemitraan (dengan pemuda), organisasi kepemudaan, dan

penghargaan pada pemuda. Semua istilah di atas terbentang dari usaha aktif untuk menyediakan kesempatan hingga wadah pengembangan diri pemuda. Istilah-istilah itu sendiri merujuk pada 10 asas norma (Bab I Pasal 2), yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kebhinekaan, demokratis, keadilan, partisipatif, kebersamaan, kesetaraan, dan kemandirian.

Undang-undang ini selanjutnya dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Presiden (Perpres) 66/2017 tentang "Koordinasi Strategis Lintas-sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan". Kepustakaan pembangunan juga menyediakan banyak pandangan mengenai pembangunan pemuda. Community Network for Youth Development (2001), misalnya, menyebut bahwa pembangunan pemuda ialah "proses di mana semua pemuda mencari cara untuk memenuhi kebutuhan fisik dan sosial dasar mereka dan untuk membangun pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan di masa remaja dan dewasa muda". Sementara itu, Pitmann (1993, seperti dikutip Butt and Mehmood, 2010) mendefinisikannya secara lebih spesifik, yaitu "proses perkembangan yang terus berlanjut di mana semua pemuda terlibat untuk (1) memenuhi kebutuhan dasar pribadi dan sosial mereka agar aman, merasa diperhatikan, dihargai, berguna dan berpijak pada spiritual, dan (2) membangun keterampilan dan kompetensi yang memungkinkan mereka berfungsi dan berkontribusi dalam kehidupan mereka sehari-hari. The Commonwealth (2013) mendefinisikan pembangunan pemuda sebagai usaha "meningkatkan status pemuda, memberdayakan mereka untuk membangun kompetensi dan kemampuan mereka untuk menjalani kehidupan. Hal ini akan memungkinkan pemuda untuk berkontribusi dan mendapatkan keuntungan dari situasi politik yang stabil, situasi ekonomi yang layak, dan situasi hukum yang mendukung, yang memungkinkan pemuda dapat berpartisipasi penuh sebagai warga negara yang aktif dinegaranya masing-masing."

Definisi-definisi itu memperlihatkan bahwa pembangunan pemuda menca kup berbagai domain atau dimensi yang perlu ditangani secara memadai oleh kebijakan sector atau kementerian yang relevan di negara.

Berbagai kebijakan publik dan program-program turunannya sangat berperan dalam mencapai tujuan pembangunan pemuda yang diinginkan. Semua kebijakan itu memberi arahan kepada para pemangku kepentingan tentang peran masing-masing dan ikut menyediakan sumber daya yang diperlukan. Sebagaimana diungkapkan sebelumnya, data pembangunan, memainkan peran kunci sebagai sumber daya informasi bagi pengambilan keputusan kebijakan.

## 4.2 DOMAIN PENDIDIKAN

### 4.2.1 Nilai Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Partisipasi Kasar

Kondisi pendidikan pemuda di Kabupaten Sukoharjo saat ini dapat dikatakan didominasi oleh pemuda dengan tingkat pendidikan tertinggi lulusan SLTA. Kemudian selanjutnya berturut-turut pemuda dengan tingkat pendidikan lulusan SMP/SLTP.

Berikut ini adalah data gambaran secara menyeluruh mengenai tingkat pendidikan pemuda di Kabupaten Sukoharjo.

**Tabel 4-2 Gambaran menyeluruh tingkat pendidikan pemuda di Kabupaten Sukoharjo.**

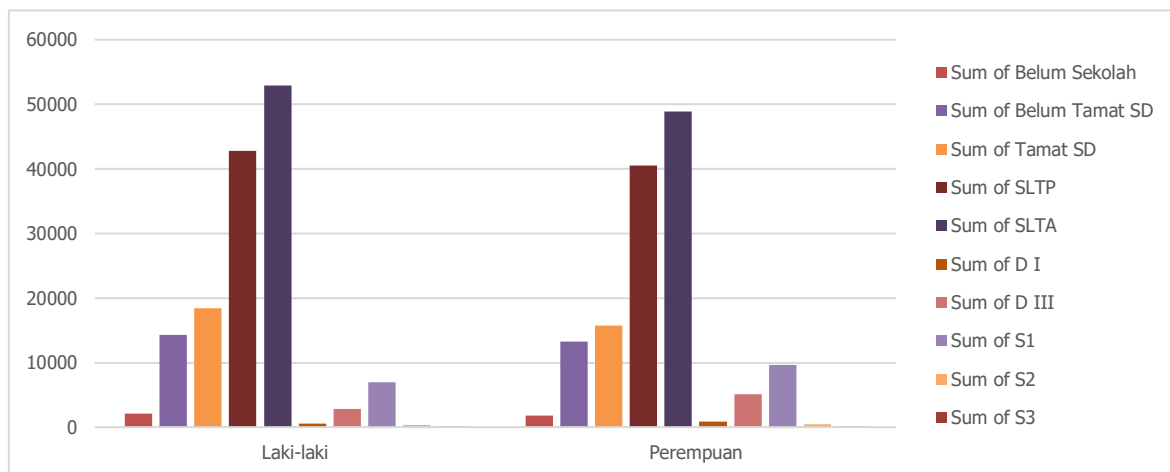
No	Kecamatan	Jenis Kelamin	Belum Sekolah	Belum Tamat SD	Tamat SD	SLTP	SLTA	D I	D III	S1	S2	S3	Jumlah
<b>1</b>	WERU	Laki-laki	379	698	1320	2731	3229	30	117	285	6	0	8.795
		Perempuan	355	635	1155	2592	3061	44	213	422	11	0	8.488
<b>2</b>	BULU	Laki-laki	141	636	1020	1818	2154	18	84	200	1	1	6.073
		Perempuan	101	508	867	1599	1922	33	158	228	5	0	5.421
<b>3</b>	TAWANGSARI	Laki-laki	125	1053	1413	2717	3122	42	125	291	10	1	8.899
		Perempuan	100	985	1258	2492	2804	86	265	417	8	0	8.415
<b>4</b>	SUKOHARJO	Laki-laki	152	1439	1823	4707	5545	65	422	934	51	1	15.139
		Perempuan	117	1417	1551	4580	5073	97	667	1324	71	3	14.900
<b>5</b>	NGUTER	Laki-laki	182	1016	1364	2495	2990	31	107	284	11	0	8.480
		Perempuan	138	928	1130	2349	2801	46	282	401	14	0	8.089
<b>6</b>	BENDOSARI	Laki-laki	162	867	1122	3035	3816	28	181	547	22	0	9.780
		Perempuan	139	880	980	2821	3462	68	357	719	36	1	9.463
<b>7</b>	POLOKARTO	Laki-laki	148	1366	1630	5342	4292	30	145	380	11	0	13.344
		Perempuan	136	1365	1493	5100	3983	56	334	631	12	0	13.110
<b>8</b>	MOJOLABAN	Laki-laki	116	1095	1463	4499	6067	51	326	672	38	1	14.328
		Perempuan	113	994	1217	4479	5422	69	640	1019	48	1	14.002
<b>9</b>	GROGOL	Laki-laki	247	2048	2631	5574	7663	78	424	954	35	0	19.654
		Perempuan	197	1918	2252	5179	7240	121	622	1291	60	0	18.880
<b>10</b>	BAKI	Laki-laki	183	1459	1746	3467	3589	49	243	562	31	0	11.329
		Perempuan	150	1293	1348	3219	3564	73	416	755	32	0	10.850
<b>11</b>	GATAK	Laki-laki	135	995	1296	2338	2936	31	174	339	12	2	8.258

No	Kecamatan	Jenis Kelamin	Belum Sekolah	Belum Tamat SD	Tamat SD	SLTP	SLTA	D I	D III	S1	S2	S3	Jumlah
		Perempuan	99	911	930	2139	2926	58	297	509	22	0	7.891
<b>12</b>	KARTASURA	Laki-laki	157	1602	1591	4101	7503	91	484	1459	86	5	17.079
		Perempuan	134	1428	1563	3937	6669	144	838	1924	128	4	16.769
	JUMLAH		3.906	27.536	34.163	83.310	101.833	1.439	7.921	16.547	761	20	277.436

*Sumber: Kompilasi data BPS dan data pemetaan potensi pemuda Kabupaten Sukoharjo, 2021*

Dari data tersebut di atas, kita lihat bahwa tingkat pendidikan pemuda di Kabupaten Sukoharjo tertinggi didominasi oleh lulusan SLTA yaitu 101.833 jiwa dibandingkan dengan seluruh jumlah pemuda (277.436 jiwa), atau 36,71% dari jumlah pemudanya. Disusul dengan lulusan SLTP sejumlah 83.310 jiwa atau 30.03%.

Berikut adalah grafik perbandingan tingkat pendidikan pemuda dan pemudi di setiap jenjang pendidikan.



**Gambar 4-1 Grafik perbandingan tingkat pendidikan pemuda dan pemudi di setiap jenjang pendidikan**

*Sumber: Kompilasi data BPS dan data pemetaan potensi pemuda Kabupaten Sukoharjo, 2021*

Dalam domain pendidikan, angka rata-rata lama sekolah merupakan salah satu aspek penunjang bagi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tabel berikut ini, Rata-rata lama sekolah (RLS) Tahun, di Kabupaten Sukoharjo relative mengalami kenaikan. Pada tahun 2018, RLS berada pada angka 8,84 tahun, 2019 naik menjadi 9,10 tahun dan pada tahun 2020, RLS Kabupaten Sukoharjo naik menjadi 9,34 tahun.

**Tabel 4-3 Rata-rata lama sekolah dalam tabel IPM Kabupaten Sukoharjo**

Indikator IPM	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sukoharjo		
	2019	2020	2021
Angka Harapan Hidup saat Lahir - AHH (Tahun)	77,55	77,65	77,73
Harapan Lama Sekolah - HLS (Tahun)	13,82	13,83	13,84
Rata-rata Lama Sekolah - RLS (Tahun)	9,10	9,34	9,35
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribuan Rupiah)	11.557	11.325	11.428
IPM	76,84	76,98	77,13

*Sumber: Kompilasi data BPS Kabupaten Sukoharjo, 2022*

Sementara itu ditinjau dari Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Sukoharjo, yang mana APK merupakan gambaran akan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah.

**Tabel 4-4 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Sukoharjo**

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Sukoharjo		
	2019	2020	2021
<b>Sekolah Dasar (SD)</b>	103.99	102.33	97.53
<b>Sekolah Menengah Pertama (SMP)</b>	103.69	101.77	81.59
<b>Sekolah Menengah Atas (SMA)</b>	81.17	83.41	63.26
<b>Perguruan Tinggi (PT)</b>	-	-	32,43

Sumber: Kompilasi data BPS, 2021

APK Sekolah menengah, yaitu persentase siswa di tingkat SMP dan SMA dalam kelompok usia 13-18 tahun. APK Sekolah menengah Kabupaten Sukoharjo berdasarkan data di atas, pada jenjang SMP sejak 2021 mengalami penurunan yang cukup drastis dibandingkan dengan tahun sebelumnya 101,77 menjadi 81,59 pada tahun 2021. Sedangkan APK pada jenjang SMA pada tahun 2020 nilainya sebesar 83,41 mengalami penurunan yang sangat drastis mencapai angka 63,26.

Terkait dengan APK perguruan tinggi Kabupaten Sukoharjo, data terakhir yang dapat dihimpun adalah data Statistik pendidikan, dimana pada tahun 2021 adalah 32,43.

#### 4.2.1.1 Skor sub indeks dan Nilai Indeks Domain Pendidikan

Dari data diatas, dilakukan perhitungan terhadap skor sub indeks dan nilai indeks domain pendidikan. Terdapat tiga indikator utama yaitu RLS, APK sekolah menengah dan APK Perguruan tinggi.

Batas maksimum RLS yang ditargetkan dalam ketentuan IPP adalah 15, sedangkan di Kabupaten Sukoharjo sendiri, IPP mencapai angka 9,34. Terkait dengan nilai APK baik sekolah menengah maupun perguruan tinggi, secara berturut-turut 92,51% dan 53,87% dari target batas maksimum sebesar 100%.

No	Indikator	Batas Minimum	Batas Maksimum	Nilai Tahun 2020	Nilai Tahun 2021
<b>Domain Pendidikan</b>					
X1	Rata-rata lama sekolah	0	15 (target)	9,34	9,35
X2	APK sekolah menengah (Nilai rata APK Menengah)	0	100 (target)	92,51	72,45

X3	APK perguruan tinggi	0	100 (target)	32,43
----	----------------------	---	--------------	-------

Sumber: Tim Penyusun, 2022

Oleh karenanya, dilakukan perhitungan dimana dari skor sub indeks yang ada, diperoleh nilai domain dari Pendidikan adalah 62,05.

Adapun perhitungan secara detail adalah sebagai berikut:

**Tabel 4-5 Nilai Indeks Domain Pendidikan Tahun 2022**

No	Indikator	Batas Min	Batas Maks	Nilai Indikator	Persamaan 1	Persamaan 2	Nilai Transformasi	Nilai Domain
<b>Domain Pendidikan</b>								
1	Rata-rata lama sekolah	0	15	9,35	6,23	(0,55)	6,23	
2	APK sekolah menengah	0	100	72,45	7,25	(6,25)	7,25	
3	APK perguruan tinggi	0	100	32,43	3,24	(2,24)	3,24	
Nilai Domain 1								<b>55,74</b>

Sumber: Tim Penyusun, 2022

### 4.3 DOMAIN KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN

Dalam domain Kesehatan dan Kesejahteraan terdapat empat komponen yang menjadi dasar penilaian. Komponen pertama adalah Angka Kesakitan Pemuda yaitu Proporsi pemuda berusia 16–30 tahun yang mengalami masalah kesehatan sehingga mengganggu kegiatan/aktivitas sehari-hari selama satu bulan terakhir dalam kelompok usia 16–30 tahun, komponen kedua adalah Persentase pemuda korban kejahatan yaitu Proporsi pemuda berusia 16-30 tahun yang menjadi korban tindak kejahatan dalam setahun terakhir dalam kelompok usia 16–30 tahun, komponen ketiga adalah persentase pemuda yang merokok yaitu Persentase pemuda berusia 16–30 tahun yang pernah merokok dalam sebulan terakhir dalam kelompok usia 16–30 tahun dan komponen keempat yaitu Persentase remaja perempuan berusia 15–18 tahun yang sedang hamil dalam kelompok perempuan pernah kawin berusia 15–18 tahun.

#### 4.3.1 Angka kesakitan pemuda

Berdasarkan data Profil Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, Angka Kesakitan ditinjau dari Kejadian penyakit menular di Kabupaten Sukoharjo sangat dipengaruhi oleh perilaku penduduk dan iklim. Dari perilaku dan iklim berdampak pada kondisi lingkungan masing masing wilayah desa kelurahan yang hal ini sangat mempengaruhi kejadian penyakit tular vektor.

Sesuai dengan tupoksinya, data tersebut dikelola oleh seksi P2PM menangani penyakit menular langsung dan penyakit menular berbasis binatang atau zoonosis.

Data kejadian penyakit menular digambarkan dalam tabel berikut :

**Tabel 4-6 Angka Kesakitan Penduduk Kab. Sukoharjo, 2019 (Penyakit menular)**

No	Penyakit	Tahun dan Jumlah Penderita/Kejadian				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Demam Berdarah (DBD)	315	558	115	35	317
2	Chikungunya	132	601	84	0	31
3	Malaria	1	1	4	2	3
4	Leptospirosis	1	9	3	17	8
5	Avian Flu/ Flu Burung	0	0	0	0	0
6	Antraks	0	0	0	0	0
7	Filaria	0	0	0	0	2
8	Tuberculosis	479	455	475	604	744
10	Diare	20.352	18.941	15.074	17.196	4.686
11	Pneumonia Balita	281	556	933	991	1315
12	Kusta	20	16	25	17	20
13	HIV (kasus baru)	62	47	45	17	47
14	AIDS (Kasus Baru)	12	62	49	45	27

No	Penyakit	Tahun dan Jumlah Penderita/Kejadian				
		2015	2016	2017	2018	2019
15	IMS (Inf.Men. Seksual)	74	31	88	91	105
16	Difteri	-	-	-	-	-
17	GHPR (Gigitan Hewan)					34
	Penular Rabies)					
	Angka kesakitan Kabupaten Sukoharjo (penyakit menular)					7339
	Rasionalisasi Angka kesakitan pemuda berdasarkan jenis penyakit menular					0,80

Sumber: Buku Profil Kesehatan Kab. Sukoharjo, 2020

Salah satu jenis penyakit yang cukup memiliki dampak besar terhadap angka kesakitan adalah Demam Berdarah. Jumlah penderita DBD pada tahun 2019 meningkat dibandingkan tahun 2018. Berturut-turut kejadian kesakitan DBD tahun 2019 sebanyak 317 kasus, tahun 2018 sebanyak 35 kasus, tahun 2017 sebanyak 115 kasus, tahun 2016 sebanyak 558 kasus, tahun 2015 sebanyak 315 kasus yang tersebar di 12 kecamatan. Angka kesakitan DBD tahun 2019 adalah 35 per 100.000 penduduk, sedangkan tahun 2018 adalah 3,9 per 100.000 penduduk, tahun 2017 adalah 35,4 per 100.000 penduduk, tahun 2016 sebesar 62,4 per 100.000 penduduk dan tahun 2015 adalah 35,4 per 100.000 penduduk.

Dilihat dari cakupan pelayanan kesehatan, seluruh penderita DBD yang terdiagnosis dan berobat di sarana pelayanan kesehatan sudah mendapatkan pelayanan kesehatan atau 100%. Apabila dilihat dari target SPM, target ini sudah terpenuhi.

Penyakit malaria juga merupakan salah satu jenis penyakit menular yang mempengaruhi angka kesakitan. Di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2019 terdapat 3 kasus malaria. Sedangkan pada tahun 2018 terdapat kasus malaria sejumlah 2 penderita, tahun 2017 sejumlah 4 penderita, tahun 2016 ditemukan kasus suspek malaria sebanyak 5 penderita dengan 1 terbukti positif, dan tahun 2015 terdapat suspek sebanyak 3 penderita dengan 1 positif. Sukoharjo merupakan daerah bebas penularan malaria, sehingga adanya kasus-kasus positif merupakan kasus impor dengan spot/lokus utama Asrama Koppasus Kartasura dan Brigif 413 Mojolaban yang memiliki personil dengan mobilitas tinggi ke wilayah endemis malaria.

Selain angka kesakitan berdasarkan jenis penyakit menular, juga terdapat angka kesakitan penyakit tidak menular. PTM merupakan penyakit yang seringkali tidak terdeteksi karena tidak bergejala dan tidak ada keluhan. Biasanya ditemukan dalam tahap lanjut sehingga sulit disembuhkan dan berakhir dengan kecacatan atau kematian dini. Keadaan ini menimbulkan beban pembiayaan yang besar bagi keluarga.

Hipertensi dan DM termasuk dalam kategori penyakit antara, artinya apabila tidak dilakukan upaya-upaya pengendalian akan berlanjut ke penyakit-penyakit seperti stroke, penyakit gagal ginjal, penyakit jantung koroner, dll.

Penyakit Tidak Menular (PTM) terjadi akibat berbagai faktor risiko, seperti merokok, diet tidak sehat, kurang aktivitas fisik, dan konsumsi minuman beralkohol. Faktor risiko tersebut akan menyebabkan terjadinya perubahan fisiologis di dalam tubuh manusia, sehingga menjadi faktor risiko antara lain tekanan darah meningkat, gula darah meningkat, kolesterol darah meningkat, dan obesitas.

Berikut adalah data-data kasus PTM yang ditangani di Kabupaten Sukoharjo :

**Tabel 4-7 Angka Kesakitan penduduk Kab. Sukoharjo, 2019 (Penyakit tidak menular)**

No	Indikator PTM	Jumlah Kasus
2	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	85.418
3	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	18.596
4	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	851
	Jumlah	104.865

Berdasarkan hasil pengukuran faktor risiko PTM pada usia produktif pada Tahun 2020, lima besar faktor risiko PTM yang ditemukan antara lain:

- Diet tidak seimbang : 30%
- Kurang aktivitas fisik : 26,5 %
- Obesitas : 23,9 %
- Kholesterol tinggi : 22,6 %
- Riwayat keluarga PTM : 21,8 %

Selain itu, PTM yang cukup berdampak adalah hipertensi. Nama lain dari Hipertensi yaitu tekanan darah tinggi. Hipertensi adalah kondisi dimana tekanan darah lebih tinggi dari 140/90 mmHg. Berdasarkan laporan tahun 2019 dari hasil jumlah yang dilakukan pengukuran tekanan darah penduduk  $\geq 15$  tahun sebanyak 517.881 (89,69%) terdapat Hipertensi sebanyak 85.418 (32,63%). Hipertensi umumnya disebabkan oleh berbagai kondisi seperti penyakit ginjal, kehamilannya, penyakit kelenjar tiroid, kecanduan alkohol, penyalahgunaan Napza, kelainan bawaan.

Selanjutnya terdapat PTM Diabetes Mellitus. Diabetes Melitus adalah penyakit yang berlangsung lama dan kronis serta ditandai dengan kadar gula darah tinggi diatas nilai normal. Jika diabetes tidak dikontrol dengan baik dapat menyebabkan berbagai komplikasi yang membahayakan nyawa penderita. Diabetes dibedakan menjadi tipe 1 dan tipe 2. Diabetes tipe 1 terjadi karena system kekebalan tubuh penderita menyerang dan menghancurkan sel pancreas yang memproduksi insulin. Diabetes tipe 2 merupakan

jenis diabetes yang lebih sering terjadi. Disebabkan oleh sel tubuh yang menjadi kurang sensitif terhadap insulin.

Berdasarkan laporan puskesmas pada tahun 2019 kasus Diabetes Melitus sebanyak 18.596 kasus yang ditemukan di puskesmas, dengan kasus terbanyak di Puskesmas Grogol 3.424 kasus (18,41%) dan paling sedikit di Puskesmas Weru 591 kasus (3,18%). Jumlah kasus yang ditemukan di puskesmas meliputi pasien yang berkunjung ke puskesmas dan kunjungan ke posbindu.

Selain itu, angka kesakitan pemuda juga dapat dilihat dari beberapa data berikut yang berhasil dihimpun dari dokumen laporan Riskesdas Jawa Tengah. Diharapkan bahwa data berikut ini dapat meningkatkan keragaman data rujukan angka kesakitan pemuda di Kabupaten Sukoharjo.

**Tabel 4-8 Angka Kesakitan Ditinjau Dari Penyakit Lainnya**

Proporsi ketidak mampuan (kemandirian)	1.353
Kesehatan Gigi dan Mulut	2.236
Prevalensi Gangguan Mental Emosional	1.767
Proporsi Cedera yang Mengakibatkan Kegiatan Sehari-hari Terganggu	2.019
<b>Jumlah</b>	<b>7.375</b>

Dari data -data yang telah disajikan di atas diperoleh angka Kesakitan penduduk keseluruhan di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan jenis penyakit menular adalah 7.339, Angka Kesakitan Penduduk keseluruhan di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan jenis PTM adalah 104.865, dan angka kesakitan ditinjau dari jenis-jenis penyakit lainya adalah 7.374 kasus. Sehingga secara keseluruhan dari kedua kategori tersebut diperoleh angka kesakitan penduduk sebesar 119.575 jiwa

Proporsi jumlah penduduk usia pemuda di Kabupaten Sukoharjo berkisar 22,35% dari total jumlah penduduk. Sehingga data di atas dirasionalisasi untuk memenuhi Angka Kesakitan Pemuda, maka diperoleh jumlah indikatif usia pemuda sebesar 26.721 jiwa yang mengalami kesakitan.

Agar mendapatkan data yang lebih objektif maka, jumlah angka kesakitan pemuda sebesar 26.721 dihitung atau dibandingkan dengan populasi pemuda saja (203.714 jiwa) sehingga diperoleh nilai Angka kesakitan pemuda sebesar 13,11% terhadap jumlah penduduk usia pemuda.

#### **4.3.2 Persentase pemuda korban kejahatan**

Data persentase pemuda korban kejahatan merupakan data yang menunjukkan kejadian kejahatan/criminal terhadap pemuda di Kabupaten Sukoharjo. Saat ini, data yang tersaji di website BPS Kabupaten Sukoharjo tahun 2021 hanya menampilkan jumlah data tahun 2015 hingga tahun 2017 sehingga dalam hal ini diperlukan upaya untuk memperbaharui data yang ada.

Dalam perhitungan IPP, digunakan data BPS di bawah ini sebagai Langkah indikatif untuk memperoleh dasar referensi terkait dengan data persentase pemuda korban kejahatan.

**Tabel 4-9 Data persentase pemuda korban kejahatan**

Jenis Kejahatan	Banyaknya Kasus Kriminalitas menurut Jenisnya						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pencurian	151	160	145	152	159	166	173
Perampokan	8	8	6	7	9	10	11
Penipuan	77	50	58	62	65	69	73
Perjudian	18	23	15	19	22	26	30
Perkosaan	2	1	0	1	2	3	4
Pembunuhan	10	0	0	3	7	10	13
Obat Terlarang	0	30	29	20	10	1	-8
Perkelahian dan Penganiayaan	72	44	38	51	65	78	91
Pencucian Uang	0	0	0	0	0	0	0
Perdagangan Manusia	1	0	0	0	1	1	1
Kekerasan Psikis							37
Kekerasan Penelantaran							0
Kekerasan Eksploitasi							9
Kekerasan Seksual							17
Lainnya	52	27	17	32	47	62	40
<b>Jumlah</b>	<b>391</b>	<b>343</b>	<b>308</b>	<b>347</b>	<b>387</b>	<b>426</b>	<b>491</b>

*Sumber: Kompilasi Data BPS Kabupaten Sukoharjo, 2022 dan Data Rekap Siga DP3AP2KB Kabupaten Sukoharjo, diakses pada September 2022*

Dari data persentase pemuda korban kejahatan yang telah disajikan di atas diperoleh angka 491 tindak kejahatan pada tahun terakhir data. Data yang tersedia bersifat multi-temporel yaitu data BPS tahun terakhir adalah 2017 sedangkan data DP3P2KB tahun terakhir adalah tahun 2021.

Agar diperoleh satu bentuk rasionalisasi yang mengerucut hanya pada data usia pemuda maka dilakukan upaya perhitungan proporsi. Proporsi jumlah penduduk usia pemuda di Kabupaten Sukoharjo berkisar 203.714 jiwa atau sekitar 22,35% dari total jumlah penduduk. Sehingga dari data di atas diperoleh perkiraan jumlah korban kejahatan usia pemuda adalah sekitar 110 jiwa pada tahun 2021.

Oleh karena itu, dari jumlah korban tindak kejahatan usia pemuda dibandingkan dengan data jumlah penduduk usia pemuda sebesar 203.714 jiwa, maka diperoleh nilai persentase pemuda korban kejahatan sebesar **0,05%**. Perlu digaris bawahi bahwa nilai tersebut merupakan nilai indikatif, dibutuhkan pendataan yang lebih terperinci selama kurun waktu 1 tahun penuh agar dapat dipetakan berapa jumlah riil usia pemuda yang mengalami tindak kejahatan.

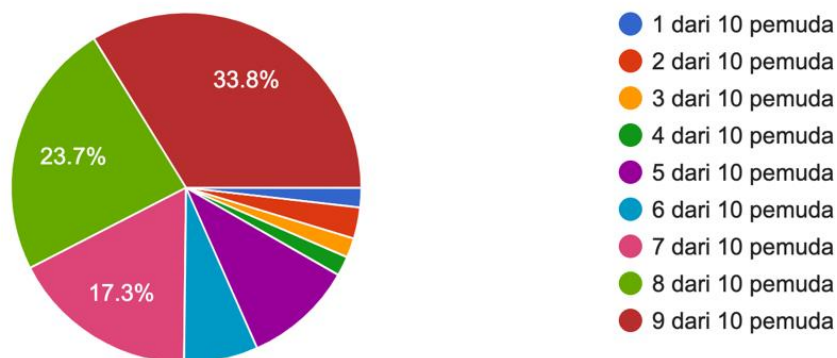
### 4.3.3 Persentase pemuda yang merokok

Merokok, aktivitas membakar tembakau kemudian menghisap asapnya, baik menggunakan rokok maupun pipa. Terdapat 2 (dua) cara merokok yang umum dilakukan, yaitu pertama menghisap lalu menelan asap rokok ke dalam paru-paru dan dihembuskan; kedua hanya menghisap sampai mulut lalu dihembuskan melalui mulut atau hidung.

Perokok terdiri dari berbagai kalangan usia, baik tua maupun muda, termasuk usia anak sekolah. Banyak anak yang belum cukup umur sudah mencoba dan terbiasa untuk mengkonsumsi rokok. Hal ini diakibatkan oleh dorongan lingkungan sekitar mereka yang menjadi perokok aktif sehingga menimbulkan rasa ingin mencoba untuk merokok.

Persentase pemuda yang merokok adalah Persentase pemuda berusia 16–30 tahun yang pernah merokok dalam sebulan terakhir dalam kelompok usia 16–30 tahun. Saat ini data-data yang tersedia terkait dengan persentase pemuda yang merokok adalah data hasil Laporan Riskesdas Provinsi Jawa Tengah yang dilakukan pada tahun 2018 lalu. Data tersebut kemudian di corss-check kembali dengan data BPS dimana, data terbaru yang dimuat oleh BPS adalah data persentase pemuda merokok menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada tahun 2019.

Selain data di atas, juga dilakukan upaya penggalian kondisi di lapangan dengan menerapkan penyebaran kuesioner. Dari data yang terhimpun secara empiris, pada dasarnya kebiasaan merokok remaja di Kabupaten Sukoharjo cukup tinggi yaitu sekitar 8 sampai dengan 9 remaja per 10 remaja.



**Gambar 4-2 Prosentase Remaja Merokok di Kabupaten Sukoharjo Berdasarkan Hasil Kuesioner Tahun 2022**

*Sumber: Tim Penyusun, 2022*

Namun data kuesioner di atas perlu untuk dikonfirmasi atau dikombinasikan dengan data sekunder yang berasal dari dinas terkait yang relevan. Berikut ini merupakan persentase pemuda merokok menurut Kabupten/kota di Jawa Tengah yang mana merupakan data sensus pada tahun 2020.

**Tabel 4-10 Persentase pemuda merokok menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2020**

<b>Kabupaten/ Kota Regency/ Municipality</b>	<b>15-24</b>	<b>25-34</b>	<b>35-44</b>	<b>45-54</b>	<b>55-64</b>	<b>65+</b>	
<b>1</b>	Cilacap	20,65	34,62	33,90	32,12	36,41	28,48
<b>2</b>	Banyumas	19,27	32,98	34,68	30,50	30,31	27,59
<b>3</b>	Purbalingga	25,57	37,30	37,42	31,52	31,58	30,33
<b>4</b>	Banjarnegara	31,36	38,65	35,46	31,72	40,63	32,06
<b>5</b>	Kebumen	21,00	36,12	34,81	33,57	30,53	24,74
<b>6</b>	Purworejo	23,03	34,14	29,61	31,18	34,80	25,53
<b>7</b>	Wonosobo	33,61	38,91	36,52	36,79	33,49	35,23
<b>8</b>	Magelang	24,76	35,08	33,95	29,28	29,08	23,23
<b>9</b>	Boyolali	19,12	32,05	32,55	26,13	26,34	15,95
<b>10</b>	Klaten	16,02	29,19	32,07	22,55	17,23	14,72
<b>11</b>	Sukoharjo	11,00	25,88	28,08	23,21	18,79	15,95
<b>12</b>	Wonogiri	19,08	31,42	31,43	29,50	24,49	24,20
<b>13</b>	Karanganyar	14,89	29,76	29,86	23,67	24,95	19,09
<b>14</b>	Sragen	13,21	29,35	34,29	21,56	20,12	19,82
<b>15</b>	Grobogan	23,35	34,31	33,74	29,03	27,57	18,95
<b>16</b>	Blora	19,09	37,38	33,39	32,21	29,38	27,56
<b>17</b>	Rembang	19,22	33,50	29,56	24,60	28,91	16,65
<b>18</b>	Pati	18,04	29,68	30,64	26,34	25,03	11,41
<b>19</b>	Kudus	16,47	27,65	25,15	27,29	20,74	14,01
<b>20</b>	Jepara	16,12	30,20	29,21	29,00	24,90	18,18
<b>21</b>	Demak	22,77	33,71	32,61	26,77	29,35	18,11
<b>22</b>	Semarang	19,78	30,82	33,24	34,57	25,89	21,07
<b>23</b>	Temanggung	29,60	38,70	37,27	36,31	33,97	26,89
<b>24</b>	Kendal	19,49	31,54	33,69	33,02	31,31	16,46
<b>25</b>	Batang	23,10	33,31	31,32	28,99	32,52	21,50
<b>26</b>	Pekalongan	22,33	32,28	27,79	31,19	25,44	16,39
<b>27</b>	Pemalang	18,62	29,98	32,67	32,06	33,34	25,07
<b>28</b>	Tegal	21,01	33,13	30,07	30,56	30,65	19,56
<b>29</b>	Brebes	18,80	39,36	35,47	33,35	35,22	26,84
<b>Kota/ Municipality</b>							
<b>30</b>	Magelang	21,33	37,92	31,31	24,39	24,08	9,33
<b>31</b>	Surakarta	14,90	24,18	28,93	23,42	19,86	10,94
<b>32</b>	Salatiga	20,50	36,31	29,94	24,90	24,95	10,83
<b>33</b>	Semarang	15,19	26,04	23,47	23,40	22,67	11,26
<b>34</b>	Pekalongan	13,23	28,50	28,15	22,26	20,67	12,87

Kabupaten/ Kota Regency/ Municipality		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+
<b>35</b>	Tegal	15,93	31,78	30,70	30,47	24,62	8,84
<b>Jawa Tengah</b>		19,92	32,56	31,97	29,19	28,39	21,44

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

Menimbang bahwa usia pemuda yang diprasyarkan dalam perhitungan IPP adalah usia antara 16-30 tahun, maka perlu dilakukan rasionalisasi terhadap ketersediaan data yang ada. Apabila dihitung secara kasar, maka jumlah total pemuda yang merokok dalam rentang usia 15-34 tahun adalah sebanyak 36,88%. Jika ditinjau dari jumlah populasi usia 15-34 tahun maka terdapat 20 unit usia populasi, sehingga apabila direrata maka masing-masing populasi mewakili 1,84%, maka apabila rasionalisasi hanya pada rentang usia 16-30 tahun diperoleh angka persentase indikatif sebesar 27,66%.

#### 4.3.4 Persentase remaja perempuan yang sedang hamil

Persentase remaja perempuan yang sedang hamil didefinisikan dalam konteks pengukuran IPP sebagai remaja perempuan yang berusia 15-18 Tahun yang sedang hamil dalam kelompok perempuan yang pernah kawin berusia 15-18 Tahun.

Apabila ditinjau dari keterangan di atas, maka dalam menghitung persentase remaja perempuan yang sedang hamil perlu dilakukan *cross check* terhadap data angka perkawinan anak usia dini pemuda perempuan .

Data profil Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, 2022, diperoleh data terkait dengan remaja perempuan usia 15-19 tahun yang terdata sedang mengalami kehamilan adalah 93 jiwa.

**Tabel 4-11 Prosentase Perempuan yang Sedang Hamil**

No	PUSKESMAS	UMUR
		15-19
1	Weru	6
2	Bulu	1
3	Tawang Sari	6
4	Sukoharjo	7
5	Nguter	3
6	Bendosari	4
7	Polokarto	10
8	Mojolaban	7
9	Grogol	12
10	Baki	17
11	Gatak	9
12	Kartasura	11
	TOTAL	93

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Sukoharjo, 2022

Sementara itu, data angka perkawinan usia dini remaja perempuan <91 Tahun mencapai jumlah 96 jiwa, sebagai berikut :

**Tabel 4-12 Data Perkawinan di Kabupaten Sukoharjo Berdasarkan Umur Tahun 2021**

No	Kecamatan	Jumlah Nikah	Usia Pengantin					
			Laki-Laki			Wanita		
			-19	19-21	21+	-19	19-21	21+
1	Baki	500	4	32	464	16	44	440
2	Bendosari	425	0	28	397	4	154	267
3	Bulu	284	0	5	279	1	7	276
4	Gatak	343	6	12	325	12	34	297
5	Grogol	725	9	25	691	13	72	640
6	Kartasura	621	7	119	495	8	136	477
7	Mojolaban	582	4	21	557	15	57	510
8	Nguter	387	0	9	378	0	21	366
9	Polokarto	539	3	118	418	10	153	376
10	Sukoharjo	589	4	111	474	8	127	454
11	Tawang Sari	371	1	12	358	5	49	317
12	Weru	387	3	52	332	4	97	286
Jumlah		5.753	41	544	5.168	96	951	4.706

Sumber: Bima Islam, Kementerian Agama, Kabupaten Sukoharjo, 2022

Oleh karena itu apabila mengikuti definisi remaja perempuan yang berusia 15-18 Tahun yang sedang hamil dalam kelompok perempuan yang pernah kawin berusia 15-18 Tahun, maka diperoleh angka persentase sebesar 96,8%.

Perlu digaris bawahi bahwa data tersebut belum sepenuhnya menunjukkan kategori usia yang dipersyaratkan dalam penghitungan IPP, yaitu usia 16-30 tahun. Namun, karena keterbatasan data terkait dengan usia remaja perempuan yang sedang hamil, maka data tersebut dijadikan sebagai rujukan prinsipil.

Adapun skor sub indeks dan nilai indeks domain Kesehatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4-13 Nilai Indeks Domain Kesehatan Tahun 2022**

No	Indikator	Batas Min	Batas Maks	Nilai Indikator	Persamaan 1	Persamaan 2	Nilai Transformasi	Nilai Domain
Domain Kesehatan dan Kesejahteraan								
4	Angka kesakitan pemuda	0	20	13,11	6,56	(5,56)	5,56	
5	Persentase pemuda korban kejahatan	0	3	0,05	0,17	0,83	0,83	
6	Persentase pemuda yang merokok	0	36	27,66	7,68	(6,68)	6,68	
7	Persentase remaja perempuan yang sedang hamil	0	45	45	10,00	(9,00)	9,00	
<b>Nilai Domain 2</b>								<b>55,18</b>

Sumber: Tim Penyusun, 2022

## 4.4 DOMAIN KETENAGAKERJAAN DAN KESEMPATAN KERJA

### 4.4.1 Persentase pemuda bekerja dan berwirausaha

Dalam domain Lapangan dan Kesempatan Kerja sebagai penyusun IPP, fokus diarahkan pada penghitungan Persentase penduduk berusia 16–30 tahun yang bekerja dengan status berusaha dan jenis pekerjaan kerah putih (tenaga profesional atau teknisi, kepemimpinan atau ketatalaksanaan, pejabat pelaksana, atau tenaga tata usaha) yang dibagi dengan jumlah pemuda berusia 16–30 tahun.

Dari data di bawah ini, pada tahun 2020 diperoleh data bahwa jumlah pemuda yang bekerja baik berprofesi kerah putih maupun pekerja kerah biru adalah 139.971 jiwa.

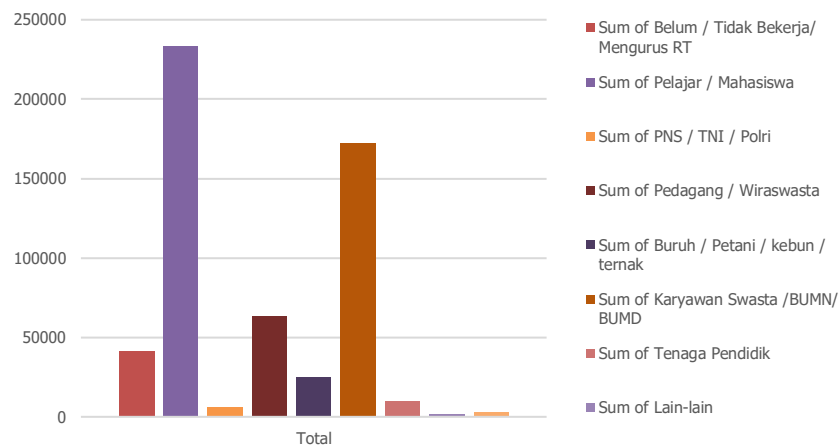
**Tabel 4-14 Penggolongan Pemuda Berdasarkan Pekerjaan di Kabupaten Sukoharjo**

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN	JENIS PEKERJAAN									Jumlah
			Belum / Tidak Bekerja/ Mengurus RT	Pelajar / Mahasiswa	PNS / TNI / Polri	Pedagang / Wiraswasta	Buruh / Petani / kebun / ternak	Karyawan Swasta /BUMN/ BUMD	Tenaga Pendidik	Tenaga Kesehatan	Lain -lain	
1	WERU	L	605	3.372	60	1.589	1.130	1.957	51	10	21	8.795
		P	1.647	2.904	27	1.317	643	1.751	128	52	19	8.488
2	BULU	L	238	2.485	29	1.213	78	1.984	21	5	21	6.074
		P	530	2.105	15	989	41	1.653	42	29	16	5.420
3	TAWANGSARI	L	267	3.954	51	1.338	779	2.431	51	8	20	8.899
		P	1.188	3.388	32	935	402	2.280	123	57	10	8.415
4	SUKOHARJO	L	378	7.122	255	1.621	1.286	4.308	110	38	21	15.139
		P	1.995	6.413	145	1.212	372	4.321	274	156	12	14.900
5	NGUTER	L	277	3.825	56	2.454	127	1.659	28	9	45	8.480
		P	675	3.316	33	2.226	75	1.601	66	64	33	8.089
6	BENDOSARI	L	343	4.099	148	2.577	296	2.223	48	14	32	9.780
		P	1.136	3.799	103	1.856	125	2.182	153	90	19	9.463
7	POLOKARTO	L	257	5.845	61	1.493	1.040	4.410	94	7	137	13.344
		P	1.569	5.149	35	1.136	460	2.592	2.027	84	58	13.110
8	MOJOLABAN	L	192	5.946	626	1.263	625	5.534	84	28	30	14.328
		P	1.234	5.488	93	959	262	5.607	183	160	16	14.002
9	GROGOL	L	584	8.692	129	1.426	689	7.969	100	31	34	19.654
		P	2.031	7.747	63	1.025	267	7.371	248	114	14	18.880

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN	JENIS PEKERJAAN									Jumlah
			Belum / Tidak Bekerja/ Mengurus RT	Pelajar / Mahasiswa	PNS / TNI / Polri	Pedagang / Wiraswasta	Buruh / Petani / kebun / ternak	Karyawan Swasta /BUMN/ BUMD	Tenaga Pendidik	Tenaga Kesehatan	Lain -lain	
<b>10</b>	BAKI	L	314	5.099	81	1.322	1.041	3.315	71	22	54	11.319
		P	1.150	4.348	46	1.025	452	3.566	144	86	43	10.860
<b>11</b>	GATAK	L	362	3.473	82	525	1.033	2.686	42	16	39	8.258
		P	1.153	3.012	46	364	304	2.823	101	66	22	7.891
<b>12</b>	KARTASURA	L	469	7.862	557	1.081	554	6.328	152	35	41	17.079
		P	2.195	7.233	153	768	168	5.634	375	222	21	16.769
<b>JUMLAH</b>		L	4.286	61.774	2.135	17.902	8.678	44.804	852	223	495	141.149
		P	16.503	54.902	791	13.812	3.571	41.381	3.864	1.180	283	136.287
<b>TOTAL</b>		L+P	20.789	116.676	2.926	31.714	12.249	86.185	4.716	1.403	778	277.436

Sumber: Kompilasi Data BPS dan Dokumen Pemetaan Potensi Pemuda, 2021.

Sesuai dari data yang tersaji tersebut di atas, bisa kita simpulkan bahwa 116.676 jiwa pemuda Kabupaten Sukoharjo masih berstatus pelajar / mahasiswa, atau 42,06 % dari seluruh jumlah pemuda masih menempuh pendidikan. Sedangkan prosentase terbesar kedua adalah sebesar 31,06 % atau sejumlah 86.185 pemuda sudah bekerja sebagai karyawan di perusahaan swasta 31.714 orang pemuda atau 11,43 % memilih untuk berdagang maupun berwiraswasta.



**Gambar 4-3 Grafik Pemuda berdasarkan status pekerjaan tahun 2020**

*Sumber: Kompilasi Data BPS dan Dokumen Pemetaan Potensi Pemuda, 2021.*

Data tersebut bisa dimaknai pula bahwa pendidikan masih dipandang menjadi hal yang paling penting bagi para pemuda, sehingga mengambil porsi paling banyak dari keseluruhan jumlah pemuda (42,06 %) menempuh serta melanjutkan tingkat pendidikannya. Sebagian lagi mencoba bekerja sebagai karyawan swasta (31,06 %), dan yang 11,43 % memulai berwiraswasta maupun berdagang. Disamping itu masih terdapat 20.789 pemuda atau 7,49% pemuda yang tidak bekerja atau mengurus rumah tangga.

Sehingga, sesuai dengan ketentuan penyusunan dokumen IPP, bahwa dalam domain Lapangan dan Kesempatan Kerja sebagai penyusun IPP, fokus diarahkan pada penghitungan Persentase penduduk berusia 16–30 tahun yang bekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap, atau berusaha dengan dibantu buruh tetap dan jenis pekerjaan kerah putih (tenaga profesional atau teknisi, kepemimpinan atau ketatalaksanaan, pejabat pelaksana, atau tenaga tata usaha) yang dibagi dengan jumlah pemuda berusia 16–30 tahun.

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan perhitungan IPP, maka agregat jumlah pemuda pekerja Kerah putih (Profesi wirausaha) mencapai jumlah 31.714 pemuda dari keseluruhan **203.714** pemuda atau **11,43%**.

#### 4.4.2 Skor sub indeks dan Nilai Indeks Domain Ketenagakerjaan dan Kesempatan Kerja

No	Indikator	Batas Minimum	Batas Maksimum	Data Eksisiting 2020
Domain Ketenagakerjaan dan Kesempatan kerja				
X8	Persentase pemuda wirausaha kerah putih	0	2 (target)	11,43
X9	TPT pemuda	0 (target)	28	6.93

Sumber : Tim Penyusun, 2021

### 4.5 DOMAIN PARTISIPASI DAN KEPEMIMPINAN

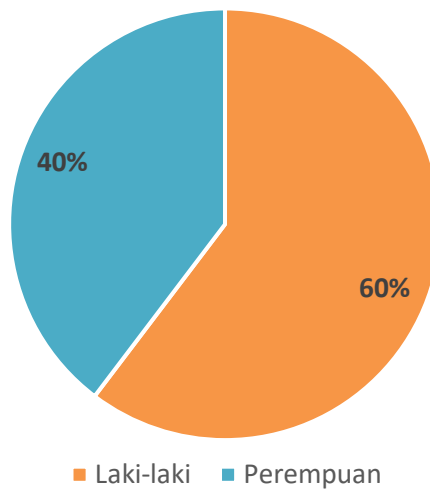
#### 4.5.1 Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan

Dalam domain Partisipasi dan Kepemimpinan, diarahkan untuk memahami tiga aspek sekaligus yaitu Persentase pemuda berusia 16–30 tahun yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir, Persentase pemuda berusia 16–30 tahun yang mengikuti kegiatan organisasi yang memiliki keanggotaan, kepengurusan, dan aturan tertentu selain di tempat kerja dan sekolah dalam tiga bulan terakhir dan Persentase pemuda berusia 16–30 tahun yang pernah mengikuti kegiatan pertemuan (rapat) di lingkungan sekitar dalam setahun terakhir dan memberikan saran/ pendapat dalam rapat tersebut.

Pembangunan pemuda sendiri dapat ditelusik melalui tiga lapisan, yakni pengembangan individu, pengembangan penghidupan, serta pengembangan partisipasi dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu yang menjadi tolok ukur pembangunan pemuda adalah partisipasi pemuda dalam aspek kemasyarakatan. Partisipasi pemuda dalam kemasyarakatan dapat dilihat dari penilaian di dalam Indek Pembangunan Pemuda (IPP) domain Partisipasi dan Kepemimpinan diantaranya : Partisipasi pemuda dalam kegiatan social kemasyarakatan, Partisipasi pemuda dalam organisasi dan Pemuda berpendapat dalam rapat kemasyarakatan.

Agar dapat mengidentifikasi persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan, maka dilakukan survey terhadap pola keterlibatan aktif pemuda dalam kegiatan organisasi.

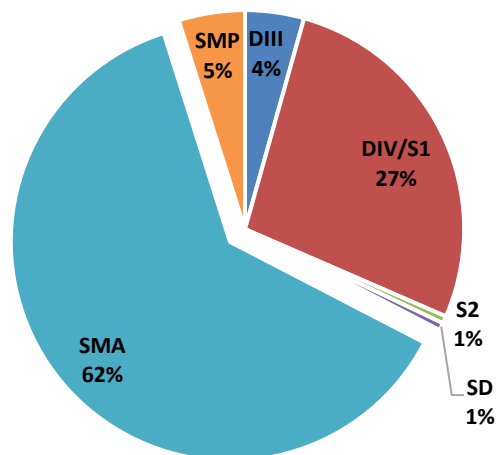
Dari segi profil anggota diketahui bahwa Sebagian besar anggota masih didominasi oleh laki-laki dengan perbandingan 60,3% terhadap 39,7% perempuan.



**Gambar 4-4 Profil Anggota OKP Berdasarkan Jenis Kelamin**

*Sumber: Survey jajak pendapat kepada OKP oleh penyusun, 2022*

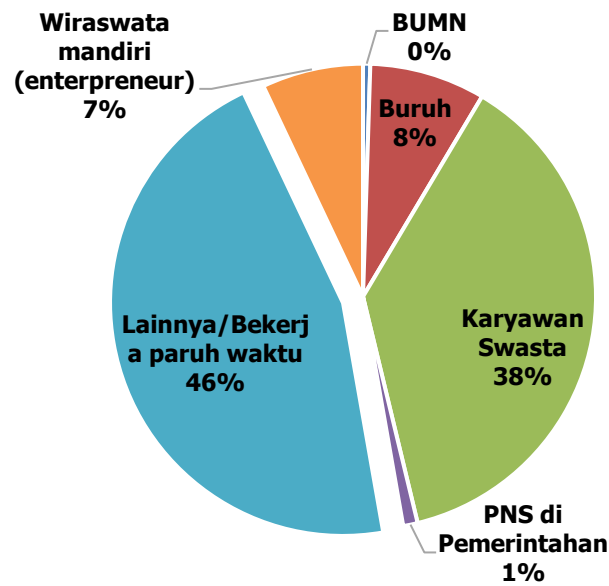
Tingkat pendidikan masing-masing dari anggota OKP juga sangat beragam. Saat ini tingkat pendidikan terakhir anggota OKP adalah SLTA/SMA yaitu sebesar 62% dan 27% adalah DIV/S1. Tentunya hal tersebut merupakan signal positif yang memperlihatkan kepedulian remaja usia SMA dalam mengikuti OKP. Berikut adalah persentase profil anggota OKP berdasarkan pendidikan.



**Gambar 4-5 Tingkat Pendidikan Anggota OKP**

*Sumber: Survey jajak pendapat kepada OKP oleh penyusun, 2022*

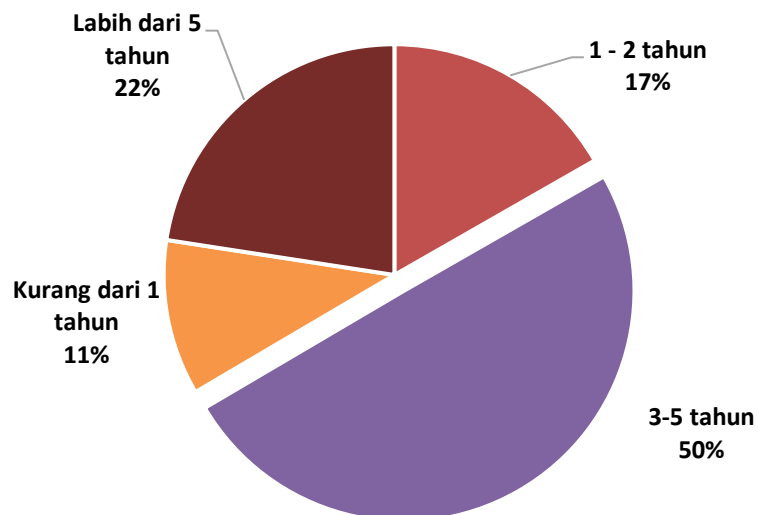
Sedangkan ditinjau dari profil jenis pekerjaan, pada dasarnya Sebagian besar dari responden atau dalam hal ini anggota OKP bekerja paruh waktu/lainnya dengan total 46%, karyawan swasta 38%, bekerja sebagai buruh 8% dan wirausaha mandiri 7%.



**Gambar 4-6 Profil Jenis Pekerjaan Anggota OKP**

*Sumber: Survey jajak pendapat kepada OKP oleh penyusun, 2022*

Dilihat dari lama/durasi berorganisasi anggota OKP saat ini, Sebagian besar sebanyak 50% responden telah berkecimpung antara 3-5 tahun terakhir sedangkan responden yang berkecimpung kurang dari 1 tahun sebesar 11%.

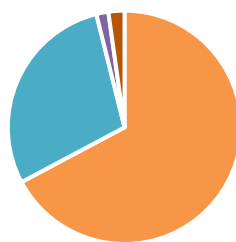
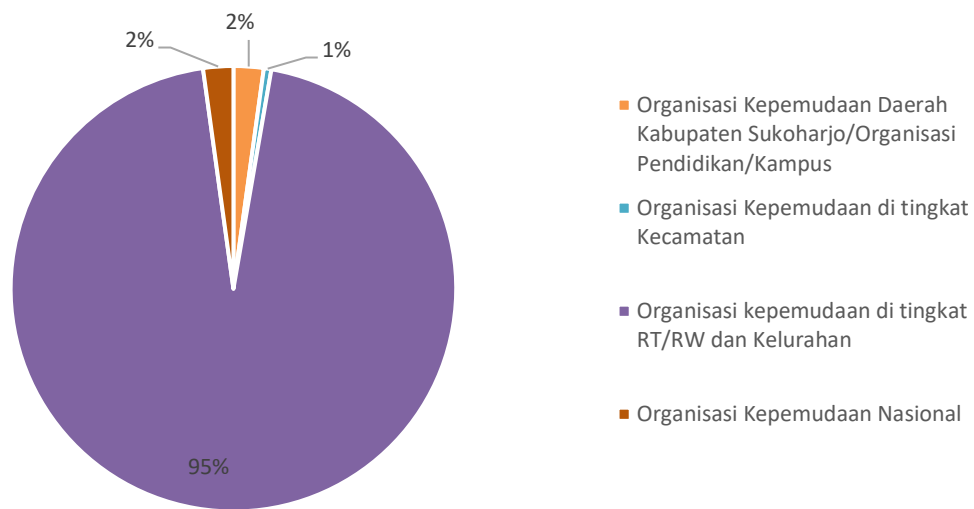


**Gambar 4-7 Rata-rata Lama Berorganisasi Anggota OKP**

*Sumber: Survey jajak pendapat kepada OKP oleh penyusun, 2022*

Sedangkan ditinjau dari keterlibatan pemuda dalam kegiatan organisasi, pada dasarnya dapat dinyatakan bahwa organisasi kepemudaan tingkat RT/RW/Desa memegang peranan penting dalam mengakomodir partisipasi aktif pemuda. Dari hasil survey

diketahui bahwa 95% pemuda mengikuti OKP di tingkat RT/RW dan Kelurahan. Hanya 2% dari pemuda yang mengikuti OKP di tingkatan perguruan tinggi dan kepemudaan nasional serta 1% organisasi tingkat kecamatan.



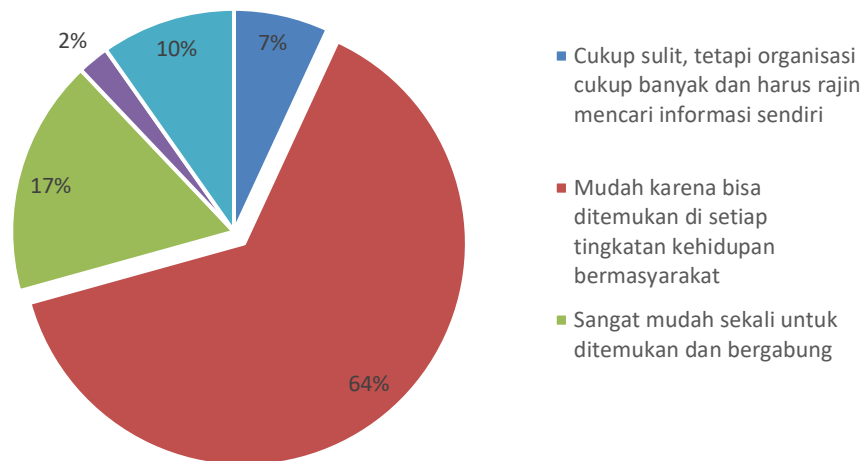
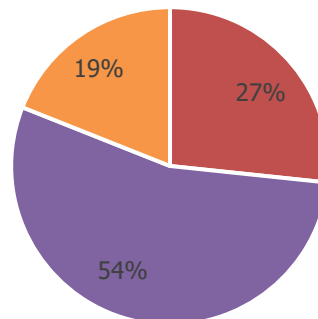
- Kegiatan Karang Taruna tingkat Desa
- Kegiatan sosial kemasyarakatan
- Musrenbangdes, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten
- Pemilu/Bawaslu

### Gambar 4-8 Tingkatan Organisasi Pemuda

Sumber: Survey jajak pendapat kepada OKP oleh penyusun, 2022

Dari sisi antusiasme dan kemudahan dalam berorganisasi, hasil jajak pendapat menunjukkan antusiasme dan ketertarikan yang sangat tinggi para pemuda/pemudi untuk mengikuti kegiatan organisasi. Kondisi di Kabupaten Sukoharjo, pada setiap levelnya, cukupmemudahkan masyarakat (pemuda) untuk menemukan dan bergabung dengan salah satu wadah organisasi.

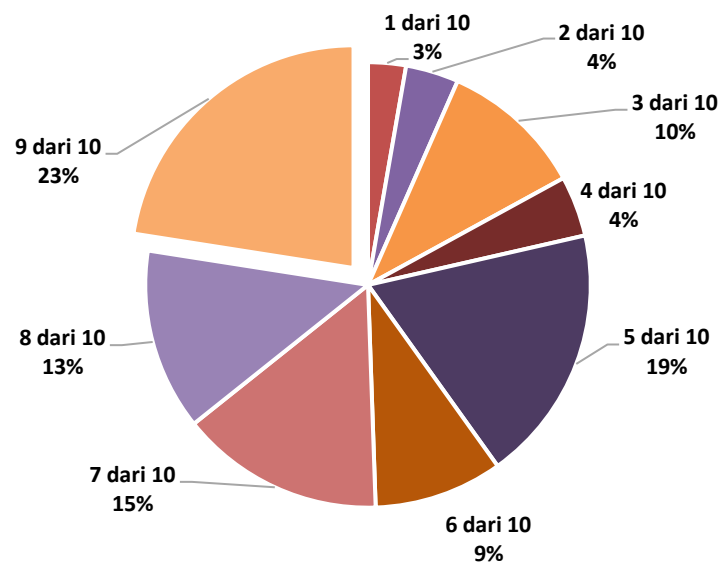
- Budaya berorganisasi masih rendah
- Pemuda/Pemudi memiliki antusias yang tinggi untuk berorganisasi
- Pemuda/pemudi tidak terlalu memiliki ketertarikan



**Gambar 4-9 Antusiasme dan Kemudahan Berorganisasi**

*Sumber: Survey jajak pendapat kepada OKP oleh penyusun, 2022*

Selanjutnya, untuk mengukur bagaimana tingkat keaktifan para pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, pada dasarnya data keterlibatan dalam organisasi Kepemudaan tingkat RT/RW/ Kelurahan telah mengindikasikan. Dari sisi persentase, hasil jajak pendapat justru menunjukkan angka keaktifan yang sangat tinggi yaitu, berturut-turut responden menyatakan, **9 dari 10** pemuda aktif mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan (23%), **5 dari 10** (19%), **7 dari 10** (15%), **8 dari 10** (13%), 3 dari 10 (10%), 6 dari 10 (9%), serta sisanya menjawab di bawah angka 5%.



**Gambar 4-10 Keterlibatan Aktif Pemuda Dalam Kegiatan Sosial Kemasyarakatan**

*Sumber: Survey jajak pendapat kepada OKP oleh penyusun, 2022*

Dari metode skala di atas, dapat dipahami bahwa tingkat partisipasi aktif pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan berada di angka di atas 5 dari 10 pemuda. Apabila dikalkulasi, jawaban responden yang memilih angka di atas 5 dari 10 pemuda mencapai 79%. Mengingat variasi jawaban responden, maka dapat diambil rerata tengah antara rentang 5 sd 9 yaitu 5 – 6 – **7** – 8 – 9. Sehingga dapat diasumsikan tingkat keterlibatan aktif pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Sukoharjo mencapai 70% dari total populasi penduduk usia pemuda.

#### 4.5.2 Persentase Pemuda yang Aktif Dalam Kegiatan Organisasi

Organisasi Kepemudaan adalah organisasi yang dibentuk oleh pemuda, berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan, yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat juga dibentuk dalam ruang lingkup pelajar dan kemahasiswaan.

Organisasi kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan. Sedangkan di lingkungan pelajar dan mahasiswa, organisasi ini berfungsi untuk mendukung kesempurnaan pendidikan dan memperkaya kebudayaan nasional.

**Tabel 4-15 Data Organisasi Kepemudaan Di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021**

No	Nama Organisasi	Alamat Sekretariat	Pengurus	
			Ketua	Sekretaris
1	KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia)	Jl. Tentara Pelajar No. 3, Jombor, Bendosari, Sukoharjo	NANANG NUGROHO,S.Pd.	SITI MUSLIMAH, M.Pd.I

No	Nama Organisasi	Alamat Sekretariat	Pengurus	
			Ketua	Sekretaris
2	PPI (Purna Paskibraka Indonesia)	Jl. Jendral Sudirman No. 199, Jombor, Bendosari, Sukoharjo	MUHAMMAD ROSID	INDRA LAKSANA
3	PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia)	Bakalan RT 04 RW 02 Kartasura Sukoharjo	AHMAD HAFIDH, M.Ag.	ANDI CAHYO, S.H.I.
4	AMPG (Angkatan Muda Partai Golkar)	Jl. Mayor Sunaryo No.12, Gawan, Kel. Sukoharjo, Kec. Sukoharjo	SUYANA, S.Sos.	
5	PC Gerakan Pemuda ANSOR	Jl. Wonogiri-Sukoharjo, Sidorejo, Bendosari, Sukoharjo	ZEN FATHONI AHMAD	
6	FKPPI (Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI/Polri)	Jl. Mayor Sunaryo No. 15, Gawan, Sukoharjo, Sukoharjo	DIDIK BUDIYANTO	BOBOT PUTRO
7	PC Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)	Jl. Rajawali V RT01 RW03, Gonilan, Kartasura, Sukoharjo	MUHAMMAD ADAM ILHAM MIZANI	MUHAMMAD TAUFIQ ULINUHA
8	Pengurus Daerah Pemuda Muhammadiyah (PD PM)	Jl. Dokter Muwardi, Balesari, Gayam, Sukoharjo	H. MUHAMMAD TRI WIBOWO	SLAMET UNTORO, S.Pd.I.
9	Pengurus Daerah Naswiatul Aisyiah (PD NA)	Jl. Moewardi, Gayam, Sukoharjo	NILA MASNURI YUNITA, S.Pd.	ULFA SULARSIH, S.Pd.
10	PD IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah)	Jl. Muwardi No 4D, Gayam, Sukoharjo	FAUZAN MUBAROK	ISNAENI SOFIANA
11	HIMA MKGR (Himpunan Mahasiswa Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong)	Jl. Mayor Sunaryo No.12, Gawan, Kel. Sukoharjo, Kec. Sukoharjo	ENI KARTIKASARI, A.Md.	
12	Pemuda Panca Marga (PPM)	Jl. Tentara Pelajar No. 02, Jombor, Bendosari, Sukoharjo	HARUN MUSTOFA, SH.	FATIH WILDAN FATIQIN
13	PD KOLEKTIF KOSGORO 1957 (Kesatuan Organisasi Serba Guna Gotong Royong)	Jl. Mayor Sunaryo No.12, Gawan, Kel. Sukoharjo, Kec. Sukoharjo	H. SARJONO,SE., SM.	
14	DPC BMI (Banteng Muda Indonesia)	Jl. Gadingan, Jombor, Bendosari, Sukoharjo	SLAGEN ABU GORDA, SE.	ANWAR SETYANTO
15	SAPMA PP (Satuan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila)	Jl. Langenharjo No. 54 RT04 RW02, Langenharjo, Grogol, Sukoharjo	AHMAD DIDIK WAHYUDI	WIDI ALIP
16	PC Fatayat Nahdlatul Ulama	Jl. Jendral Sudirman Km. 4, Ngaglik RT03 RW07, Sidorejo, Bendosari, Sukoharjo	SITI MUSLIMAH, M.Pd.I.	AMALIA HASANAH, S.Th.

No	Nama Organisasi	Alamat Sekretariat	Pengurus	
			Ketua	Sekretaris
17	PC IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama)	Jl. Sukoharjo-Solo KM 4 Ngaglik Sidorejo Bendosari Sukoharjo	MUHAMMAD ROSYID RIDO WINARSO	HARIS ADIANTORO
18	PC IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama)	Jl. Sukoharjo-Solo KM 4 Ngaglik RT02 RW07 Sidorejo Bendosari Sukoharjo	IRMA DEVI CAHYANI	SHEILA AYUPUSPITA
19	AMPI (Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia)	Jl. Mayor Sunaryo No.12, Gawan, Kel. Sukoharjo, Kec. Sukoharjo	AGUS SUMANTRI, SH., M.Kn., MM.	
20	Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sukoharjo	Singopuran RT 02 RW 02 Kartasura Sukoharjo	SHOLIQUL AMRI	
21	KOHATI (Korps HMI-wati) Cabang Sukoharjo	Singopuran RT 02 RW 02 Kartasura Sukoharjo	RAHMATUL MAHDALINA	
22	Pemuda LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia)	Iarangan Wetan, Gayam, Sukoharjo	JOKO RUSMANTO, S.Pd.	M. ROIS, SE
23	IKEMAS (Ikatan Keluarga Mahasiswa Sukoharjo)	Cemetuk RT01 RW08, Lorog, Tawangasari, Sukoharjo	AFIF FAUZAN ZARROR	TARIZA AYU NILAM SAPUTRI
24	GEMA MKGR	Jl. Mayor Sunaryo No.12, Gawan, Kel. Sukoharjo, Kec. Sukoharjo	JAKA WURYANTA, SH.	
25	BALADIKA KARYA	Jl. Mayor Sunaryo No.12, Gawan, Kel. Sukoharjo, Kec. Sukoharjo	SLAMET RIYADI, SH.	
26	Taruna Merah Putih	Jl. Gadingan, Jombor, Bendosari, Sukoharjo	DANUR SRI WARDANA, ST.	
27	Srikandi Pemuda Pancasila	Jl. Langenharjo No. 54 RT04 RW02, Langenharjo, Grogol, Sukoharjo	BAYU EVIN DAMAYANTI	SRI NUR ROHMAH
28	Pemuda Demokrat Indonesia Kabupaten Sukoharjo	Dk. Dayu, Desa Tawang, Kec. Weru, Sukoharjo	NANANG NUGROHO, S.Pd.	DIDIR ARDIYANTO
29	BAPERA (Barisan Pemuda Nusantara) Kabupaten Sukoharjo	Ngepung RT02 RW04 Karanganyar, Weru, Sukoharjo	GIYARTO, SH., MH.	PURWADI
30	Pemuda Majelis Tafsir Alquran (MTA) Perwakilan Sukoharjo	Jl. Rajawali, Dk. Mlangsen RT02 RW06, Joho, Sukoharjo	MUHAMMAD HAIDAR LIBASUDIN, S.Pd.	MUHAMMAD SHOLIKHIN, A.Md.
31	Generasi Muda Trikora	Bedingin, Banmati, Sukoharjo	HARUN MUSTOFA, SH.	MOHAMMAD RIDWAL AL ARIF

No	Nama Organisasi	Alamat Sekretariat	Pengurus	
			Ketua	Sekretaris
32	Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI)	Jl. Seruni CB. 17, Langenharjo, Grogol, Sukoharjo	AGUNG DIRMANSYAH	SRI ISMA YUNIATI

Sumber: Dokumen pemetaan potensi pemuda Kab. Sukoharjo, 2021

Data Organisasi Kepemudaan yang disajikan dalam tabel di atas menunjukkan bahwa dari data yang ada dapat disimpulkan jumlah organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Sukoharjo saat ini adalah 32 Organisasi. Secara organisasi Sebagian besar adalah organisasi kepemudaan yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, politik, Pendidikan dan profesi.

Disamping data dasar organisasi kepemudaan, dalam meninjau keterlibatan aktif pemuda dalam hal organisasi, keterlibatan dalam skala kegiatan seperti karang taruna juga perlu menjaadi perhatian besar.

Di Kabupaten Sukoharjo, data tentang karang taruna dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 4-16 Jumlah Organisasi, Klasifikasi dan Jumlah Anggota Karang Taruna di Kabupaten Tahun 2021**

No	Alamat		Nama Karang Taruna	Jumlah Anggota
	Kecamatan	Desa/Kelurahan		
1	Mojolaban	Desa Tegal Made	Tunas Harapan	23
2	Mojolaban	Desa Gadingan	Tunas Andiga	23
3	Mojolaban	Desa Wirun		15
4	Mojolaban	Desa Sapen	Bakti Karya Perkasa	52
5	Mojolaban	Desa Triyagan	Trijaya	22
6	Mojolaban	Desa Joho	Manunggal Karsa	6
7	Mojolaban	Desa Plumbon		28
8	Mojolaban	Desa Kragilan		13
9	Mojolaban	Desa Laban	Wastra Muda	15
10	Mojolaban	Desa Klumprit	Manunggal Bhakti	15
11	Mojolaban	Desa Demakan	Berdikari	10
12	Mojolaban	Desa Bekonang	Kridha Bakti	10
13	Mojolaban	Desa Dukuh Mojolaban	Tunas Bangsa	8
14	Mojolaban	Desa Cangkol		34
15	Mojolaban	Desa Palur	Wira Bhakti	12
16	Tawang Sari	Desa Pojok	Manunggal	13
17	Tawang Sari	Desa Kedungjambal		27
18	Tawang Sari	Desa Majasto		22
19	Tawang Sari	Desa Watubonang		3
20	Tawang Sari	Desa Grajegan		17
21	Tawang Sari	Desa Kateguhan		3

No	Alamat		Nama Karang Taruna	Jumlah Anggota
	Kecamatan	Desa/Kelurahan		
22	Tawang Sari	Desa Lorog		27
23	Tawang Sari	Desa Tambakboyo		7
24	Tawang Sari	Desa Tangkisan	Kriptaning Muda	3
25	Tawang Sari	Desa Pundungrejo		6
26	Tawang Sari	Desa Dalangan		3
27	Tawang Sari	Desa Ponowaren		6
28	Bendosari	Desa Mojorejo	Bhineka Muda Karya	14
29	Bendosari	Desa Bendosari		18
30	Bendosari	Desa Mertan		29
31	Bendosari	Desa Jagan		27
32	Polokarto	Desa Wonorejo	Bhakti Muda	28
33	Polokarto	Desa Kenokorejo	Appik	11
34	Polokarto	Desa Rejosari	Sapta Manunggal Wijaya	6
35	Polokarto	Desa Mranggen	Muda Berkarya	12
36	Polokarto	Desa Godog	Tunas Patria	9
37	Polokarto	Desa Genengsari		46
38	Polokarto	Desa Kemasari		14
39	Sukoharjo	Kelurahan Kenep	Kreatif	5
40	Sukoharjo	Kelurahan Banmati	Persi	3
41	Sukoharjo	Kelurahan Mandan	Arek	3
42	Sukoharjo	Kelurahan Begajah	Bhakti Tama	3
43	Sukoharjo	Kelurahan Gayam	Taruna Kencana	3
44	Sukoharjo	Kelurahan Joho	Bina Remaja	3
45	Sukoharjo	Kelurahan Jetis		3
46	Sukoharjo	Desa Combongan	Setya Praja	3
47	Sukoharjo	Kelurahan Kriwen		3
48	Sukoharjo	Kelurahan Bulakan		3
49	Sukoharjo	Kelurahan Dukuh	Taruna Manunggal	3
50	Sukoharjo	Kelurahan Sukoharjo	Bina Taruna	3
51	Sukoharjo	Kelurahan Bulakrejo	Warna Karya Remaja	4
52	Sukoharjo	Kelurahan Sonorejo	Mekar Abadi	4
53	Bulu	Desa Baran		3
54	Bulu	Desa Payaman		3
55	Bulu	Desa Kamal		3
56	Bulu	Desa Jajar		3
57	Bulu	Desa Kedungsono		3
58	Bulu	Desa Ngutran		3
59	Bulu	Desa Lengking		3
60	Bulu	Desa Gatak		3
61	Bulu	Desa Kapulawang		3
62	Bulu	Desa Margo Mulyo		3
63	Bulu	Desa Pangkah		3
64	Bulu	Desa Tambakrejo		3

No	Alamat		Nama Karang Taruna	Jumlah Anggota
	Kecamatan	Desa/Kelurahan		
65	Weru	Desa Alasombo		18
66	Weru	Desa Karakan		16
67	Weru	Desa Karangmojo		23
68	Weru	Desa Karangwuni		27
69	Weru	Desa Krajan	Manunggal Bakthi	16
70	Weru	Desa Ngreco		13
71	Weru	Desa Tawang		14
72	Weru	Desa Tegalsari	Pemuda Bersatu	15
73	Weru	Desa Weru	Bina Remaja	27
74	Weru	Desa Grogol	Putra Mandiri	13
75	Weru	Desa Jatingarang	Taruna Bakti	9
76	Weru	Desa Karangtengah		19
77	Grogol	Desa Madegondo		3
78	Kartasura	Desa Ngadirejo	Karya Bakti Abdi Jaya	10
79	Kartasura	Desa Makamhaji		20
80	Kartasura	Desa Ngemplak	Karang Taruna Mahesa	31
81	Kartasura	Desa Pabelan		15
82	Kartasura	Desa Pucangan		25
83	Nguter	Kelurahan Pengkol		3
84	Nguter	Desa Juron		3
85	Nguter	Desa Tanjung		3
86	Nguter	Desa Daleman		15
87	Nguter	Desa Pondok		7
88	Nguter	Desa Nguter		3
89	Nguter	Desa Plesan		21
90	Nguter	Desa Kedungwinong	Bina Taruna	22
91	Nguter	Desa Jangglengan	Tenggara Muda	31
92	Nguter	Desa Serut		12
93	Nguter	Desa Kepuh		5
94	Nguter	Kelurahan Celep		20
95	Nguter	Desa Baran		12
96	Nguter	Desa Lawu	Cakra Kirana	7
97	Nguter	Kelurahan Tanjungrejo		17
98	Nguter	Desa Gupit		16
Jumlah				<b>1.230</b>

Sumber: Form Data Karang Taruna Kab. Sukoharjo, 2022

Partisipasi Pemuda di Kabupaten Sukoharjo yang dapat diukur adalah partisipasi mereka dalam kegiatan Karang Taruna. Peraturan Menteri Sosial Nomor: 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna menyebutkan bahwa Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk

generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

Dari 167 desa dan kelurahan di Kabupaten Sukoharjo masing-masing sudah memiliki karang taruna dimana 116 diantaranya memiliki kriteria tumbuh, 46 berkembang dan 5 sudah menjadi karang taruna maju. Maka perlu menjadi perhatian serius dari pemangku kepentingan seperti Dinas yang mengampu karang taruna, organisasi pembina dan stake holder lainnya untuk bahu membahu mengembangkan karang taruna dan partisipasi pemuda dalam kegiatan kemasyarakatan.

Ditinjau dari keterlibatan kepemudaan dalam kegiatan organisasi, data eksisting menunjukkan bahwa sekitar 3.600 pemuda telah terlibat aktif di organisasi kepemudaan. Dengan asumsi bahwa OKP dan Karang Taruna merupakan komponen utama organisasi kepemudaan saat ini, maka dapat disimpulkan bahwa angka kumulatif dari keduanya adalah **3.600 jiwa + 1230 jiwa = 4.830 jiwa**.

Sehingga dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Persentase pemuda yang aktif dalam kegiatan organisasi pemuda juga dapat dikatakan masih dalam kategori yang sangat rendah yaitu 4.830 jiwa disandingkan dengan jumlah total usia pemuda **203.714**. Sehingga dalam hal ini dapat diasumsikan bahwa persentase yang aktif dalam kegiatan organisasi di semua jenjang di Kabupaten Sukoharjo hanya sebesar 2,37% dari total jumlah populasi usia pemuda.

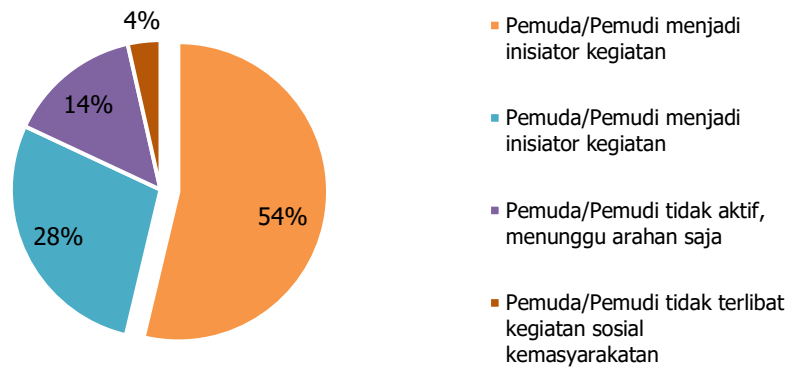
#### **4.5.3 Persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat**

Persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat merupakan persentase pemuda berusia 16–30 tahun yang pernah mengikuti kegiatan pertemuan (rapat) di lingkungan sekitar dalam setahun terakhir dan memberikan saran/ pendapat dalam rapat tersebut. Data tersebut termasuk dalam kategori data yang tidak banyak tersedia di OPD Pemerintahan, khususnya Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukoharjo yang membidangi.

Oleh karena itu dalam menggali persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat dilakukan upaya kuesioner kepada populasi OKP yang ada termasuk di dalamnya anggota karang taruna. Prosedur kuesioner dilakukan dengan metode pertanyaan tertutup dan sampling terbimbing yaitu dikhususkan kepada masing-masing ketua OKP dan Karang Taruna tingkat desa/kelurahan. Kepada masing-masing ketua OKP maupun Karang Taruna diberikan pertanyaan mengenai tingkat keaktifan OKP terhadap kegiatan musyawarah, rapat, diskusi maupun dialog pembangunan di lingkungan masing-masing baik dari tingkat Desa/Kelurahan/Kecamatan maupun tingkat Kabupaten.

Dengan adanya pembatasan terhadap populasi dan sampling yang terbimbing diharapkan baha output dari hasil kuesioner tersebut merupakan hasil yang merepresentasikan secara langsung populasi pemuda/pemudi di setiap kecamatan dengan metode Cluster (area sampling) yang menjadi target kuesioner.

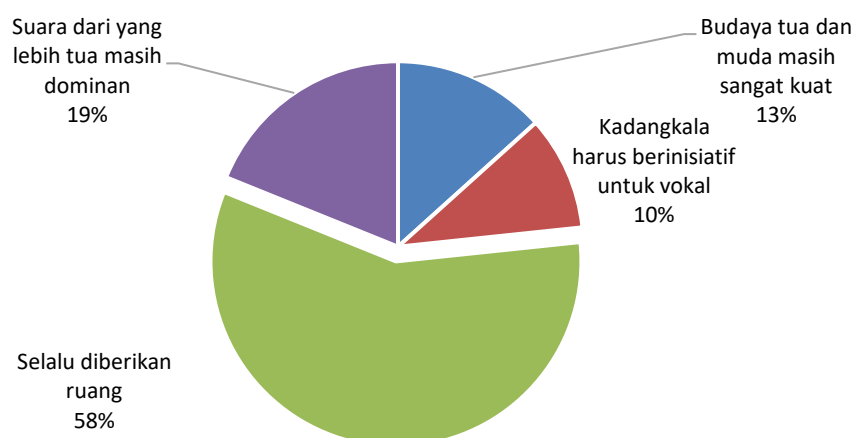
Dari sisi proses keterlibatan pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, pada prinsipnya, hasil survey menyatakan bahwa cukup banyak kegiatan yang diinisiasi oleh pemuda itu sendiri. Hal ini relevan dengan sub bab di bagian atas dimana keterlibatan pemuda mencapai 70%. Jawaban responden dibawah ini sangat mendukung hipotesa yang sudah berkembang.



**Gambar 4-11** Prosedur keterlibatan pemuda dalam Musyawarah/dengar pendapat

Sumber: Survey jajak pendapat kepada OKP oleh penyusun, 2021

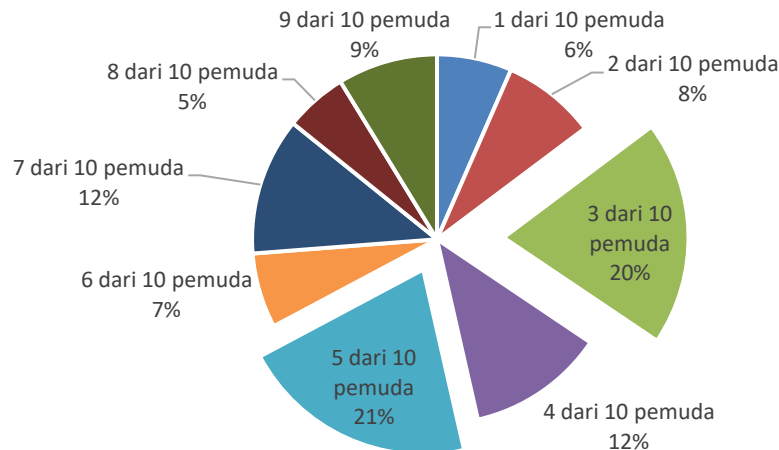
Dari hasil runtutan kuesioner di atas, selanjutnya pertanyaan diorientasikan kepada responden untuk menimbang dan meninjau Kembali apakah pemuda sudah diberikan cukup ruang dalam memberikan pendapat, saran, masukan maupun kritik dalam setiap rapat musyawarah pembangunan di setiap tingkat. Cukup menarik melihat fakta bahwa dalam praktiknya bahwa dinamika keterlibatan pemuda sudah bergeser, pemuda mendapatkan ruang demokratis yang cukup baik dibandingkan dengan budaya lama dimana sebelumnya suara dari yang lebih tua masih cukup dominan dalam setiap kegiatan.



**Gambar 4-12** Dinamika Kedudukan Pemuda dalam Musyarawah Pembangunan

Sumber: Survey jajak pendapat kepada OKP oleh penyusun, 2021

Selanjutnya, untuk memahami bagaimana proporsi persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam setiap rapat/musyawarah pembangunan, sitinjau dari setiap anggota OKP, jumlah anggota OKP yang memberikan saran/pendapat dalam kegiatan musyawarah terdapat dua jawaban yang memiliki nilai cukup signifikan yaitu setiap 5 orang dari 10 pemuda (21%), 3 dari 10 pemuda (20%) serta 7 dari 10 pemuda dan 4 dari 10 pemuda, masing-masing 12%.



**Gambar 4-13 Jumlah Pemuda yang Memberikan Saran/Pendapat**

*Sumber: Survey jajak pendapat kepada OKP oleh penyusun, 2021*

Secara persentase holistik, pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat yaitu antara rentang 30% sampai dengan 50% dari setiap 10 pemuda. Oleh karenanya, terkait dengan keterlibatan aktif pemuda yang memberikan saran maupun pendapat dalam rapat musyawarah pembangunan, maka dapat diasumsikan nilai persentase rerata tengah 45% pemuda yang terlibat aktif dalam kegiatan partisipasi musyawarah pembangunan atau yang memberikan saran dan pendapat dalam rapat.

Dari asumsi tersebut maka diperoleh nilai  $45\% \times (\text{Nilai dari } 70\% \text{ pemuda yang terlibat aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dari seluruh populasi usia pemuda}) = 45\% \times 142.599 \text{ jiwa} = \mathbf{64.169 \text{ jiwa}}$ .

Perlu digaris bawahi bahwa nilai persentase tersebut merupakan nilai indikatif, namun dari gambaran yang ada sudah memenuhi batas maksimum yang dipersyaratkan dalam indeks skro domain partisipasi dan kepemimpinan - persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat.

Menimbang hal di atas diharapkan kedepannya terdapat upaya rekapitulasi kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh pemuda, baik jumlah yang terlibat maupun tingkat keaktifan pemuda dalam memberikan saran, masukan maupun pendapat.

Skor dan nilai indeks partisipasi dan kepemimpinan

No	Indikator	Batas Minimum	Batas Maksimum	Nilai Eksisting 2020
<b>Domain Partisipasi dan Kepemimpinan</b>				
X10	Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan	0	100 (target)	70
X11	Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi	0	45 (target)	2,37
X12	Persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat	0	25 (target)	25

## 4.6 DOMAIN GENDER DAN DISKRIMINASI

Domain Gender dan Diskriminasi juga merupakan prasyarat bagi daerah untuk mengukur bagaimana IPP daerah tersebut. Terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemerintah berupaya untuk memberikan hak yang sama dalam pembangunan melalui upaya kesetaraan gender. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Permendagri 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 mengamanatkan pengintegrasian isu gender dalam berbagai bidang pembangunan, pembentukan kelembagaan PUG serta dukungan pembiayaan pembangunan yang responsive gender.

### 4.6.1 Angka perkawinan usia anak

Menurut UNICEF, Definisi perkawinan anak adalah perkawinan formal atau informal di mana salah satu atau kedua pihak berusia di bawah 18 tahun. Prevalensi perkawinan anak adalah perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum berumur 18 tahun dibagi dengan jumlah perempuan usia 20-24 tahun.

Pernikahan usia anak adalah pernikahan yang terjadi sebelum anak berusia 18 tahun serta belum memiliki kematangan fisik, fisiologis, dan psikologis untuk bertanggungjawabkan pernikahan dan anak hasil pernikahan tersebut, serta sah menurut agama dan negara (Erulkar, 2013; Bomantama, 2018; Fadlyana & Larasaty, 2009).

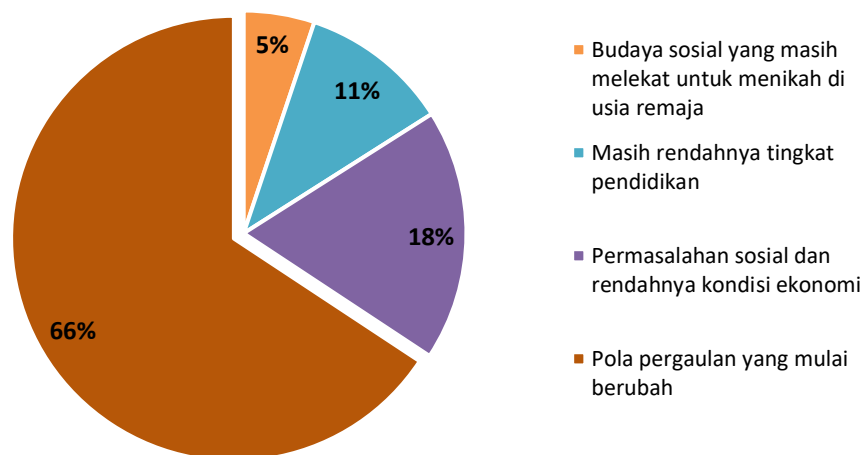
Begitu pula berdasarkan aturan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia, syarat nikah KUA adalah minimal usia 19 tahun, sehingga pernikahan sebelum usia 19 tahun merupakan kategori pernikahan usia anak.

Adapun data per desember 2021 terkait dengan perkawinan di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan umur adalah sebagai berikut:

**Tabel 4-17 Data Perkawinan di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan umur tahun 2021**

No	Kecamatan	Jumlah Nikah	Usia Pengantin					
			Laki-Laki			Wanita		
			-19	19-21	21+	-19	19-21	21+
1	Baki	500	4	32	464	16	44	440
2	Bendosari	425	0	28	397	4	154	267
3	Bulu	284	0	5	279	1	7	276
4	Gatak	343	6	12	325	12	34	297
5	Grogol	725	9	25	691	13	72	640
6	Kartasura	621	7	119	495	8	136	477
7	Mojolaban	582	4	21	557	15	57	510
8	Nguter	387	0	9	378	0	21	366
9	Polokarto	539	3	118	418	10	153	376
10	Sukoharjo	589	4	111	474	8	127	454
11	Tawang Sari	371	1	12	358	5	49	317
12	Weru	387	3	52	332	4	97	286
Jumlah		5.753	41	544	5168	96	951	4.706

Sumber: Bima Islam, Kementerian Agama, Kabupaten Sukoharjo, 2022.



**Gambar 4-14 Faktor Pernikahan Dini Menurut Hasil Survei**

Sumber: Survey jajak pendapat kepada OKP oleh penyusun, 2022

Hasil kuesioner terhadap pemuda/pemudi di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan bahwa salah satu faktor kunci pernikahan usia dini di Kabupaten Sukoharjo diantaranya disebabkan oleh pola pergaulan yang mulai berubah di kalangan generasi muda. Sebanyak 51% dari responden menyatakan adanya pergeseran nilai budaya tersebut. Selain itu, persentase terbesar kedua adalah permasalahan sosial dan rendahnya kondisi ekonomi (18%), rendahnya tingkat pendidikan/literasi (11%) serta budaya sosial yang masih melekat untuk menikah di usia remaja (5%).

Dari perspektif indeksasi pembangunan pemuda, maka data perkawinan di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan umur tersebut diketahui bahwa, jumlah perkawinan usia anak ataupun usia dibawah 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan adalah 41, sehingga persentase pernikahan usia anak adalah 0,7%. Persentase ini cenderung menurun drastis dibandingkan dengan angka tahun 2020 yang mencapai 2,4% dari total perkawinan di Kabupaten Sukoharjo.

#### 4.6.2 Persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan menengah dan tinggi

Dalam konteks partisipasi sekolah diketahui dua terminology yaitu, Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi anak sekolah pada suatu kelompok tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya.

Perbedaan mencolok antara keduanya adalah Angka Partisipasi Murni (APM): Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian.

Angka Partisipasi Kasar (APK): Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama.

**Tabel 4-18 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021**

Kelompok Umur	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Sukoharjo		
	2019	2020	2021
7 - 12	99.84	99.60	99.97
13 - 15	99.64	98.86	98.76
16 - 18	81.92	82.40	82.02
19 - 24	-	-	-

Sumber: BPS Kabupaten Sukoharjo, 2022

Untuk memetakan proporsi usia pemuda dalam hal partisipasi sekolah, data di atas dapat menjadi acuan, dimana nilai APS kelompok umur mulai dari 16 – 18 tahun adalah 82,02. Idealnya adalah diperoleh nilai APS perguruan tinggi, agar dapat dipetakan dengan objektif. Namun karena keterbatasan data maka diasumsikan nilai 82,02 merupakan nilai APS tahun terakhir.

Dari pemahaman di atas, maka melakukan pengukuran Indeks persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan menengah dan tinggi digunakan data APM sebagai berikut:

**Tabel 4-19 Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021**

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) of Kabupaten Sukoharjo		
	2019	2020	2021
Sekolah Dasar (SD)	95.52	95.95	102.21
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	81.44	82.38	100.67
Sekolah Menengah Atas (SMA)	63.50	64.43	84.16
Perguruan Tinggi (PT)	-	-	-

Sumber: BPS Kabupaten Sukoharjo, 2022

Melalui data APM Kabupaten Sukoharjo tahun 2021 di atas diperoleh nilai APM sebesar 84,16 yang mana apabila disandingkan dengan populasi penduduk usia pemuda sebesar 203.714 jiwa maka diperoleh jumlah penduduk usia pemuda yang sedang menempuh pendidikan menengah dan tinggi adalah 171.445 jiwa.

Proporsi jumlah penduduk pemuda perempuan terhadap populasi usia pemuda adalah 49,05% sehingga dapat diasumsikan bahwa jumlah penduduk perempuan secara keseluruhan yang sedang menempuh pendidikan berada di angka 84.099 jiwa. Sehingga persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan menengah dan tinggi saat ini berkisar di angka **84%** (84.099 jiwa/populasi penduduk perempuan usia muda\*100).

Dalam konteks objektivitas pembahasan, maka garis bawah dalam subbab ini perlu dipertegas Kembali bahwa data tahunan terkait dengan persentase usia pemuda 16-30 tahun yang menempuh pendidikan menengah dan tinggi perlu menjadi satu bahasan khusus, terutama bagi Dinas Pendidikan.

#### **4.6.3 Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal**

Pembangunan sumber daya manusia berperspektif gender dilaksanakan untuk menjamin dan melindungi hak perempuan dan anak terhadap diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi dalam kehidupan. Disamping itu peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak diperlukan untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui peran partisipasi aktif dalam proses pembangunan.

Di bidang ketenagakerjaan, peran aktif perempuan salah satunya dapat diukur dari partisipasi perempuan pada lembaga pemerintah maupun swasta. Berikut adalah tabel Persentase Tenaga Kerja Perempuan di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020.

**Tabel 4-20 Jumlah Tenaga Kerja Perempuan di Lembaga Pemerintah maupun swasta 2020**

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN	JENIS PEKERJAAN				Jumlah
			PNS / TNI / Polri	Karyawan Swasta /BUMN/ BUMD	Tenaga Pendidik	Tenaga Kesehatan	
1	Weru	P	27	1.751	128	52	1.958
2	Bulu	P	15	1.653	42	29	1.739
3	Tawang Sari	P	32	2.280	123	57	2.492
4	Sukoharjo	P	145	4.321	274	156	4.896
5	Nguter	P	33	1.601	66	64	1.764
6	Bendosari	P	103	2.182	153	90	2.528
7	Polokarto	P	35	2.592	2.027	84	4.738
8	Mojolaban	P	93	5.607	183	160	6.043
9	Grogol	P	63	7.371	248	114	7.796
10	Baki	P	46	3.566	144	86	3.842
11	Gatak	P	46	2.823	101	66	3.036
12	Kartasura	P	153	5.634	375	222	6.384
	Jumlah	P	791	41.381	3.864	1.180	47.216

Sumber: Kompilasi data BPS dan data pemetaan potensi pemuda Kabupaten Sukoharjo, 2021

Total jumlah penduduk perempuan yang bekerja di sektor formal adalah 47.216 jiwa. Jumlah terbesar partisipasi pemuda perempuan dalam sektor formal adalah sebagai Karyawan swasta/BUMN/BUMD yaitu sebesar 41.381 jiwa. Selanjutnya sebagai tenaga pendidik yaitu 3.864 jiwa, tenaga Kesehatan 1.180 jiwa dan di Lembaga pemerintahan PNS/TNI/Polri 791. Total penduduk pemuda perempuan adalah 99.928 jiwa, sehingga persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal perbandingan dengan jumlah total pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal yaitu dengan persentase sebesar 47,2%.

#### 4.6.4 Skor dan Nilai Sub Indeks Domain Gender dan Diskriminasi

No	Indikator	Batas Minimum	Batas Maksimum	Data Eksisting
Domain Gender dan Diskriminasi				
X13	Angka perkawinan usia anak	0 (target)	45	2,4
X14	Persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh	25	100 (target)	84

No	Indikator	Batas Minimum	Batas Maksimum	Data Eksisting
	pendidikan menengah dan tinggi			
X15	Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal	0	60 (target)	47,2

Sumber: Tim Penyusun, 2022



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO  
**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
Jl. Gedung Menara Wijaya Lt. 7 Jalan Jend. Sudirman No. 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521

5

JASA KONSULTANSI

# Kesimpulan

dan

# Rekomendasi

PENELITIAN - PENGUKURAN INDEKS  
PENGUNCIAN PEMUDA (IPP)

KABUPATEN SUKOHARJO

LAPORAN AKHIR

*Bagian ini berisi Kesimpulan dan Rekomendasi terkait dengan Skor subindeks, Nilai Domain dan Nilai IPP Keseluruhan Kabupaten Sukoharjo tahun 2022.*



## 5.1 KESIMPULAN

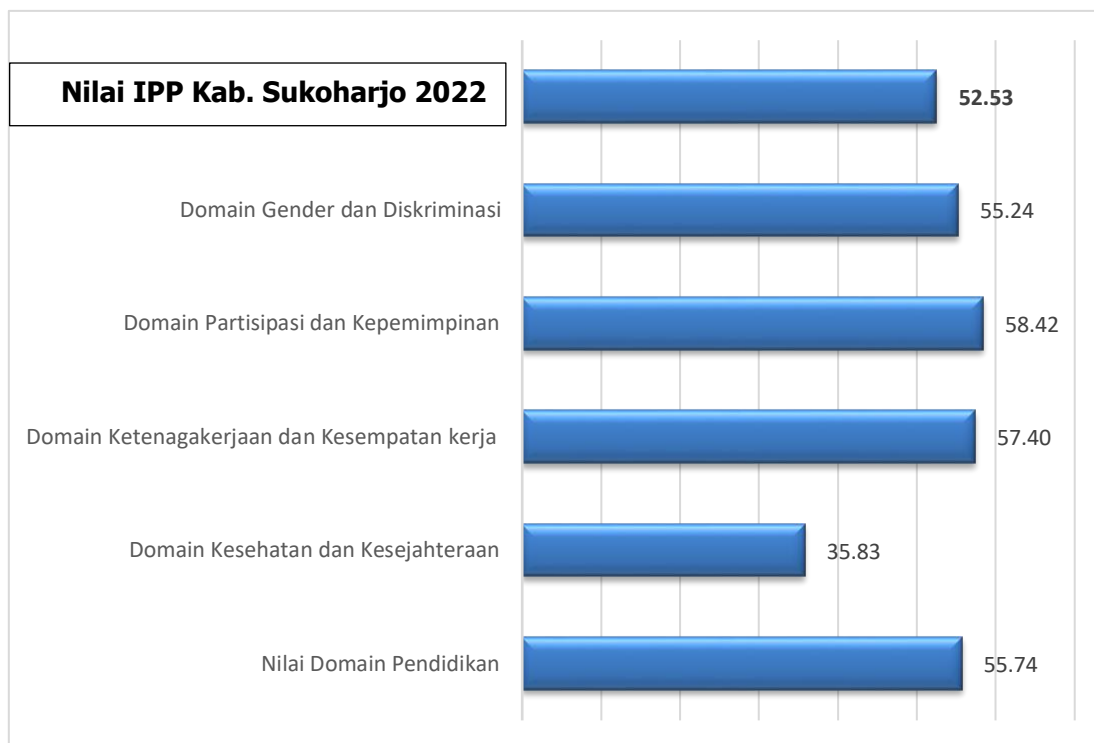
Data terkait dengan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP Kabupaten Sukoharjo) Tahun 2022 ini menampilkan beberapa data kepemudaan dan organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Dari data yang disusun dapat disimpulkan sebagai berikut;

**Tabel 5-1 Penilaian Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022**

No	Indikator	Batas Min	Batas Maks	Nilai Indikator	Persamaan 1	Persamaan 2	Nilai Transformasi	Nilai Domain
<b>Domain Pendidikan</b>								
1	Rata-rata lama sekolah	0	15	9,35	6,23	(0,55)	6,23	
2	APK sekolah menengah	0	100	72,45	7,25	(6,25)	7,25	
3	APK perguruan tinggi	0	100	3,24	(2,24)	3,24	3,24	
<b>Nilai Domain 1</b>								<b>55,74</b>
<b>Domain Kesehatan dan Kesejahteraan</b>								
4	Angka kesakitan pemuda	0	20	13,11	6,56	(5,56)	5,56	
5	Persentase pemuda korban kejahatan	0	3	0,05	0,17	0,83	0,83	
6	Persentase pemuda yang merokok	0	36	27,66	7,68	(6,68)	6,68	
7	Persentase remaja perempuan yang sedang hamil	0	45	45	10,00	(9,00)	1,26	
<b>Nilai Domain 2</b>								<b>35,83</b>
<b>Domain Ketenagakerjaan dan Kesempatan kerja</b>								
8	Persentase pemuda wirausaha kerah putih	0	2	2	10,00	(9,00)	10,00	
9	TPT pemuda	0	28	6,93	2,48	(1,48)	1,48	
<b>Nilai Domain 3</b>								<b>57,40</b>
<b>Domain Partisipasi dan Kepemimpinan</b>								
10	Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan	0	100	70	7,00	(6,00)	7,00	
11	Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi	0	45	2,37	0,53	0,47	0,53	

No	Indikator	Batas Min	Batas Maks	Nilai Indikator	Persamaan 1	Persamaan 2	Nilai Transformasi	Nilai Domain
12	Persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat	0	25	25	10,00	(9,00)	10,00	
<b>Nilai Domain 4</b>								<b>58,42</b>
<b>Domain Gender dan Diskriminasi</b>								
13	Angka perkawinan usia anak	0	45	0,7	0,16	0,84	0,84	
14	Persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan menengah dan tinggi	25	100	84	7,87	(6,87)	7,87	
15	Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal	0	60	47,2	7,87	(6,87)	7,87	
<b>Nilai Domain 5</b>								<b>55,24</b>
<b>Nilai IPP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022</b>								<b>52,53</b>

Sumber : Tim Penyusun, 2022



**Gambar 5-1 Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022**

*Sumber : Tim Penyusun, 2022*

1. Nilai total Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2021 adalah 41,77 sedangkan **pada tahun 2022 nilai IPP adalah 52,53** ;
2. Pada perhitungan IPP tahun 2022, terdapat kenaikan yang cukup signifikan dikarenakan perbaikan terhadap metode dan eksplorasi yang lebih mendalam terhadap ketersediaan data pendukung. Hal ini merupakan konsekuensi positif dari pelaksanaan perhitungan IPP tahun sebelumnya sehingga pada tahun 2022 dapat dilakukan perbaikan yang cukup merata;
3. Dari nilai IPP 2022, perbaikan pendataan yang cukup baik dilakukan pada hampir seluruh domain. Domain Partisipasi dan kepemimpinan memegang peranan kunci dalam perhitungan tahun 2022 dimana terdapat dukungan data karang taruna dari setiap desa dan kelurahan;
4. Selanjutnya nilai Domain Ketenagakerjaan dan Kesempatan Kerja juga menyumbangkan nilai yang cukup baik dimana pekerja kerah putih dan nilai tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sukoharjo dalam kondisi yang cukup baik;
5. Selanjutnya, pada domain gender dan diskriminasi, kondisi kesetaraan gender di Kabupaten Sukoharjo cukup baik dimana proporsi jumlah pemuda perempuan yang berkesempatan untuk melanjutkan studi serta jumlah kesempatan kerja bagi perempuan di Kabupaten Sukoharjo juga cukup baik.

## 5.2 REKOMENDASI

1. Berdasarkan data data di atas maka perlu perencanaan yang terstruktur dan komprehensif baik dari Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, stakeholder kepemudaan, kelompok-kelompok kewirausahaan, Pemerintah Provinsi hingga Pemerintah Pusat

untuk memperhatikan dan mengembangkan potensi kepemudaan yang ada di Kabupaten Sukoharjo.

2. Program dan kegiatan yang pro pemuda dan meningkatkan kemandirian, kreativitas, tanggung jawab dan rasa nasionalisme perlu secara nyata diaplikasikan di kalangan generasi muda Kabupaten Sukoharjo.
3. Permasalahan Data masih menjadi satu kendala yang cukup prinsipil dalam menterjemahkan kebutuhan penyusunan IPP. Meskipun upaya eksplorasi data telah dilakukan secara optimal, namun ditengarai bahwa permasalahan data masih dapat terus untuk diperdalam lebih lanjut. Peranan dari masing-masing OPD Terkait sangat diperlukan untuk membantu elaborasi data yang dibutuhkan. Tidak adanya kesamaan format kebutuhan data usia pemuda secara spesifik merupakan kendala utama sehingga perlu adanya upaya pendekatan agar kebutuhan data IPP dapat dipelajari terlebih dahulu oleh OPD Terkait.